



Volume 1, Nomor 1, April 2020

**Analisis CSR Dan Corporate Governance Sebagai Faktor Determinasi Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi**

*The Analysis of CSR And Corporate Governance As Determination Factors With Profitability As Moderating*

Herlina Lusmeida (Universitas Pelita Harapan)

1

**Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)**

*Audit Finding And Audit Rectification On Audit Opinion (Case Study - Provincials Government Of Republic Indonesia)*

Rafri Amyulianthy, Andi Sayyidatun Ufairah Anto, dan Shinta Budi Astute (Universitas Pancasila)

14

**Pengaruh Transaksi Berelasi Terindikasi Tunneling Terhadap Profitabilitas Bank Bumn Indonesia**

*The Effect Of Related Tunneling Related Transactions On*

*The Profitability Of State-owned Enterprise Banks In Indonesia*

Siti Arifah (Universitas Tidar, Magelang) dan Agung Nur Probohudono (Universitas Sebelas Maret)

28

**Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Ketidapatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes)**

*Analysis Of Factors Influence Of Income Tax Obligation (Case Study In Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Bumiayu Brebes)*

Isqi Mubarakah, Yeni Priatna Sari, dan Krisdiyanti (Akuntansi Politeknik Harapan Bersama)

38

**Relevansi Nilai Sustainability Reporting Dengan NVIVO Measurement Method : Benchmarking Penerapan Pelaporan Perusahaan Yang Terdaftar Di Johannesburg Stock Exchange**

*Value Relevance Of Sustainability Reporting With NVIVO Measurement*

*Method: Benchmarking Of Corporates Implementation Listed On*

*Johannesburg Stock Exchange*

Kenny Fernando, Refianto, dan Budi Kurniawan (Universitas Bunda Mulia)

53

**Whistleblowing Intention: Pendekatan Graham's Model Of Principled Organizational**

*Whistleblowing Intention: Graham's Approach Model Of Principled Organizational*

Setyorini dan Donifaizal (Universitas Negeri Yogyakarta)

66

**Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Benish Model**

*Analysis Of The Effect Of Fraud Pentagon On Fraudulent Financial Reporting Using Benish Model*

Meiliana Jaunanda, Cindy Tian, Karina Edita dan Vivien (Universitas Pelita Harapan)

80

# SUSUNAN REDAKSI

## PENASEHAT

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pelita Harapan

## PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pelita Harapan

## CHIEF EDITOR

Dr. Tanggor Sihombing, BA., MBA. (Universitas Pelita Harapan)

## EDITOR

Elfina Astrella Sambuaga, M.S.Ak.(Universitas Pelita Harapan)

## REVIEWER INTERNAL

1. Dr. Tanggor Sihombing, BA., MBA. (Universitas Pelita Harapan)
2. Dr. Antonius Herustya, SE., Ak., MM, CA. (Universitas Pelita Harapan)
3. Dr. Mulyadi Noto Soetardjo, SE., Ak., M.Com., CA., CPA. (Universitas Pelita Harapan)
4. Wijaya Triwacananingrum, SE., Ak., M.A., CA, CMA, CSP. (Universitas Pelita Harapan)

## REVIEWER INDEPENDEN

1. Prof. Dr. Anis Chariri (Universitas Dipenogoro, Semarang).
2. Prof. Hasan Fauzi, Ph.D (Universitas Sebelas Maret, Solo)

## STAF ADMIN

Ria Marisa Stephanie

## PENERBIT & ALAMAT REDAKSI

Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pelita Harapan  
e-Mail: [jpa@uph.edu](mailto:jpa@uph.edu)

## **KATA PENGANTAR**

Salam Sejahtera,

Sahabat peneliti dan pemerhati ilmu Akuntansi, patut kita syukuri kepada Tuhan atas segala kebaikannya dan kebijaksanaan yang telah diberikan kepada masing-masing kita. Teristimewa dengan kehadiran perdana JPA (Jurnal Penelitian Akuntansi) – UPH ini. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada sahabat peneliti atas kontribusi dengan mengirimkan artikel-artikelnya. Juga kepada semua reviewer kami yang turut memberikan kelengkapan pada artikel-artikel yang telah masuk. Semua ini adalah untuk menjunjung tinggi Tridarma Perguruan Tinggi; Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kami sangat berharap berkat kerjasama dari semua pihak, kualitas jurnal ini akan meningkat dari satu publikasi ke publikasi berikutnya sehingga lekas mendapat status akreditasi yang lebih baik. Dengan itu, JPA ini akan sangat bermanfaat kepada masyarakat akuntansi dalam meningkatkan profesi dan wawasan sebagai manfaat dari penelitian dan kajian-kajiannya.

Tentu, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada redaksi, masih banyak hal yang perlu membutuhkan perbaikan. Kami berharap bapak/ibu dapat memberikan usul/saran kepada kami. SUKSES.

Hormat kami  
Editor

- ANALISIS CSR DAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI FAKTOR DETERMINASI NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI** 1 - 13  
*THE ANALYSIS OF CSR AND CORPORATE GOVERNANCE AS DETERMINATION FACTORS WITH PROFITABILITY AS MODERATING*  
*Herlina Lusmeida, Universitas Pelita Harapan*
- TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP OPINI AUDIT (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA)** 14 - 27  
*AUDIT FINDING AND AUDIT RECTIFICATION ON AUDIT OPINION (CASE STUDY - PROVINCIALS GOVERNMENT OF REPUBLIC INDONESIA)*  
*Rafrini Amyulianthy, Universitas Pancasila*  
*Andi Sayyidatun Ufairah Anto, Universitas Pancasila*  
*Shinta Budi Astute, Universitas Pancasila*
- PENGARUH TRANSAKSI BERELASI TERINDIKASI TUNNELING TERHADAP PROFITABILITAS BANK BUMN INDONESIA** 28 - 37  
*THE EFFECT OF RELATED TUNNELING RELATED TRANSACTIONS ON THE PROFITABILITY OF STATE-OWNED ENTERPRISE BANKS IN INDONESIA*  
*Siti Arifah, Universitas Tidar*  
*Agung Nur Probohudono, Universitas Sebelas Maret*
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGARUH KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) BUMIAYU BREBES)** 38 - 52  
*ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCE OF INCOME TAX OBLIGATION 45 (CASE STUDY IN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PAJAK (KP2KP) BUMIAYU BREBES)*  
*Isqi Mubarakah, Politeknik Harapan Bersama*  
*Yeni Priatna Sari, Politeknik Harapan Bersama*  
*Krisdiyawati, Politeknik Harapan Bersama*
- RELEVANSI NILAI SUSTAINABILITY REPORTING DENGAN NVIVO MEASUREMENT METHOD: BENCHMARKING PENERAPAN PELAPORAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE** 53 - 65  
*VALUE RELEVANCE OF SUSTAINABILITY REPORTING WITH NVIVO MEASUREMENT METHOD: BENCHMARKING OF CORPORATES IMPLEMENTATION LISTED ON JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE*  
*Kenny Fernando, Universitas Bunda Mulia*  
*Budi Kurniawan, Universitas Bunda Mulia*  
*Refianto, Universitas Bunda Mulia*
- WHISTLEBLOWING INTENTION: PENDEKATAN GRAHAM'S MODEL OF PRINCIPLED ORGANIZATIONAL** 66 - 79  
*WHISTLEBLOWING INTENTION: GRAHAM'S APPROACH MODEL OF PRINCIPLED ORGANIZATIONAL*  
*Setyorini, Universitas Negeri Yogyakarta*  
*Donifaizal, Universitas Negeri Yogyakarta*
- ANALISIS PENGARUH FRAUD PENTAGON TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING MENGGUNAKAN BENISH MODEL** 80 - 98  
*ANALYSIS OF THE EFFECT OF FRAUD PENTAGON ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING USING BENISH MODEL*  
*Meiliana Jaunanda, Universitas Pelita Harapan*  
*Cindy Tian, Universitas Pelita Harapan*  
*Karina Edita, Universitas Pelita Harapan*  
*Vivien, Universitas Pelita Harapan*

## ANALISIS CSR DAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI FAKTOR DETERMINASI NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI

Herlina Lusmeida  
herlina.lusmeida@uph.edu

Universitas Pelita Harapan

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CSR dan CG merupakan faktor determinasi dari nilai perusahaan. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk menguji apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh CSR dan CG terhadap Nilai Perusahaan. Variabel independen penelitian ini adalah corporate social responsibility dan tata kelola perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi, sedangkan variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2018, metode penentuan sample dengan purposive sampling, data diolah dengan menggunakan SPSS versi 24.0. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah CSR dan GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan serta Profitabilitas diharapkan dapat memperkuat hubungan positif CSR dan GCG terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: Tata Kelola, Kinerja Keuangan, Nilai Perusahaan, Manufaktur, CSR

### Abstract

*The purpose of this study is to find out whether CSR and CG are determinants of corporate value. In addition, the purpose of this study is also to test whether profitability can moderate the influence of CSR and CG on Company Value. The independent variable of this study is corporate social responsibility and corporate governance with profitability as a moderating variable, while the dependent variable is firm value. The sample of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2018, the method of determining samples by purposive sampling, the data is processed using SPSS version 24.0. The expected results of this study are CSR and GCG have a positive effect on company profitability and profitability is expected to strengthen the positive relationship of CSR and GCG on firm value*

*Keywords: Governance, Financial Performance, Companies's Value, Manufacturing, CSR*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ingin memperoleh laba yang maksimal dengan beban yang seminimal mungkin merupakan tujuan perusahaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi investor, agar dapat mencapai hal tersebut maka perusahaan yang *go public* berupaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perusahaan semakin mudah untuk mencapai tujuannya (Anthony & Govindarajan, 2007).

Selain itu perusahaan juga berkewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari investor maupun masyarakat dan pemerintah, investor tidak hanya melihat dari sisi keuangan saja untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka sudah menjadi tanggung jawab bagi perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan (Zuhroh dan Sukmawati, 2003).

Merupakan salah satu keunggulan bagi perusahaan jika menginformasikan penerapan CSR, selain diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan, penerapan CSR dapat membantu menjaga nama baik perusahaan yang nantinya secara tidak langsung memberikan manfaat positif bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Standar yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan CSR antara lain dengan menggunakan pedoman yang dirumuskan dalam GRI (*Global Reporting Initiative*). Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa: “tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap penanam modal”, disebutkan dalam penjelasan pasal “Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam lingkungan dan budaya masyarakat, maka tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan oleh setiap perusahaan”.

Menurut Rezaee, 2009 Tata kelola perusahaan jika dikaitkan dengan teori keagenan, merupakan alat yang berfungsi meyakinkan investor bahwa mereka akan memperoleh pengembalian atas dana yang diinvestasikan. *Corporate Governance* berkaitan dengan keyakinan dari investor bahwa manajer tidak akan menyalahgunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya *Good Corporate Governance* maka manipulasi manajer dapat diminimalisasi melalui mekanisme pemantauan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengukur penerapan *Good Corporate Governance* dengan menggunakan *proxy* kepemilikan manajerial dan klasifikasi kantor akuntan publik.

Dengan menjalankan CSR dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, selain itu profitabilitas yang diberikan oleh perusahaan akan mendukung peningkatan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh CSR dan GCG perusahaan dengan profitabilitas sebagai pemoderasi terhadap nilai perusahaan dalam perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah ini adalah untuk mengetahui apakah CSR dan CG merupakan faktor determinasi dari nilai perusahaan. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk menguji apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh CSR dan CG terhadap Nilai Perusahaan.

## 2. RERANGKA TEORITIS

### 2.1 Tinjauan Literatur

Teori keagenan menyebutkan bahwa konflik antara principal dan agen yang akan mengakibatkan munculnya praktek manajemen laba akan dapat diminimalisasi dengan melakukan penyetaraan kepentingan antara *principal* (pemegang saham) dan agen (karyawan/manajer). *Principal* diasumsikan hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atas investasi mereka di perusahaan. Agen akan mendapat kepuasan jika menerima kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Perbedaan informasi antara manajemen dan pemilik dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik (Jao dan gagaring dalam Subhan, 2015).

*Corporate Governance* merupakan sebuah konsep yang dilakukan agar perusahaan dapat mengalami peningkatan kinerja perusahaan melalui pengendalian kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas pihak manajemen terhadap stakeholder dengan berpedoman kepada kerangka peraturan. Penerapan corporate governance dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan (Hikmah Is'ada Rahmawati, 2013).

Alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur sejauh mana pencapaian yang sudah dicapai oleh perusahaan adalah rasio kinerja keuangan. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan salah satunya adalah profitabilitas. Untuk mengamati apakah suatu perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan dalam kemampuan menghasilkan labanya, dapat dilakukan perbandingan dari beberapa periode (Kasmir, 2018).

Untuk mengukur profitabilitas dapat digunakan beberapa rasio, pada penelitian kali ini, digunakan *Return On Equity* untuk mengukur profitabilitas perusahaan (Sujarweni, 2017).

Persepsi investor atau pemegang saham terhadap keberhasilan perusahaan terhadap sumber daya yang dimiliki yang direpresentasikan dengan harga saham perusahaan tersebut (Arganata, 2015). PBV adalah rasio yang berhubungan dengan penilaian saham dimana biasanya nilai saham dicerminkan lewat nilai perusahaan. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2008), PBV adalah rasio harga pasar saham yang ditentukan masyarakat terhadap nilai buku yang diperhitungkan oleh perusahaan. Semakin tinggi PBV maka mencerminkan harga saham perusahaan yang tinggi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi juga nilai perusahaan. PBV yang tinggi akan membuat investor percaya pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Murnita dan Putra (2018) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Rosiana, *et al.*, (2013) juga menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki hubungan positif terhadap nilai perusahaan. Namun ada penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah (2015), Putri, *et al.*, (2016) membuktikan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Anwar (2012) juga membuktikan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan, *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara Mutmainah (2015) mengatakan bahwa GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiranata dan Nugrahanti (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sementara penelitian yang dilakukan oleh Candradewi dan Sedana (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

## 2.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

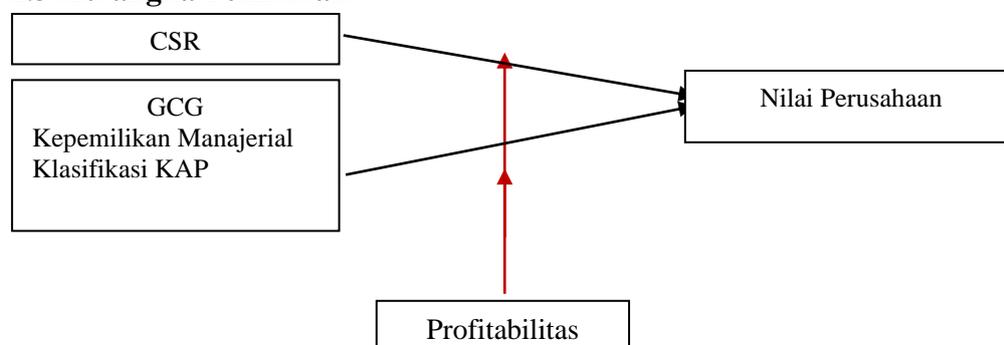
H3 : Klasifikasi KAP berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

H4 : Profitabilitas memperkuat hubungan positif CSR terhadap nilai perusahaan

H5 : Profitabilitas memperkuat hubungan positif kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan

H6 : Profitabilitas memperkuat hubungan positif klasifikasi KAP terhadap nilai perusahaan

## 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran  
Sumber : diolah oleh penulis, 2019

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hipotesis asosiatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari BEI periode 2015-2017, adapun populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector industry dasar kimia yang tercatat di BEI periode 2015-2017, sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling.

Adapun model dari penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{CSR} + \beta_2 \text{KM} + \beta_3 \text{KAP} + \beta_4 \text{ROE} + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{CSR} + \beta_2 \text{KM} + \beta_3 \text{KAP} + \beta_4 \text{ROE} + \beta_5 (\text{CSR} * \text{ROE}) + \beta_6 (\text{KM} * \text{ROE}) + \beta_7 (\text{KAP} * \text{ROE}) + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y = Nilai Perusahaan
- $\alpha$  = Constanta
- $\beta_1$ - $\beta_7$  = Koefisien variabel
- CSR = CSR index
- KM = Kepemilikan Manajerial
- KAP = Kantor Akuntan Publik
- ROE = Return on Equity (proxy profitabilitas)
- e = eror

Hipotesis 1, 2 dan 3 diuji dengan menggunakan model 1 sedangkan hipotesis 4,5 dan 6 diuji dengan menggunakan model 2. Diharapkan  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  dan  $\beta_4$  pada model empiris 1 hasilnya positif signifikan agar sesuai dengan hipotesis yang ada demikian pula halnya dengan  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ ,  $\beta_4$ ,  $\beta_5$ ,  $\beta_6$  dan  $\beta_7$  pada model empiris 2 hasilnyapun diharapkan positif signifikan.

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga macam yaitu: variabel dependen, moderasi dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, untuk nilai perusahaan di proxy kan dengan PBV (*Price to book value*). PBV merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya (Fernandar 2012). Rumus yang digunakan untuk mencari PBV adalah:

$$\text{PBV (Price to Book Value)} = \frac{\text{Harga Saham per lembar saham}}{\text{Nilai Buku per lembar saham}}$$

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah profitabilitas, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit digunakan ROE :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR, untuk memperoleh CSR index peneliti menggunakan acuan CSR index yang dikeluarkan oleh GRII sedangkan untuk variabel GCG dalam penelitian ini diproxykan dengan kepemilikan manajerial dan kantor akuntan publik. Kepemilikan manajerial adalah merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). Kepemilikan manajerial

dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar, kemudian digunakan *dummy* jika ada kepemilikan manajerial diberi nilai 1 jika tidak diberi nilai 0.

Untuk kepemilikan kantor akuntan public digunakan *dummy* juga yaitu apabila perusahaan diaudit dengan menggunakan jasa KAP big four diberi nilai 1, jika tidak diberi nilai 0.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	120	.3297	.4945	.3853	.0291
KM	120	.00	1.00	.5500	.4996
KAP	120	.00	1.00	.3583	.4815
ROE	120	-.2792	.2498	.0521	.0967
PBV	120	-.2552	3.0245	.7332	.5799
CSRROE	120	-.1074	.1052	.0200	.0375
KMROE	120	-.2792	.2498	.0237	.0812
KAPROE	120	-.1826	.2498	.0207	.0727
Valid N (listwise)	120				

Sumber : data diolah oleh penulis

Untuk variabel CSR diketahui nilai minimum adalah 0,3297 dan nilai maksimum adalah 0,4945. Sementara itu nilai rata-rata adalah 0,3853 dengan standar deviasi sebesar 0,0291. Untuk variabel jumlah kepemilikan manajerial diketahui nilai minimum adalah 0,00 dan nilai maksimum adalah 1,00 Sementara itu nilai rata-rata adalah 0,3583 dengan standar deviasi sebesar 0,4815. Untuk variabel KAP diketahui nilai minimum adalah 0,00 dan nilai maksimum adalah 1,00 Sementara itu nilai rata-rata adalah 0,311 dengan standar deviasi sebesar 0,46424. Untuk variabel klasifikasi KAP diketahui nilai minimum adalah 0,00 dan nilai maksimum adalah 1,00 Sementara itu nilai rata-rata adalah 0,3583 dengan standar deviasi sebesar 0,4815. Untuk variabel ROE diketahui nilai minimum adalah 0-0,2792 dan nilai maksimum adalah 0,2498. Sementara itu nilai rata-rata adalah 0,3583 dengan standar deviasi sebesar 0,0967. Untuk variabel PBV diketahui nilai minimum adalah -0,2552 dan nilai maksimum adalah 3,0245 Sementara itu nilai rata-rata adalah 0,7332 dengan standar deviasi sebesar 0,5799. Untuk variabel interaksi CSR dan ROE (CSR\_ROE) diketahui nilai minimum adalah -0,1074 dan nilai maksimum adalah 0,1052. Sementara itu nilai rata-rata adalah 0,0200 dengan standar deviasi sebesar 0,3750. Untuk variabel interaksi kepemilikan manajerial dan ROE (KM\_ROE) penjualan diketahui nilai minimum adalah -0,2792 dan nilai maksimum adalah 3,0245. Sementara itu nilai rata-rata adalah 0,0237 dengan standar deviasi sebesar 0,812. Untuk variabel interaksi antara KAP dan ROE diketahui nilai minimum adalah -0,1826 dan nilai maksimum adalah 0,2498. Sementara itu nilai rata-rata adalah -0,0207 dengan standar deviasi sebesar 0,727

## 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sehingga perlu dihindari penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis regresi berganda. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan sebagai berikut:

### a. Hasil Uji Normalitas

Data-data bertipe skala sebagai pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji normalitas. Menurut Ghazali (2013) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan statistik, adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Uji normalitas secara grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik (Ghozali, 2013). Uji normalitas dapat dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun hasil perhitungan uji normalitas secara statistic yang dilihat berdasarkan uji Kolmogorof-Smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
One-Sample Kolmogorov – Smirnov Test Model 1

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.47685048
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		1.160
Asymp. Sig. (2-tailed)		.135

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp sig adalah sebesar  $0,135 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan data telah terdistribusi dengan normal.

Tabel 3  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Model 2

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.45380771
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		1.344
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp sig adalah sebesar  $0,054 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan data telah terdistribusi dengan normal.

### b. Hasil Uji Multikolinieritas

Gejala multikolinieritas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat diantara variabel independen (bebas) dalam suatu persamaan regresi. Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolinieritas maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Dalam penelitian ini hanya dilakukan pada model 1 saja karena model 2 merupakan model dengan interaksi moderasi yang pada umumnya menyebabkan masalah multikolinieritas.

Tabel 4.  
Hasil Uji Multikolinieritas

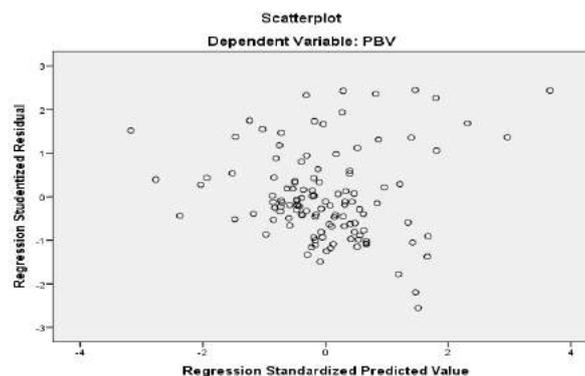
Variabel	Tolerance	VIF
CSR	.929	1.077
KM	.967	1.034
KKP	.946	1.057
REO	.985	1.016

Sumber; data diolah oleh penulis, 2019

Tabel di atas menjelaskan bahwa data yang ada tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel independen. Karena data di atas menunjukkan bahwa nilai VIF Kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01 keadaan seperti itu membuktikan tidak terjadinya multikolinieritas.

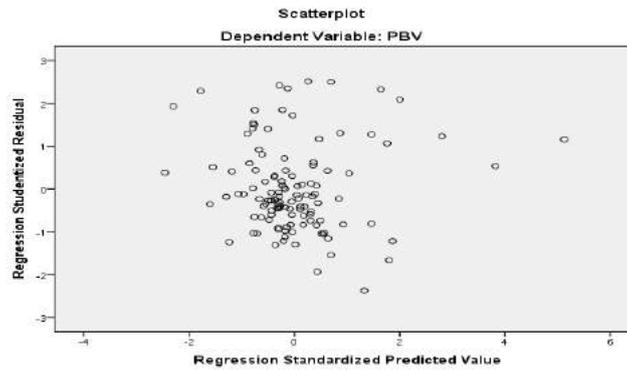
### c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan grafik menggunakan scatter plot dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1

Dari hasil pengujian diatas, dapat diketahui bahwa sebaran data tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedisitas dalam model penelitian ini



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2

Dari hasil pengujian diatas, dapat diketahui bahwa sebaran data tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedisitas dalam model penelitian ini.

#### d. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji Durbin Watson (DW).

Tabel 5.  
Hasil Uji Autokolerasi Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.569 <sup>a</sup>	.324	.301	.48507	2.026

a. Predictors: (Constant), ROE, CSR, KM, KAP

b. Dependent Variable: PBV

Pada tabel di atas diketahui nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2.048 sementara itu nilai DU untuk sampel 120 dengan variabel independen sebanyak 4 variabel adalah 1.7715 dan nilai 4-Du 2,2285 adalah karena nilai DW (2,026) berada antara Du (1.17715 ) dan 4-Du (2,285) maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

Tabel 6  
Hasil Uji Autokolerasi Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.623 <sup>a</sup>	.388	.350	.46777	2.019

a. Predictors: (Constant), KAPROE, KM, CSR, KAP, KMROE, CSRROE, ROE

b. Dependent Variable: PBV

Pada tabel di atas diketahui nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2.048 sementara itu nilai DU untuk sampel 120 dengan variabel independen sebanyak 7 variabel adalah 1.8270 dan nilai 4-Du 2,173 adalah karena nilai DW (2,019) berada antara Du (1.8270 ) dan 4-Du (2,173) maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

### 4.3 Hasil Uji Hipotesis

#### 1. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasil uji penelitian berpengaruh secara simultan atau bersama-sama.

Tabel 7  
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) Model 1

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	12.970	4	3.243	13.781	.000 <sup>b</sup>
	Residual	27.059	115	.235		
	Total	40.029	119			

a. Dependent Variable: PBV

b. Predictors: (Constant), ROE, CSR, KM, KAP

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas nilai signifikansi 0,000 Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat nilai perusahaan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa model layak diuji.

Tabel 18  
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) Model 2

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	15.522	7	2.217	10.134	.000 <sup>b</sup>
	Residual	24.507	112	.219		
	Total	40.029	119			

a. Dependent Variable: PBV

b. Predictors: (Constant), KAPROE, KM, CSR, KAP, KMROE, CSRROE, ROE

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas nilai signifikansi 0,000 Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat nilai perusahaan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa model layak diuji.

#### 2. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali). Berdasarkan hasil olahan data statistik, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 9  
Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t) Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	-2.042	.618	-3.306	.001	
1	CSR	6.677	1.588	.335	4.206	.000
	KM	.043	.091	.037	.470	.639
	KAP	.111	.095	.092	1.173	.243
	ROE	2.679	.464	.447	5.779	.000

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Nilai Perusahaan} = -2,0242 + 0,335 \text{ CSR} + 0,037 \text{ KM} + 0,092 \text{ KAP} + 0,447 \text{ ROE} + \varepsilon$$

Tabel 10  
Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t) Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	-.773	.717	-1.078	.283	
1	CSR	3.470	1.835	.174	1.891	.061
	KM	.013	.104	.011	.121	.904
	KAP	.098	.105	.082	.936	.351
	ROE	-14.712	5.710	-2.452	-2.577	.011
	CSRROE	43.910	14.492	2.842	3.030	.003
	KMROE	.431	1.001	.060	.431	.667
	KAPROE	.241	.966	.030	.250	.803

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Nilai Perusahaan} = -0,773 + 0,174 \text{ CSR} + 0,011 \text{ KM} + 0,082 \text{ KAP} - 2,2452 \text{ ROE} + 2,842 \text{ CSRROE} + 0,060 \text{ CSRKM} + 0,030 \text{ KAPROE} + \varepsilon$$

### H1 : CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Hasil pengujian pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 4,206 > t-hitung sebesar 1.65810 dan nilai sig sebesar 0,000 > 0,05. Sementara itu nilai *standardized koefisien beta* adalah sebesar 0,335. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murnita dan Putra (2018); Rosiana, *et al.*, (2013).

### H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Hasil pengujian pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,470 < t-hitung sebesar 1.65810 dan nilai sig sebesar 0,3195 (0,639/2) > 0,05. Sementara itu nilai *standardized koefisien beta* adalah sebesar 0,11. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh positif dari kepemilikan manajerial

terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiranata dan Nugrahanti (2013), akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Candradewi dan Sedana (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

### H3 : Klasifikasi KAP berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Hasil pengujian pengaruh klasifikasi KAP terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai t-hitung sebesar  $1.173 < t\text{-hitung sebesar } 1.65810$  dan nilai sig sebesar  $0,1215 (0,243/2) > 0,05$ . Sementara itu nilai *standardized koefisien beta* adalah sebesar 0,92. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh positif dari klasifikasi KAP terhadap nilai perusahaan.

### H4 : Profitabilitas memperkuat hubungan positif CSR terhadap nilai perusahaan

Hasil pengujian variabel profitabilitas dalam memperkuat hubungan positif CSR terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai t-hitung sebesar  $3.030 > t\text{-hitung sebesar } 1.6584$  dan nilai sig sebesar  $0,0015 (0,03/2) < 0,05$ . Sementara itu nilai *standardized koefisien beta* adalah sebesar 2,842. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dalam memperkuat hubungan positif CSR terhadap nilai perusahaan sehingga hipotesis 4 dalam penelitian ini dapat didukung

### H5 : Profitabilitas memperkuat hubungan positif KM terhadap nilai perusahaan

Hasil pengujian variabel profitabilitas dalam memperkuat hubungan positif KM terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai t-hitung sebesar  $0,250 < t\text{-hitung sebesar } 1.6584$  dan nilai sig sebesar  $0,3335 (0,667/2) > 0,05$ . Sementara itu nilai *standardized koefisien beta* adalah sebesar 0,060. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak dapat memperkuat hubungan positif KM terhadap nilai perusahaan sehingga hipotesis 5 dalam penelitian ini gagal didukung

### H6 : Profitabilitas memperkuat hubungan positif KAP terhadap nilai perusahaan

Hasil pengujian variabel profitabilitas dalam memperkuat hubungan positif klasifikasi KAP terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai t-hitung sebesar  $0,431 < t\text{-hitung sebesar } 1.6584$  dan nilai sig sebesar  $0,4015 (0,803/2) > 0,05$ . Sementara itu nilai *standardized koefisien beta* adalah sebesar 0,030. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak dapat memperkuat hubungan positif KAP terhadap nilai perusahaan sehingga hipotesis 6 dalam penelitian ini gagal didukung

#### a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Menurut Ghozali (2013) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Adapun hasil uji determinasi Adjusted R<sup>2</sup>.

Tabel 11  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) (model 1)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.569 <sup>a</sup>	.324	.301	.48507	2.026

a. Predictors: (Constant), ROE, CSR, KM, KAP

b. Dependent Variable: PBV

Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (Adj R Square) dan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square). Berdasarkan tabel model summaryb di atas diperoleh bahwa nilai adjusted R Square sebesar

0,301 atau 30,1 %. Hal ini berarti variasi dari nilai perusahaan bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam penelitian ini sebesar 30,1 %. Sedangkan sisanya sebesar 69,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Tabel 12  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) (model 2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.623 <sup>a</sup>	.388	.350	.46777	2.019

a. Predictors: (Constant), KAPROE, KM, CSR, KAP, KMROE, CSRROE, ROE

b. Dependent Variable: PBV

Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (Adj R Square) dan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square). Berdasarkan tabel model summaryb di atas diperoleh bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,350 atau 35%. Hal ini berarti variasi dari nilai perusahaan bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam penelitian ini sebesar 35%. Sedangkan sisanya sebesar 65% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
3. Klasifikasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
4. Profitabilitas memperkuat hubungan positif antara CSR dengan nilai perusahaan.
5. Profitabilitas tidak dapat memperkuat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan.
6. Profitabilitas tidak dapat memperkuat hubungan positif antara klasifikasi kantor akuntan publik dan nilai perusahaan.

### 5.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian
2. Menambah variabel untuk penelitian selanjutnya.
3. Mencoba menggunakan jenis sample lain diluar industri dasar kimia.

### 5.3 Implikasi

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel CSR merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dimana hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi CSR maka nilai perusahaan akan semakin baik. Bagi perusahaan hal ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan harus berupaya untuk terus meningkatkan kegiatan CSR nya dengan melakukan investasi yang lebih besar dalam bentuk CSR untuk kepentingan social sehingga mendapatkan manfaat dengan bertambahnya nilai perusahaan. Sementara itu bagi investor sendiri, perlu untuk memperhatikan perusahaan dengan aktivitas CSR yang tinggi dalam pertimbangan investasinya.

Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang dapat memperkuat pengaruh dari CSR terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan perusahaan dengan profitabilitas yang baik dan juga melakukan aktivitas CSR akan dianggap sebagai perusahaan yang sehat dan bernilai tinggi. Oleh karena itu setiap perusahaan juga perlu berupaya meningkatkan profitabilitasnya dengan cara meningkatkan kinerja penjualannya secara lebih efektif dan terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan jaman.

Investor juga perlu untuk memperhatikan tingkat profitabilitas dari perusahaan dalam melakukan investasinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anthony and Govindarajan. (2007). *Management Control System* 12<sup>th</sup> edition. Mc Graw Hill. International Edition.
- Brigham, Eugene F. dan Michael C. Ehrhardt. (2008). *Financial Management Theori and Practice*. USA: Thomson Learning Inc.
- Candradewi, I. dan Sedana, P. Bagus Ida. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap ROA. *Jurnal Manajemen Udayana*. Vol. 5, No. 5. Universitas Udayana, Bali.
- Fenandar, Gany Ibrahim dan Surya Raharja. (2012). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. *Journal of Accounting*, 1 (2), 1-10.
- Hikmah Is'ada Rahmawati. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, M. S., & Anwar, Y. (2012). Impact of corporate social responsibility toward firm value and profitability. *The Business Review, Cambridge*, 19(2), 316-322.
- Mutmainah. (2015). *Analisis Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*. E-Journal STIE Dewantara. Vol X No. 2. Mojokerto
- Putri, A. K., Sudarma, M., dan Purnomosidhi, B. (2016). Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris sebagai variabel pemoderasi (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(2), 344-358.
- Rezaee, Zabihollah. (2009). *Corporate Governance and Ethics*. USA: John Wiley and Sons.
- Sujarweni, W. V. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tambunan, S.C.M., Saifi, M., Hidayat, R.R. (2017). Pengaruh GCG Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 53 No. 1. Universitas Brawijaya, Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta.
- Wiranata, A.Y., dan Nugrahanti, W. Y. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15, No. 1. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Zuhroh, D., dan Sukmawati, I. P. (2003). Analisis pengaruh luas pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan terhadap reaksi investor (studi kasus pada perusahaan-perusahaan high profile di BEJ). *Simposium Nasional Akuntansi VI*.

## TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP OPINI AUDIT (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)

<sup>1</sup>Rafrini Amyulianthy, <sup>2</sup>Andi Sayyidatun Ufairah Anto, <sup>3</sup>Shinta Budi  
<sup>1</sup>kuliahpia@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada 33 provinsi diseluruh Indonesia tahun 2014-2018, dengan total sampel sebanyak 165 sampel. Sumber data menggunakan IHPS tahun 2013-2019 dan LKPD tahun 2014-2018. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode regresi linear berganda pendekatan data panel. Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit.

**Kata kunci:** Opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, analisis regresi berganda, sektor public

### Abstract

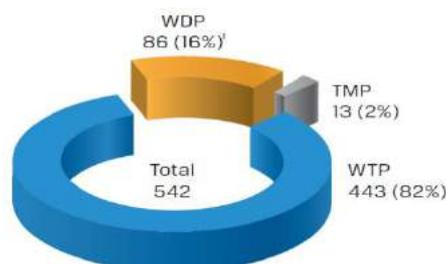
*The purpose of this study is to determine the effect of audit finding and audit follow-up on audit opinion. This research was a type of quantitative data analysis. This research used 33 provinces in Indonesia through 2014-2018, with 165 samples in total. Sources of data using BPK's summary report in 2013-2019 and LKPD in 2014-2018. Analysis of the data used in this study was multiple linear regression methods, with data panel approach. The results showed that audit finding have a negative and significant effect on audit opinion, and audit follow up has a positive and significant impact on audit opinion.*

*Keywords:* audit opinion, audit finding, audit follow-up, multiple regression analysis, public sector

## 1. PENDAHULUAN

Pada saat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini untuk mengelompokkan Laporan Keuangan mana saja yang telah memiliki informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Masyitoh et al, 2015). Dimana jenis opini yang diberikan oleh BPK untuk Laporan Keuangan yang telah diperiksanya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar) serta TMP (Tidak Memberikan Pendapat/*Disclaimer*).

Dalam hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tingkat 1 (LKPD) Tahun 2018 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 443 (82%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 86 (16%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 13 (2%) LKPD seperti terlihat dalam *Gambar 1.1* berikut:



Gambar 1. Garfik Opini LKPD Tahun 2018  
(Sumber : BPK-RI melalui publikasi [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Opini dari auditor memiliki dua sifat yaitu opini untuk laporan keuangan privat dan opini untuk laporan keuangan publik, untuk opini laporan keuangan privat di lakukan kepada para investor, *stakeholder*, serta kreditur dari perusahaan yang di audit untuk melihat apakah laporan dari perusahaan tersebut layak atau tidak. Berbeda dengan opini laporan keuangan publik sektor, pada tingkat pemerintahan, pemerintah harus mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah dialokasikan oleh negara kepada pemerintah. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah kepada masyarakat (Sari et al, 2013)

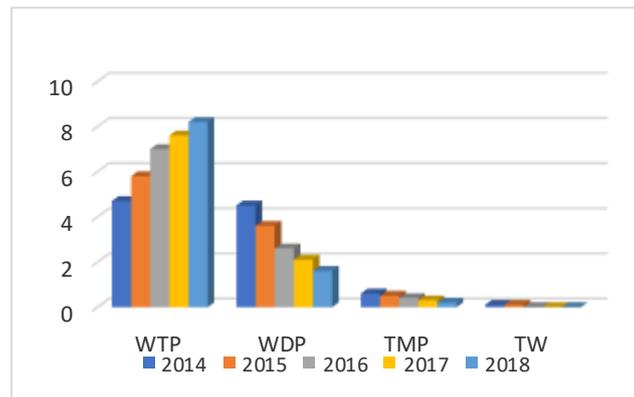
Oleh karena itu pentingnya opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut membuat BPK harus dapat menilai apakah pemerintah telah mempertanggung jawabkan laporannya sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan dan terbebas dari salah saji yang dapat merugikan negara. Hal tersebut yang membuat opini dari BPK penting (Mustikarini & Fitriyani, 2012).

Dari beberapa opini yang dapat diterbitkan BPK RI, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang diinginkan oleh semua pemerintah daerah. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan suatu prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah, di samping sebagai upaya untuk menyukseskan terealisasinya salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD (Tresnasari, 2019)

*Stakeholder* dari pemerintah daerah membutuhkan informasi yang berkualitas dari LKPD yang dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, audit pada LKPD sangat diharapkan mampu mencerminkan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit BPK harus diperhatikan oleh masing-masing daerah khususnya kepala daerah yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang dipercaya oleh para *stakeholder* untuk menjalankan pemerintahan di suatu daerah. (Pratiwi dan Aryani, 2016)

Dalam IHPS 2019, BPK mengungkapkan sebanyak 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan, meliputi 7.236 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.636 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp9,68 triliun, serta 93 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp676,81 miliar (IHPS 2019).

Namun dalam 5 tahun terakhir (2014-2018), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 35 poin persen, yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 82% pada LKPD Tahun 2018. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP dan TMP mengalami penurunan masing-masing sebesar 30 poin persen (dari 46% menjadi 16%) dan 4 poin persen (dari 6% menjadi 2%) (IHPS 2019), hal ini ditunjukkan dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Opini LKPD 2014-2018  
 Sumber : BPK-RI melalui publikasi [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Semakin wajar laporan keuangan, maka semakin tingginya tingkat opini laporan keuangan yang diterima. Jika tingkat kewajaran tinggi maka probabilitas opini audit yang diperoleh pemerintah menjadi semakin baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara. Pemberian opini didasarkan pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi opini audit adalah temuan audit. Hal ini pernah di teliti oleh Siregar dan Rudiansyah (2019), Widodo dan Sudarno (2017), Sari et al (2015), dan, Zahara dan Malichah (2017) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap opini audit. Temuan audit sendiri terdapat dua jenis, yaitu sistem pengendalian intern dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang undangan. Dalam penelitian kali ini akan membahas kedua temuan audit tersebut.

Variabel selanjutnya yaitu hasil tindak lanjut pemeriksaan (TLHP), dimana hal tersebut menjadi salah satu fokus oleh kepala daerah, karena setiap kepala daerah atau pimpinan organisasi wajib merespon 90 hari atas temuan dari BPK, sehingga kemungkinan opini audit tahun selanjutnya di pengaruhi oleh TLHP. Penelitian mengenai TLHP telah di teliti oleh Parwanto dan Harto (2016) yang membahas hubungan TLHP terhadap kinerja, dan Treanawati dan Apandi (2016) terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian kali ini akan mencoba untuk menghubungkan antara tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit.

Oleh karena itu penelitian kali ini ingin mencoba meneliti bahwa temuan audit yang sifatnya finansial dan juga tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat membentuk opini audit yang diberikan BPK kepada pemerintah provinsi pada tahun 2014-2018 dengan judul “Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit” (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)

## 2. LITERATUR REVIEW, HIPOTESIS PENELITIAN DAN KERANGKA PENELITIAN

### 2.1 Teori Agensi di Sektor Publik

Teori keagenan menurut Jensen and Meckling (1976), yaitu hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan *agent*, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*.

Jensen dan Meckling (1976), juga menjelaskan bahwa terdapat dua permasalahan dalam teori keagenan yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* merupakan permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Sedangkan *adverse selection* merupakan suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *principal-agent*, sehingga kerangka hubungan *principal-agent* merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik (Lane dan Kivisto, 2008). Dalam sektor publik teori keagenan tersebut juga dapat dilihat dari dalam laporan penyusunan anggarannya (Santoso & Pambelum, 2008; Amyulianthy et al, 2016). Pemerintah daerah yang dimaksud di sini yaitu pemerintah provinsi yang menyusun anggaran yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan setelah disahkan oleh pemerintah pusat maka anggaran tersebut harus di pertanggung jawabkan realisasi anggarannya oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah juga memiliki akses langsung terhadap informasi dibandingkan masyarakat yang mana dapat menimbulkan masalah keagenan yang terjadi. Maka dari itu pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik (Wardhani, et al, 2017). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dimaksudkan untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul antara masyarakat dan pemerintah (Rustiyaningsih & Immanuela, 2014). BPK akan mengeluarkan opini atas laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan oleh rakyat kepada pemerintah.

Opini BPK ini merupakan mekanisme akuntabilitas dari pengelolaan keuangan di pemerintahan. Instansi yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian akan memiliki kredibilitas yang lebih baik daripada instansi yang mendapatkan opini Tidak Wajar. Dari laporan keuangan tersebut, secara tidak langsung masyarakat dapat melihat baik atau tidaknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mustikarini & Fitriasaki, 2012). Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2014, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah, yang berarti berkurangnya *information asymmetry*. Dengan demikian maka kemungkinan melakukan korupsi menjadi lebih kecil (Setyaningrum & Martani, 2018).

## 2.2 Hipotesis Penelitian dan Kerangka Penelitian

### a. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Opini Audit

Menurut Teori Agensi terdapat masalah antara *principal* dan *agent*, karena *agent* dapat mengetahui lebih banyak informasi di bandingkan *principal* sehingga *agent* mempunyai asimetri informasi di bandingkan *principal*, informasi asimetri dapat menyebabkan *agent* untuk bertindak buruk yang merupakan *moral hazard* (Jensen & Meckling, 1976). Sehingga *principal* merasa perlu untuk membuktikan pekerjaan yang telah di lakukan oleh *agent* tersebut sudah benar atau tidak.

Apabila *monitoring* dilakukan setiap harinya hal tersebut membutuhkan *cost* yang besar dan membutuhkan waktu yang banyak, maka salah satu cara untuk mengukur dengan memeriksa kewajaran laporan keuangan yang telah di buat oleh *agent* (Azhar & Setyaningrum, 2015). Hal ini membuat fungsi auditor di butuhkan untuk memitigasi masalah. Di Indonesia, institusi pemerintahan hanya boleh di periksa oleh BPK sehingga BPK akan menilai apakah laporan keuangan tersebut sudah wajar atau belum. Pada saat auditor melakukan pemeriksaan, *moral hazard* dapat terdeteksi melalui temuan audit, dimana temuan audit dapat terdiri dari sistem pengendalian intern yang masih lemah dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan.

Penelitian ini hanya akan meneliti mengenai ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Karena ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dapat menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang material. Semakin tinggi temuan audit maka semakin tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta mengakibatkan rendahnya kewajaran dari laporan keuangan. Sehingga, jika rendah dari kewajaran dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku maka opini audit yang dihasilkan akan rendah.

Siregar dan Rudiansyah (2019) dan Widodo dan Sudarno (2017) dalam penelitiannya telah menguji bahwa Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap opini BPK. Dalam hasil penelitian tersebut memberikan hasil yang serupa, yang menyatakan bahwa temuan audit yang berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Berbeda dengan Oktafan (2017) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit.

*H<sub>1</sub>: Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap opini audit*

### b. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit

Tidak hanya melalui temuan audit, *adverse selection* juga dapat di deteksi melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan, apabila terdapat hasil tindak lanjut yang tidak di laksanakan maka dapat dikatakan bahwa *agent* tidak ingin menerima saran yang telah di berikan oleh auditor, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard*. Dimana semakin banyak rekomendasi yang tidak di kerjakan oleh *agent* maka hasil dari opini audit akan semakin tidak baik.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan memperbaiki permasalahan yang ada sehingga kesalahan dapat dihentikan dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih baik. Selain itu, dengan adanya perbaikan dapat mengurangi temuan yang berulang yang dapat menjadi pertimbangan pemeriksa dalam memberikan opini. Jika pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, maka penerimaan opini yang terbaik akan semakin tinggi. Sebaliknya

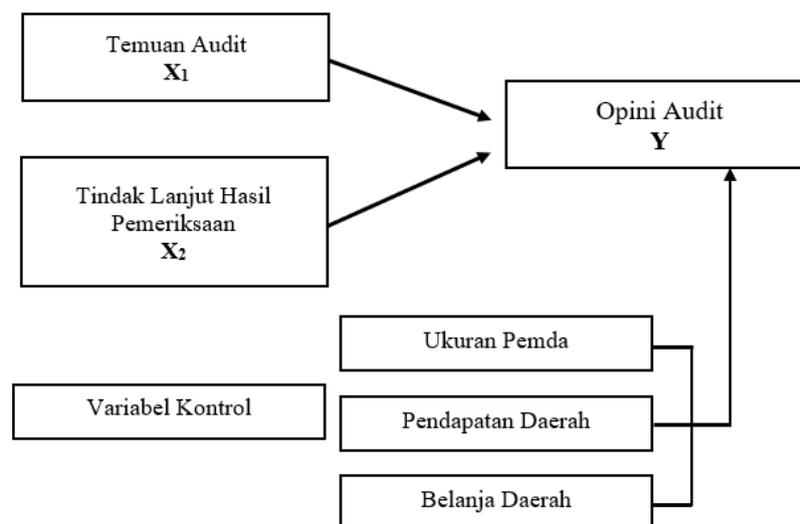
apabila hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti maka kemungkinan untuk mendapatkan opini yang terbaik akan semakin rendah.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan periode lalu yang diukur dengan semakin banyak rekomendasi yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan yang direpresentasikan pada tingkat pengungkapan menjadi semakin tinggi, sehingga probabilitas opini yang di peroleh pemerintah daerah menjadi semakin baik.

Pratiwi dan ayani (2016) menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap opini audit. Berbeda dengan sari et al (2015) dan agusti (2014), yang menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Setyaningrum (2015), menyatakan semakin banyak tindak lanjut pemeriksaan dilakukan maka pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah menjadi semakin baik sehingga opini yang diperoleh pada periode selanjutnya semakin baik.

$H_2$  : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit

Gambar 3 berikut menjelaskan kerangka penelitian yang akan dianalisis di tahapan selanjutnya.



Gambar 3. Kerangka Penelitian

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Sampel Penelitian

Sampel penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2018, dengan mengeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Variabel dalam penelitian ini meliputi Temuan Audit (FIND) dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TIND). Untuk lengkapnya data sampel ada di Lampiran 1.

### 3.2 Operasionalisasi Variabel

#### a. Temuan Audit

Temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah temuan audit atas praktik-praktik yang dilakukan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan atas ketidakpatuhan terbagi menjadi empat klasifikasi temuan, yaitu kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, dan administrasi.

Untuk mengukur temuan audit dapat menggunakan jumlah temuan atas kasus-kasus ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Maulana dan Handayani, 2015) Dimana FIND: (LN) Jumlah Temuan Audit.

#### b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan entitas yang diperiksa dan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Sebagai langkah percepatan tindak lanjut penyelesaian atas temuan BPK. (BPKP, 2017).

Pemeriksaan oleh auditor pada umumnya menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah dimana rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem pada pemerintah daerah. rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi yang telah di berikan. Dalam menghitung tindak lanjut hasil pemeriksaan akan menggunakan rasio antara nilai sesuai rekomendasi dibandingkan dengan nilai rekomendasi. Dimana:

$$\text{TIND} = \frac{\text{nilai sesuai rekomendasi}}{\text{nilai rekomendasi}} \times 100\%$$

#### c. Opini Audit BPK

Dimana terdapat empat kategori yang diukur menggunakan skala ordinal yang diurutkan dari opini terburuk hingga opini terbaik yaitu, Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Tidak Wajar (TW), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana skor yang diberikan yaitu TMP diberi skor 1 (satu), TW diberi skor 2 (dua), WDP diberi skor 3 (tiga), dan WTP diberi skor 4 (empat).

### 3.3 Model Penelitian

Setelah pengujian asumsi, analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini diberikan sebagai berikut: Mengikuti pengujian asumsi, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini diberikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Find}_{it} + \beta_2 \text{Tind}_{it-1} + \beta_3 \text{Size}_{it} + \beta_4 \text{Rev}_{it} + \beta_5 \text{Expenditure}_{it} + \varepsilon$$

### 3.4 Analisis data

Prosedur analisis data yang digunakan dalam analisis regresi berganda adalah Ordinary Least Squares (OLS) menggunakan pendekatan data panel. Saat menggunakan data panel, tiga pendekatan berikut dapat digunakan: *common effect*, *fixed effect*, dan *random effects*.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengujian Statistik Deskriptif

Sebelum analisis dilakukan terlebih dahulu dikemukakan statistik deskriptif seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1  
Hasil Statistik Deskriptif (n=165)

Keterangan	Opini Audit	Temuan Audit	Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan
Mean	3.896970	24.37614	0.527325
Median	4.000000	24.55377	0.571581
Maximum	4.000000	27.02327	1.000000
Minimum	1.000000	14.91454	0.000000
Std. Dev.	0.359950	1.343836	0.356992

\*sumber: data diolah

Dari tabel statistika deskriptif dapat dilihat:

Rata-rata dari opini audit adalah 3,896870 dan jumlah data yang ada adalah 165. Nilai pemberian opini audit tertinggi adalah 4,000000 yaitu wajar tanpa pengecualian pada seluruh provinsi di Indonesia dan nilai opini audit terendah adalah 1,000000 yaitu tidak memberikan pendapat pada seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini berarti standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Dalam hal ini apabila tidak memberikan opini sebesar 0,359950.

Rata-rata dari temuan audit adalah 24,37614 dan jumlah data yang ada adalah 165. Nilai jumlah temuan audit tertinggi adalah 27,02327 temuan di seluruh provinsi di Indonesia dan nilai temuan audit terendah adalah 14,91454 temuan di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini berarti standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Dalam hal ini apabila tidak memberikan opini sebesar 1,343836.

Rata-rata dari tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah 0,527325 dan jumlah data yang ada adalah 165. Nilai jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan tertinggi adalah 1.000000 tindak lanjut hasil pemeriksaan di seluruh provinsi di Indonesia dan nilai terendah adalah 0,000000 tindak lanjut hasil pemeriksaan di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini berarti standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Dalam hal ini apabila tidak memberikan opini sebesar 0,356992.

### 4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik terhadap parameter untuk melihat apakah ada asumsi-asumsi dari regresi yang dilanggar dalam penelitian ini. Hal ini harus dilakukan karena didalam metode *Ordinary Least Square* (OLS), setiap parameter penelitian harus bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Uji pelanggaran asumsi yang dilakukan adalah: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji auto korelasi dan uji heterokedastisitas. Hasil dari pengujian asumsi klasik dapat ditemukan di Lampiran 2.

#### a. Pemilihan Model Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat terhadap pengujian yang dapat dilakukan, antara lain dengan Uji Chow yang digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* dan Uji Hausman digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect*. Hasil dari kedua Uji tersebut menemukan bahwa penelitian ini akhirnya menggunakan *fixed effect*. Hasil dari pengujian pemilihan model data panel dapat ditemukan di Lampiran 3.

#### b. Pengujian Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data menggunakan regresi berganda kemudian dapat dilakukan uji hipotesis dalam penelitian ini. Kesimpulan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi disajikan dalam tabel. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan melalui uji signifikansi *t value* dengan membandingkan nilai signifikansi *t* atau probabilitas *t*-statistik terhadap tingkat kepercayaan atau signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Dengan prosedur diperoleh seluruh hipotesis dalam penelitian ini yang signifikan dan dapat didukung oleh data penelitian. Tabel 2 berikut merupakan hasil analisis regresi model pengujian hipotesis.

Tabel 2  
Hasil Analisis Regresi Berganda (n=165)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Hipotesis
Constanta	12.34448	4.559466	0.0000	-
Opini Audit	-0.258386	-3.125317	0.0022	<b>Diterima</b>
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0.350815	3.244619	0.0015	<b>Diterima</b>
Ukuran Pemda	0.599390	2.734276	0.0070	-
Pendapatan Daerah	-0.723502	-4.701457	0.0000	-
Belanja Daerah	1.069054	3.572556	0.0005	-
R-squared	0.923237	F-statistic	45.98584	
Adjusted R-squared	0.903160	Prob(F-statistic)	0.000000	

\*sumber: data diolah

### 4.3 Pembahasan

#### a. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Opini Audit

Temuan audit terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai *t*-statistik yaitu dibawah 5% dengan nilai koefisien -0,258386, hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesisi diterima dan menyatakan temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar dan Rudiansyah (2019), Widodo dan Sudarno (2017) yang menyatakan bahwa Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Opini Audit BPK. Sehingga penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya. Namun berbeda dengan Oktafan (2017) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap opini audit. Karena penelitian ini meneliti pada tingkat provinsi dimana hal ini dapat di buktikan, yaitu temuan audit berpengaruh terhadap opini audit.

Hal ini membuktikan semakin banyaknya temuan audit, artinya pelanggaran yang dilakukan semakin banyak, serta SOP (standar operasional prosedur) yang tidak terpenuhi dimana ini dapat menyebabkan kerugian Negara dalam hal potensi kekurangan penerimaan

Negara. maka hal ini menunjukkan penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar. Dengan penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai standar maka auditor akan memberikan opini yang kurang baik terhadap laporan keuangan tersebut. Sehingga semakin banyak temuan audit yang didapatkan oleh auditor maka tingkat kewajaran laporan keuangan akan semakin berkurang sehingga opini yang akan diberikan juga akan semakin kecil.

#### **b. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit**

Tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai t-statistik dibawah 5% dengan nilai koefisien 0,350815 hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima dan menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Sari dkk (2015) dan Agusti (2014), yang menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini. Sehingga penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian milik Pratiwi dan Ayani (2016) yang menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap opini audit. Karena penelitian ini meneliti pada tingkat provinsi dimana hal ini dapat dibuktikan, yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini audit.

Hal ini membuktikan semakin banyak rekomendasi yang sudah dikerjakan berarti perbaikan atas kesalahan-kesalahan sudah dilakukan, kesalahan yang sebelumnya sering terjadi dapat di hentikan dan penyusunan laporan keuangan dianggap sudah mulai mengikuti standar. Sehingga apabila sudah mengikuti standar, maka laporan keuangan yang disiapkan sudah bebas dari salah saji yang material dan opini yang diberikan oleh auditor adalah opini yang baik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit pada pemerintah provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2014-2018. Data yang digunakan adalah data yang bersal dari IHPS dan LKPD yang terdapat dari BPK RI. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan data panel, uji t, uji F, koefisien determinasi ( $Adj R^2$ ), dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Hipotesis pertama diterima yaitu, Temuan Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit di 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan, bahwa semakin banyak temuan yang berupa ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan Undang-Undang yang di dapatkan oleh auditor BPK, maka penyusunan laporan keuangan tersebut semakin tidak baik sehingga tingkat pemberian opini yang diberikan oleh auditor akan semakin kecil.

b. Hipotesis kedua diterima yaitu, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit di 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak rekomendasi yang sudah di kerjakan, maka perbaikan atas kesalahan-kesalahan sebelumnya sudah dilakukan dan tidak terulang kembali, sehingga semakin banyak rekomendasi yang telah dikerjakan oleh pemerintah maka semakin baik pula opini yang akan di berikan oleh auditor.

## 5.2 Saran

a. Untuk auditor BPK, dalam memberikan opini BPK harus memeriksa kembali apakah temuan audit dan juga rekomendasi yang sudah di berikan, apakah sudah dikerjakan oleh pemprov. Bahwa temua audit memang bersifat merugikan Negara. sehingga laporan keuangan yang disusun kurang baik. Maka dari itu auditor harus memiliki keahlian dalam mengaudit sehingga dapat menemukan temuan serta dapat memberikan rekomendasi yang tepat agar nantinya opini tersebut dapat merefleksikan kinerja sehingga dapat membangun pemda tersebut menjadi lebih baik.

b. Untuk Pemerintah Provinsi, dalam temuan audit harus menjadi sebuah isu, sehingga hal tersebut dapat merefleksikan sistem pengendalian yang buruk dan juga kesalahan dalam undang-undang. Sehingga akan lebih baik meminimalisir jumlah terjadinya temuan yang ada. Sehingga akan lebih baik apabila pemda mengetahui internal control yang baik serta standar undang-undang yang berlaku, agar penerimaan Negara akan lebih baik. Maka akan lebih baik apabila rekomendasi yang diberikan oleh auditor dapat segera dilaksanakan agar dapat mencegah terjadinya kebocoran keuangan Negara.

c. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk tidak hanya melihat dari opini yang diberikan oleh auditor, karena opini yang diberikan hanya terpaku terhadap laporan keuangan. Sehingga akan menjadi lebih baik apabila kinerja pemda tidak hanya dari sisi pembuatan laporan keuangan akan tetapi juga dapat dilihat dari sisi non keuangan. Human Development Index, tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfiyadi, T. (2010). Analisis hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik (electronic procurement) pada instansi pemerintah. *Tesis*. Program Magister hukum. Universitas Indonesia.
- Agusti, Yola, dan Wirna. (2014). *Pengaruh provitabilitas leverage, corporate governance terhadap tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi* : Volume. 2 No. 3.
- Amyulianthy, R., Khair, J., & Lysandra, S. (2016). Characteristics and Political Connection To Local Government Performance. *Jurnal Aset*, 8(2), 1–17.
- Azhar, K., & Setyaningrum, D. (2015). *Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Korupsi Kementerian / Lembaga di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2014 -2018. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* Edisi ke-8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EvIEWS 8*. Edisi Pertama. Penerbit: Universitas Diponegoro.
- Jensen, M, C, dan W. Meckling. (1976). *Theori of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. *Journal of finance economic* 3:305-360.
- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane (2008), *Manajemen Pemasaran* Edisi 12, PT. Indeks.
- Maabut, S, J, Morasa, J, dan Saerang, D, P, E. (2016). *Pengaruh kelemahan sistem Pengendalian internal, ketidakpatuhan pada peraturan Perundang-undangan dan*

- penyelesaian kerugian negara Terhadap opini bpk-ri atas laporan keuangan Pemerintah daerah di indonesia.* Jurnal Accountability : Volume. 5. No 2.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan*, 1–26.
- Mulyani (2017) Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmentalrevenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. *skripsi*, Program Pascasarjana universitas muhammadiyah purwokerto.
- Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Seminar Nasional Akuntansi XV*.
- Muwarto, Rahmadi., Budiarmo, Adi., dan Ramadhana, Fajar Hasri. (Tanpa Tahun). Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LEKPAP - BPPK (Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah – Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan) Departemen Keuangan RI.
- Oktafan, M, S. (2017). Analisis pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas opini BPK. *Skripsi*. Program Pascasarjana. Universitas Lampung.
- Parwanto, E. (2016). *Pengaruh hasil pemeriksaan bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah)*. Diponegoro journal of accounting : Volume. 6, Nomor 1, halaman 1-9 ISSN (online) 2337-3806.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Pratiwi, R dan Aryani, A, Y. (2016). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, kepala daerah, tindak lanjut temuan audit terhadap opini audit.* Jurnal Akuntansi : Volume. XX, No. 02, hal 167-189.
- Rustiyaningsih, S., & Immanuela, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. *Widya Warta*, XXXVIII(02), 190–202.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Administrasi Bisnis*, 4(1), 14-33 (ISSN : 0216-1249).
- Sari, P, A, Martini, D, dan Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Siregar, M, I dan Rudiansyah, J. (2019). *Pengaruh jumlah temuan audit terhadap opini audit kabupaten/kota se-sesumatera.* Jurnal Ecoment Global : Volume 4 No 1, ISSN : 2540-816x.
- Supriyanti, N. (2018). Pengaruh kinerja perusahaan, corporate, government, dan karakteristik eksekutif terhadap kompensasi eksekutif. *Skripsi*. Program Pacasarjan Universitas Muhammadiyah Purwakerto.

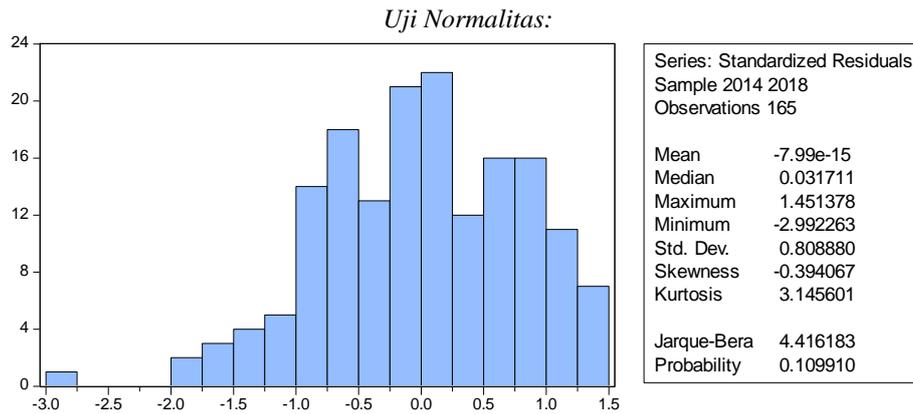
- Tresnasari, N. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat). Bandung : Universitas Paundan.
- Tresnawati, F, dan Apandi R,N,N. (2016). *Pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebagai variabel moderating (studi empiris pada kementerian/lembaga republik indonesia)*. Jurnal Aset (akuntansi riset). Volume 8 No. 1 ISSN : 2541-0342.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wati, L, N. (tahun). Metodologi Penelitian Terapan. Edisi kedua. Jakarta : Pustaka Amri.
- Wardhani, R., Rossieta, H., Martani, D., & Djamaluddin, S. (2017). The Role of Good Governance in Public Sector in Increasing the Government Expenditure Efficiency and Performance of Local Government: The Case of Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77 – 102.
- Widodo, P, O dan Sudarno. (2017). *Pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah*. Diponegoro journal of accounting : Volume. 6, Nomor 1, halaman 1-9 ISSN (online) 2337-3806.
- Zahara, W, F dan Maslicahah Hj. (2017). *Pengaruh pemeriksaan interim, lingkup audit dan Independensi terhadap pertimbangan opini auditor (studi kasus pada bpk ri perwakilan provinsi jawa timur)*. E Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi : Volume. 06 No. 17, ISSN : 2302-7061.

## LAMPIRAN

### 1. Daftar Sampel Nama Provinsi

No.	Provinsi	No.	Provinsi
1	Aceh	18	NTT
2.	Sumatera Utara	19	Kalimantan Barat
3	Sumatera Barat	20	Kalimantan Tengah
4	Riau	21	Kalimantan Selatan
5	Jambi	22	Kalimantan Timur
6	Sumatera Selatan	23	Kalimantan Utara
7	Bengkulu	24	Sulawesi Utara
8	Lampung	25	Sulawesi Tengah
9	Bangka Belitung	26	Sulawesi Selatan
10	Kepulauan Riau	27	Sulawesi Tenggara
11	Jawa Barat	28	Gorontalo
12	Jawa Tengah	29	Sulawesi Barat
13	Di Yogyakarta	30	Maluku
14	Jawa Timur	31	Maluku Utara
15	Banten	32	Papua
16	Bali	33	Papua Barat
17	NTB		

### 2. Uji Asumsi Klasik Sumber : hasil olah data Eviews 9.0

*Uji Multikolinearitas:*

Variabel	Temuan Audit	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Ukuran Pemda	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
Temuan Audit	1.000000	0.048079	0.352718	0.140569	0.343137
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0.048079	1.000000	0.058013	0.145223	0.045374
Ukuran Pemda	0.352718	0.058013	1.000000	0.790363	0.852983
Pendapatan Daerah	0.140569	0.145223	0.790363	1.000000	0.850429
Belanja Daerah	0.343137	0.045374	0.852983	0.850429	1.000000

*Uji Heterokedastisitas: dengan Uji Glejser*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.178895	2.103965	1.510907	0.1328
Temuan Audit	-0.273683	0.038641	-7.082754	0.1896
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0.040994	0.129993	0.315352	0.7529
Ukuran Pemda	0.208617	0.109360	1.907614	0.0582
Pendapatan Daerah	-0.009329	0.082085	-0.113650	0.9097
Belanja Daerah	-0.068258	0.153105	-0.445823	0.6563

### 3. Pengujian pemilihan Model

- a. Uji Chow :  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dan model yang dipilih adalah *fixed effect*.

$H_0$  = Model *Common Effect*

$H_1$  = Model *Fixed Effect*

Kriteria penolakan :  $H_0$  ditolak jika nilai probabilitas  $F < \alpha$  (5%)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.057401	(32,127)	0.0000
Cross-section Chi-square	11.201901	32	0.0000

- b. Uji Haussman:  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dan model yang dipilih adalah *fixed effect*.

$H_0$  = Model mengikuti *Random Effect*

$H_1$  = Model mengikuti *Fixed Effect*

Kriteria penolakan :  $H_0$  ditolak jika nilai probabilitas  $< \alpha$  (5%)

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.982204	5	0.0000

## PENGARUH TRANSAKSI BERELASI TERINDIKASI *TUNNELING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK BUMN INDONESIA

<sup>1</sup>Siti Arifah, <sup>2</sup> Agung Nur Probohudono

<sup>1</sup> sitiarifah@untidar.ac.id

<sup>2</sup> mustdownnow@gmail.com

<sup>1</sup>Universitas Tidar, <sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transaksi terindikasi tunneling terhadap profitabilitas Bank BUMN. Indikasi tunneling dilihat dari transaksi berelasi berupa piutang berelasi dan utang berelasi. Data yang diolah berupa data transaksi dari laporan keuangan (annual report) Bank BUMN sebanyak 4 Bank dengan periode pengamatan selama 9 tahun yaitu dari tahun 2010-2018. Data diperoleh melalui website Kementerian BUMN maupun website Bank BUMN secara langsung. Analisis statistik yang digunakan yaitu model regresi untuk menentukan pengaruh transaksi berelasi terhadap profitabilitas dengan menggunakan aplikasi eviews9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial piutang berelasi berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank BUMN, sedangkan utang berelasi tidak berpengaruh. Namun secara simultan terdapat pengaruh atas transaksi berelasi terhadap profitabilitas Bank BUMN. Hal demikian mengindikasikan bahwa pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BUMN hendaknya membuat regulasi terkait transaksi berelasi agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan. Banyak penelitian telah dilakukan mengenai transaksi berelasi, tunneling dan kinerja perusahaan yang pada umumnya menggunakan perusahaan privat sebagai obyek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan obyek Bank BUMN. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi terkait transaksi berelasi di BUMN.

Keywords: transaksi berelasi, tunneling, profitabilitas, Bank BUMN

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the effect of tunneling indicated transactions on the profitability of SOEs banks. Tunneling indication can be seen from the related transactions in the form of related receivables and related debt. The data processed in the form of transaction data from the annual report of the SOEs Bank as many as 4 banks with a observation period for 9 years, from 2010-2018. Data obtained through the website of the Ministry of SOEs and the website of the SOEs Bank directly. The statistical analysis used is a regression model to determine the effect of related transactions on profitability using the eviews 9 application. The results of this study indicate that in the partial receivable from related impact significantly on the profitability of state-owned banks, while the related debt has no effect. But simultaneously there is an influence on transactions related to the profitability of SOEs banks. This indicates that the government as the largest shareholder of SOEs should make regulations related to related transactions so that there are no injured parties. Much research has been done regarding related transactions, tunneling and company performance which generally uses private companies as research objects, while in this study the authors use the SOE Bank object. Furthermore, the results of this study are expected to provide a picture of consideration for the government at preparing regulations related to related transactions in SOEs.*

Keywords: related transactions, tunneling, profitability, BUMN banks

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Sebagaimana dituliskan di CNNIndonesia bahwa Bank Dunia menilai penugasan proyek infrastruktur dari pemerintah mendorong BUMN mencari dana, dikarenakan penugasan yang tidak disertai dengan kepastian sumber pendanaan. Pernyataan demikian termuat dalam laporan Bank Dunia (Juni 2018) yang berjudul *Infrastructure Sector Assesment Program*. Bank Dunia mencontohkan proyek tol Trans-Sumatera yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk, mengakibatkan HK menerbitkan obligasi korporasi demi mendanai proyek tersebut dengan jaminan pemerintah. HK mengerjakan 24 ruas tol Trans Sumatera dengan panjang mencapai 2.700 km, namun dana yang dimiliki tidak cukup untuk merampungkan proyek tersebut, sehingga proyek berpotensi risiko yang tinggi.

Untuk menjalankan penugasan pemerintah memang memberikan keistimewaan kepada BUMN dalam beberapa bentuk diantaranya pemberian suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), dan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank BUMN dengan suku bunga rendah tanpa uji kelayakan yang jelas. Masalah selanjutnya yang muncul adalah bahwa BUMN yang menjalankan penugasan dan membiayai pembangunan infrastruktur dengan dana operasional terbatas harus mencari pinjaman. Bank Dunia mencatat pada September 2017 bahwa tingkat utang 7 BUMN infrastruktur yang ditugaskan pemerintah mencapai Rp 200 triliun, naik tiga kali lipat dari tiga tahun sebelumnya yakni sebelum mendapatkan penugasan. Bahkan laba BUMN sempat turun dari 22% dari PDB pada 2013 menjadi 15% pada 2016. Sementara di periode yang sama, aset BUMN naik 185,48% dari Rp 2.266 triliun menjadi Rp 6.469 triliun. Penurunan laba BUMN tersebut terlihat juga dari kontribusi dividen ke pemerintah. Pada 2016, kontribusi dividen BUMN ke pemerintah tercatat Rp200 triliun, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 213 triliun.

Keberadaan BUMN penting baik bagi sumber penerimaan negara maupun sebagai penyedia barang dan jasa bagi masyarakat luas. Dengan pengelolaan BUMN yang baik diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan negara dan perekonomian nasional. Dalam hal ini keberadaan dan fungsi BUMN selaras dengan teori institusional, sebagaimana penelitian (Juliarto et al., 2013), (Musacchio et al., 2015), (J. Bai & Lian, 2013), dan (Shan, 2013). Adanya pengaruh lingkungan baik dari perusahaan publik sejenis, maupun tuntutan dari pemerintah/negara, sangat mempengaruhi BUMN dalam menjalankan kegiatan operasional berikut target-target kinerja yang harus terpenuhi.

Di sisi lain Ketua KPK menilai kinerja pengawas internal di BUMN masih lemah. Hal demikian disampaikan pada seminar nasional di kampus Unhas Makassar pada Maret 2019. Sejumlah masalah yang menyebabkan kinerja pengawas internal lemah yakni: biasanya orang yang ditempatkan di pengawas internal seadanya atau orang buangan, tidak dilengkapi dengan resources yang memadai, tidak disediakan anggarannya dengan baik, dan tidak dipatuhinya sertifikasi (kemampuan) yang mestinya dilakukan. Sementara ini peran pengawas internal di BUMN tidak maksimal karena berada di bawah bayang-bayang direktur utama. Kondisi beberapa BUMN dewasa ini agak memprihatinkan, seperti Pertamina yang mengalami penurunan laba, PLN rugi, dan Garuda rugi juga. Pemerintahan menghadapi persoalan besar di BUMN. Pertamina menanggung penugasan menjual BBM premium di bawah harga keekonomian, sehingga menanggung selisih harga, dan PLN terbebani dengan menjual tarif listrik, sehingga terdapat kerugian yang ditanggung oleh BUMN.

Masalah yang timbul di BUMN memungkinkan munculnya perilaku *tunneling* yang berdasar hasil beberapa penelitian cukup banyak terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. *Tunneling* merupakan tindakan yang dilakukan oleh *controlling interest*/ pemegang saham mayoritas untuk mengambil alih hak yang seharusnya didapat oleh *non-controlling interest*/pemegang saham minoritas. Penelitian (Cheung et al., 2006; Atanasov et al., 2014) membagi perilaku *tunneling* yang terdiri atas *tunneling kas* (Bertrand et al., 2002; Juang et al., 2010; Cho et al., 2018), *tunneling asset* (Bae et al., 2002; Shan et al., 2013), dan *tunneling ekuitas* (Baek et al., 2006; Xu'nan et al., 2011; Peng et al., 2011; Larrain & Urzua 2012). *Tunneling* didukung oleh lemahnya hukum yang melindungi para pemegang saham minoritas dan tata kelola perusahaan yang memang tidak ideal sebagaimana banyak terdapat di negara berkembang (Friedman et al., 2003).

Transaksi yang timbul dari suatu hubungan dengan pihak yang berelasi dapat berpengaruh terhadap perolehan laba rugi maupun posisi keuangan suatu usaha. Kesepakatan dalam bertransaksi antara pihak-pihak yang berelasi adakalanya tidak dapat dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Sebagai contoh transaksi penjualan kepada entitas induknya pada harga perolehan, yang hal demikian tidak dilakukan kepada entitas lainnya. Juga kuantitas

transaksi yang dilakukan antar pihak-pihak yang berelasi mungkin tidak dilakukan dalam jumlah yang sama dengan pihak-pihak lain yang tidak berelasi. Keberadaan atau posisi sebagai relasipun, dalam hal ini baik relasi sejajar maupun relasi induk-anak, dapat mempengaruhi transaksi-transaksi yang dilakukan kepada pihak lain yang tidak berelasi. Dengan demikian laba rugi dan posisi keuangan entitas dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak berelasi (Munir & Gul 2010; Sari, 2012).

Konsep '*separation of ownership and control*' dalam perusahaan dipopulerkan sebagai titik awal berkembangnya dunia korporasi modern membawa konsekuensi terciptanya konflik agensi (Jensen & Meckling, 1976). Konsep tersebut menimbulkan konflik antara pemegang saham selaku pemilik perusahaan dan manajemen selaku pengendali yang bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan sehari-hari, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Pemegang saham lebih berorientasi kepada *long-term value creation* (melalui peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang), sedangkan manajemen lebih berorientasi pada *short-term horizon* sesuai dengan masa kontrak selaku manajemen. Bentuk konflik bisa berupa penetapan kompensasi (bonus) dan pemakaian fasilitas perusahaan yang berlebihan oleh manajemen, maupun bentuk manfaat lainnya yang menguntungkan manajemen yang dibebankan ke perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Cina dimanipulasi secara material (C.-W. Chen & Wu, 2010), (C.-E. Bai et al., 2004), (K. Wang & Xiao, 2011). Kerangka teori mengapa perilaku manajerial tergantung pada struktur kepemilikan. Perusahaan milik negara (Jensen & Meckling, 1976) dicirikan memiliki kinerja keuangan yang lebih buruk daripada perusahaan yang bukan milik negara. Penelitian mengenai hubungan RPT dengan kinerja maupun nilai perusahaan juga pernah dilakukan (H.-D. Wang, Cho, & Lin, 2019), (Fooladi & Farhadi, 2019), dan (Chang & Hong, 2000).

Konflik antara pemegang saham dan manajemen inilah yang sering disebut 'Tipe 1 Konflik agensi'. Asumsi yang mendasari tipe 1 konflik agensi adalah kepemilikan saham yang menyebar dimana pemegang saham jumlahnya banyak dan tersebar namun secara individual tidak ada yang terlalu signifikan. Dengan demikian para pemegang saham yang banyak dan tersebar tersebut harus secara bersama mendelegasikan hak pengendalian mereka atas perusahaan kepada manajemen yang mempunyai kemampuan menjalankan perusahaan. Konsep konflik agensi ini dikembangkan dari "anglo-saxon" rezim, yaitu kondisi perusahaan-perusahaan yang umumnya ada di negara Amerika Serikat dan Inggris (Jensen & Meckling, 1976).

Terdapat banyak penelitian mengenai tunneling yang telah dilakukan dengan menggunakan perusahaan dengan kepemilikan privat sebagai obyek penelitian. Hal demikian dikarenakan keterbukaan informasi serta adanya kepentingan atas hasil penelitian beberapa pihak tertentu. Namun sejauh ini penelitian yang menggunakan BUMN sebagai obyek penelitian masih sangat terbatas. Pada penelitian ini penulis menetapkan BUMN sebagai obyek penelitian, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam hal peningkatan kinerja perusahaan BUMN dan selanjutnya dapat berimbas terhadap peningkatan perekonomian nasional.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kondisi *concentration of ownership* atau *family ownership* ini, sebagai kebalikan dari *widespread ownership*, mendorong terjadinya 'Tipe 2 Konflik agensi'. Tipe 2 konflik agensi mengacu kepada perbedaan kepentingan (konflik) antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan. Keberadaan pemegang saham pengendali yang secara dominan mengendalikan jalannya perusahaan, bisa mengurangi tipe 1 konflik agensi dikarenakan manajemen juga "dikuasai" oleh pemegang saham pengendali,

sehingga perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen adalah minimal. Namun demikian, keberadaan tipe2 konflik agensi ini berefek negatif kepada pemegang saham minoritas, yang kebanyakan adalah masyarakat umum. Secara umum, tipe 2 konflik agensi biasanya dalam bentuk pengambilan manfaat (*private benefits*) oleh pemegang saham pengendali yang merugikan kepentingan minority shareholders. Pengambilan keuntungan atau manfaat oleh controlling shareholder (expropriation) yang dibebankan pada pemegang saham minoritas sering dikenal dengan istilah 'tunneling'. Menurut (Atanasov *et al.*, 2014), tunneling dibagi kedalam 3 tipe:

- a. *Cash tunneling*, yaitu transaksi *self-dealing* dengan mengalihkan *operating cash flow* kepada pemegang saham mayoritas atau manajer atau keduanya dengan bentuk *transfer pricing*, *excessive executive compensation*, atau *other payments to insider*.
- b. *Asset tunneling*, yaitu transfer aset baik berwujud maupun tidak berwujud dari atau ke perusahaan yang meliputi *tunneling out* berupa pemindahan aset produktif dari perusahaan dengan harga lebih rendah dari *fair value* untuk keuntungan pemegang saham pengendali dan/atau manajer, atau *tunneling in* berupa transfer dengan *overpriced* aset pada perusahaan.
- c. *Equity tunneling*, yaitu peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali dengan mengorbankan pemegang saham minoritas, tetapi tidak mengubah secara langsung aset produktif perusahaan. Equity tunneling bisa berupa penawaran saham baru yang lebih murah kepada anggota keluarga ataupun membawa perusahaan terbuka kembali ke perusahaan tertutup (*delisting*). Equity tunneling memberi keuntungan bagi pemegang saham pengendali di atas beban minority shareholders yang berakibat penurunan nilai saham perusahaan.

Bukti tentang pengendalian pemegang saham melalui transaksi pihak terkait dilakukan (Cheung *et al.*, 2006) dengan menguji apakah transaksi berelasi merupakan bentuk *tunneling* atau *propping* dengan mengklasifikasikan ke dalam 7 kategori:

- 1) akuisisi aset oleh perusahaan dari pihak berelasi,
- 2) penjualan aset oleh perusahaan pada pihak berelasi,
- 3) tukar menukar aset antara perusahaan dan pemegang saham pengendali,
- 4) perdagangan barang dan jasa antara perusahaan dan pemegang saham pengendali,
- 5) pembayaran kas, pinjaman, atau jaminan pinjaman oleh perusahaan kepada pemegang saham pengendali,
- 6) pembayaran kas, pinjaman, atau jaminan pinjaman yang diberikan oleh pihak berelasi kepada perusahaan,
- 7) transfer aset ke perusahaan dari anak perusahaan yang dimiliki secara mayoritas dan tidak *go public* dimana terdapat kemungkinan merugikan pemilik saham minoritas anak perusahaan untuk kepentingan pemegang saham perusahaan.

Transaksi yang terjadi sesuai kategori 6 dan kategori 7 akan menguntungkan perusahaan, atau dikenal dengan istilah *propping*. Sedangkan pada kategori 5 dimana terdapat pembayaran kas oleh perusahaan ke pihak berelasi mempunyai kemungkinan besar sebagai *tunneling*. Sementara kategori 1-4 yaitu transfer aset atau pembelian barang dan jasa dapat merupakan *tunneling* maupun *propping*.

*Tunneling* diartikan sebagai transfer aset dan keuntungan keluar dari suatu perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas (Johnson *et al.*, 2000). *Tunneling* merupakan salah satu bentuk ekspropriasi. Terdapat dua bentuk tunneling yaitu melalui transaksi *self-dealing* dengan transfer aset atau dengan meningkatkan kepemilikan tanpa transfer aset. Transfer aset oleh pemegang saham mayoritas dapat dilakukan dengan pemindahan sumberdaya dari perusahaan untuk kepentingannya, baik berupa transaksi illegal yang mungkin tidak terdeteksi maupun penjualan aset melalui kontrak seperti *transfer pricing*, jaminan pinjaman, kompensasi berlebihan kepada eksekutif, atau ekspropriasi pada

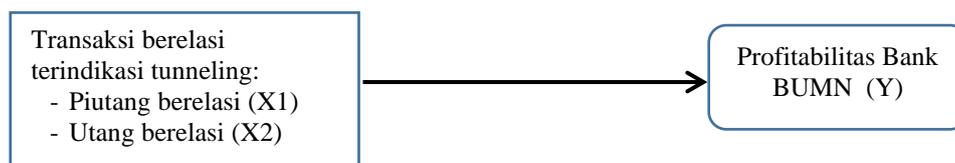
kesempatan perusahaan. Sedangkan peningkatan kepemilikan pemegang saham mayoritas tanpa transfer asset dapat dilakukan melalui *dilutive share issues, insider trading, minority freeze-outs, creeping acquisitions* atau transaksi lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas.

Terdapat 4 proposisi yang dikembangkan (Johnson *et al.*, 2000) yaitu: pertama, pengalihan korporasi sumber daya dari pemegang saham minoritas kepada pemegang saham pengendali bisa sangat besar, Kedua, banyak dari tunneling itu legal, pembuatan hukum tunneling semacam itu membutuhkan banyak variasi formulir (termasuk pengambilalihan opsi perusahaan), dan tunneling dapat berbentuk transaksi yang bertentangan dengan transaksi riil. Sebuah mekanisme tata kelola perusahaan dibangun dan langkah-langkah penilaian pasar untuk semua perusahaan publik di dua pasar saham di China dengan menggunakan data dari laporan tahunan perusahaan (Bai *et al.*, 2004; Liu & Lu, 2007). Indeks tata kelola perusahaan dibangun untuk merangkum informasi yang terkandung dalam variabel tata kelola perusahaan menggunakan delapan variabel untuk mengukur berbagai mekanisme tata kelola perusahaan. Juga memberikan panduan yang berguna bagi perusahaan untuk merancang mekanisme tata kelola perusahaan sehingga dapat meningkatkan penilaian pasar untuk menguntungkan pemegang saham dan mengurangi biaya investasi di masa depan. Tunneling cenderung dieksekusi melalui penjualan ke perusahaan afiliasi dengan hak arus kas yang lebih rendah (Cho & Lim, 2018).

Pemegang saham pengendali dapat memiliki insentif dan kemampuan untuk mengambil alih pemegang saham minoritas (Claessens *et al.*, 2002; Aharony *et al.*, 2010; Johnson *et al.*, 2000; Lin *et al.*, 2010; Bertrand *et al.*, 2002). Selanjutnya, bukti tentang pengendalian tunneling pemegang saham di Cina (Jiang *et al.*, 2010) melalui pinjaman antar-perusahaan, yang diperkirakan puluhan miliaran (RMB) selama tahun 1996 hingga 2006. Kelompok bisnis India menjadi lebih besar dan lebih beragam ketika institusi pasar berkembang.

Temuan ini bertentangan dengan prediksi dan implikasi dari semua aliran pemikiran sebelumnya tentang kelompok bisnis, termasuk yang dari (Bertrand *et al.*, 2002). Kelompok-kelompok bisnis India terus meningkat dalam intensitas investasi pihak terkait pemasaran dan teknologi ketika lembaga-lembaga pasar berkembang. Konsep kelompok bisnis sebagai perangkat pengambilalihan dan sebagai pelaku utama tata kelola yang buruk di negara-negara berkembang harus dirumuskan kembali menggunakan metodologi empiris yang lebih disempurnakan yang menggabungkan analisis kegiatan strategis di seluruh perusahaan (Siegel & Choudhury, 2012). Konflik agensi antara pemegang saham pengendali dan investor minoritas bertanggung jawab atas sebagian besar manajemen laba di perusahaan terdaftar di Tiongkok (Liu & Lu, 2007). Tunneling muncul dengan berbagai kondisi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (M. Ryngaert & Thomas, 2012; 2007; Cheung *et al.*, 2009; Lo *et al.*, 2010; Friedman *et al.*, 2003; Cheung *et al.*, 2009; Peng *et al.*, 2011). Tunneling dimungkinkan muncul dari adanya related party transaction (Juliarto *et al.*, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transaksi terindikasi tunneling terhadap profitabilitas Bank BUMN. Transaksi terindikasi tunneling dilihat dari transaksi berelasi berupa piutang berelasi dan utang berelasi, dimana kedua jenis transaksi tersebut mempunyai nilai transaksi yang cukup signifikan dibandingkan dengan nilai transaksi berelasi yang lain. Selanjutnya kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Berpikir Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: terdapat pengaruh yang signifikan transaksi berelasi terhadap profitabilitas Bank BUMN.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari annual report seluruh Bank BUMN yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 4 bank. Data diperoleh melalui laporan keuangan Bank BUMN yang dipublikasikan, pemberitaan di mass media yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta literatur terkait. Data yang diolah dalam penelitian ini menggunakan periode selama tahun 2010 – 2018 untuk semua Bank BUMN. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear. Variabel independen dimasukkan ke dalam model untuk menentukan adakah terdapat pengaruh transaksi berelasi terhadap profitabilitas Bank BUMN. Selanjutnya data diolah menggunakan aplikasi eviews-9.

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan transaksi berelasi. Transaksi berelasi di Bank BUMN berbeda dari transaksi berelasi di perusahaan milik pribadi (POE) setidaknya dalam dua cara. Pertama, transaksi berelasi di BUMN dapat mengurangi kesejahteraan sosial tidak hanya ketika mereka menyebabkan kerugian pada BUMN tertentu dengan mengekstraksi kekayaan dari investor minoritas (non-negara) tetapi juga ketika negara memberikan manfaat yang tidak tersedia kepada BUMN. Kedua, negara sebagai pemegang saham pengendali dapat mengekstraksi keuntungan pribadi politik dengan terlibat dalam apa yang disebut "penyaluran kebijakan" (Milhaupt & Pargendler, 2017; Ma *et al.*, 2013). Deteksi tunneling pada penelitian ini menggunakan dasar penelitian (Cheung *et al.*, 2006) yang menguji apakah transaksi berelasi merupakan bentuk tunneling. Transaksi berelasi Bank BUMN dilihat dari transaksi-transaksi berelasi yang dicantumkan dalam annual report yang disusun BUMN. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas Bank BUMN. Pengukuran profitabilitas pada penelitian ini merujuk kepada penelitian (Aswadi, 2011) yang menggunakan ROA sebagai ukuran profitabilitas. Tabel berikut secara ringkas menggambarkan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1  
Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Jenis Data
Variabel Dependen:		
Kinerja Bank BUMN	ROA	Rasio
Variabel Independen:		
Piutang berelasi	Jumlah/angka yang ditampilkan di Annual Report	Kontinyu
Utang berelasi	Jumlah/angka yang ditampilkan di Annual Report	Kontinyu

Selanjutnya model persamaan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X1_{it} + X2_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = ROA

X1 = Piutang berelasi

X2 = Utang berelasi

### 3.1 Analisis dan Diskusi

Industri perbankan di Indonesia ditinjau dari indikator kredit perbankan tumbuh hingga 12,9%. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan BRI mencatat pendapatan sebesar Rp77,6 triliun pada tahun 2018 lalu. Jumlah tersebut lebih banyak 6,3% dibanding tahun 2017 dengan pendapatan sebesar Rp73,01 triliun. Kenaikan laba BRI mencapai 11,6% pada tahun 2018 lalu dengan nominal sebesar Rp32,04 triliun. Setelah BRI, ada Bank Mandiri yang menduduki posisi kedua dalam jumlah pendapatan tertinggi selama tahun 2018. Pendapatan yang berhasil dihimpun oleh Bank Mandiri adalah sebesar Rp54,62 triliun. Dibanding periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2017, pendapatan Bank Mandiri tumbuh sebesar 5,07%. Sedangkan untuk labanya sendiri, Bank Mandiri berhasil menghimpun laba sebesar Rp25,02 triliun atau sekitar 21,2% dibanding tahun sebelumnya.

Pada urutan selanjutnya BNI mengikuti Bank Mandiri dengan jumlah pendapatan mencapai Rp35,45 triliun sepanjang 2018. Dibanding periode sebelumnya BNI menghimpun pertumbuhan pendapatan sebesar 11%. Sedangkan dari segi laba, BNI tercatat mendapatkan pertumbuhan laba sebesar 10,03%. Pada periode itu, laba yang dicatatkan BNI sebesar Rp15,02 triliun. Bank BUMN lain yang juga memiliki kinerja positif adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Bank ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan tipis sebesar 3,65% dengan jumlah pendapatan sebesar Rp11,9 triliun. Pertumbuhan pendapatan itu juga diikuti dengan jumlah laba BTN yakni sebesar Rp3,20 triliun. Jumlah laba itu naik sebesar 5,96% dibanding dengan tahun 2017 dimana laba yang diperoleh sebesar Rp 3 triliun.

Secara keseluruhan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan dengan jangka waktu 9 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Selanjutnya data diolah dengan analisis regresi menggunakan aplikasi eviews-9. Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2  
Hasil Analisis Data

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.019577	0.232870	8.672560	0.0000
X1	4.93E-09	1.67E-09	2.945936	0.0059
X2	-6.77E-09	4.25E-09	-1.594669	0.1203
R-squared	0.219613	Mean dependent var		2.068744
Adjusted R-squared	0.172317	S.D. dependent var		0.713935
S.E. of regression	0.649517	Akaike info criterion		2.054481
Sum squared resid	13.92180	Schwarz criterion		2.186440
Log likelihood	-33.98065	Hannan-Quinn criter.		2.100538
F-statistic	4.643354	Durbin-Watson stat		0.250287
Prob(F-statistic)	0.016715			

Sumber: data diolah.

Tabel di atas menunjukkan angka probability X1 sebesar 0,0059 yang berarti bahwa piutang berelasi berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank BUMN karena hasil analisis menunjukkan angka di bawah 0,05. Sedangkan utang berelasi dengan hasil analisis sebesar 0,1203 menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas Bank BUMN. Angka Prob(F-statistic) sebesar 0,0167 menunjukkan bahwa secara simultan piutang berelasi dan utang berelasi berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank BUMN.

R-squared menunjukkan angka sebesar 0,2196 yang berarti bahwa transaksi berelasi yang diwakili dari akun piutang dan utang berelasi hanya mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 22% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar piutang berelasi dan

utang berelasi. Hal demikian dikarenakan dalam penelitian ini hanya transaksi piutang dan utang berelasi yang diteliti, sedangkan profitabilitas sangat terkait dengan kegiatan operasional bank yang tidak hanya dari transaksi berelasi.

Kredit macet menjadi beban berat Bank BUMN ini. Sementara di sisi lain, bank BUMN juga harus terdepan dalam memberikan fasilitas pinjaman termasuk kepada perusahaan sesama milik pemerintah. Utang perusahaan BUMN terutama sektor konstruksi dan infrastruktur di bank-bank BUMN juga menumpuk. Bank Mandiri tercatat paling besar menggelontorkan kredit secara afiliasi. Tercatat, Bank Mandiri menjadi kreditor terbesar bagi KRAS dengan kredit jangka pendek senilai US\$225 juta atau Rp3,17 triliun dan Rp830 miliar. Bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) menyetujui proposal restrukturisasi utang KRAS. Utang KRAS sepanjang 2018 yang tercatat US\$2,49 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan 10,45% dibandingkan 2017 sebesar US\$2,26 miliar. Utang jangka pendek yang dimiliki KRAS lebih besar dibandingkan utang jangka panjang. Utang jangka pendek KRAS senilai US\$1,59 miliar, naik 17,38% dibandingkan 2017 senilai US\$1,36 miliar. Sementara utang jangka panjang pabrik baja milik pemerintah ini sebesar US\$899,43 juta. Outstanding kredit Bank Mandiri ke BUMN tercatat sebesar Rp160,72 triliun pada Desember 2018. Jumlah tersebut setara 21,4% dari total kredit perseroan yakni sebesar Rp835,1 triliun.

Sementara BNI memiliki outstanding pinjaman tercatat sebesar Rp107,4 triliun pada akhir 2018. Jumlah kredit terbesar disalurkan BNI ke PLN sebesar Rp14,4 triliun akhir tahun 2018. Lalu disusul ke Perum Bulog sebesar Rp11,61 triliun, Waskita Karya Rp9,81 triliun, Telkom Rp7,28 triliun, Jasa Marga Rp7,07 triliun, Semen Gresik Rp5,29 Triliun, Krakatau Steel Rp4,7 triliun, Pegadaian Rp4,63 triliun, Petrokimia Gresik Rp3,9 Triliun, Kementerian Keuangan Rp3,69 triliun, PTPN III sebesar Rp3,04 triliun, PTPN VII Rp2,12 triliun. Kualitas kredit BNI per Juni tercatat mengalami perbaikan di mana rasio kredit bermasalah (NPL) turun menjadi 1,8% dari 1,9% semester I 2018. Kredit bermasalah paling tinggi ada di segmen medium yang meningkat dari 2,5% jadi 3,7%. Sedangkan NPL segmen korporasi turun dari 1,6% jadi 1,1%. Bank BRI memiliki outstanding kredit kepada BUMN ke afiliasinya masih besar dengan jumlah modal inti perseroan mencapai Rp190 triliun.

Di sisi lain jumlah utang para perusahaan BUMN mencapai Rp5.271 triliun per September 2018. Dari total utang itu, sumbangan terbesar diberikan oleh tiga bank BUMN, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Berdasarkan data Kementerian BUMN, BRI menyumbang utang sebesar Rp1.008 triliun. Sementara itu, utang Bank Mandiri sebesar Rp997 triliun dan BNI Rp660 triliun. Bank BTN memiliki utang Rp249 triliun atau berada di peringkat ke-6 sebagai BUMN yang menyumbang utang terbesar. Hal demikian menjadi beban berat bagi bank BUMN dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Sementara dalam internal Bank BUMN sendiri terdapat kemungkinan modus penyimpangan yang terjadi saat ini. Modus pertama yakni pemberian kredit yang berkelanjutan oleh bank BUMN kepada proyek yang gagal. Namun, pembayaran cicilan serta bunganya dilakukan oleh perusahaan induk di luar negeri seperti di Singapura. Dalam kasus ini, kredit diperlakukan sebagai kredit lancar, meski proyeknya gagal dan tak menghasilkan laba. Modus kedua, pembayaran kredit untuk proyek yang dikerjakan suatu perusahaan macet. Kemudian, perusahaan yang sama mengajukan kembali kredit untuk proyek lain guna membiayai proyek sebelumnya. Terkadang, orang di balik perusahaan tersebut merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ketiga, kredit dari bank BUMN digunakan untuk membangun gedung perkantoran milik seorang menteri. Gedung itu tak laku dijual, kemudian BUMN lain diminta untuk merenovasi dan menyewanya selama lima tahun. Modus keempat yakni kredit dipecah dalam jumlah yang kecil dengan berbagai nama. Hal ini dilakukan agar tak perlu izin dari komisaris dan tidak mencapai batas maksimum pemberian kredit. Modus terakhir, bank BUMN diminta

menyelamatkan bank swasta yang terkena masalah hingga bangkrut. Jadi ibarat ada satu bank swasta yang sakit berat, namun seluruh bank BUMN yang tanggung-jawab.

Terdapat berbagai hal yang harus dicermati oleh pemerintah agar Bank BUMN dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal. Di samping sebagai alat bagi negara dalam menjalankan roda pemerintahan yang terkait dengan organisasi, badan, dan lembaga lain, serta sebagai pihak yang melayani masyarakat termasuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan berbagai beban berat yang harus dilaksanakan oleh Bank BUMN, pemerintah harus mengambil kebijakan agar fungsi Bank BUMN dapat terlaksana dengan lebih baik, baik dari sisi piutang BUMN maupun utang BUMN.

#### 4. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi berelasi terindikasi tunneling yang berupa piutang berelasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank BUMN, sedangkan utang berelasi tidak berpengaruh. Namun secara simultan terdapat pengaruh atas transaksi berelasi terhadap profitabilitas Bank BUMN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan baik bagi Bank BUMN maupun pemerintah sebagai pemegang saham terbesar Bank BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja Bank BUMN serta memperbesar manfaat Bank BUMN bagi negara dan masyarakat.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya menggunakan piutang berelasi dan utang berelasi sebagai variabel dari transaksi yang terindikasi tunneling, dan belum benar-benar mengukur apakah dari transaksi-transaksi tersebut mengandung muatan tunneling. Penelitian ke depan memungkinkan untuk lebih memperdalam dengan melibatkan transaksi-transaksi berelasi yang lain, maupun menambah obyek penelitian, tidak hanya Bank BUMN namun juga BUMN-BUMN yang bergerak di bidang yang lain, serta menentukan apakah benar-benar terdapat tunneling dalam transaksi-transaksi berelasi tersebut. Dengan demikian regulasi yang ditetapkan pemerintah dapat diarahkan kepada pengendalian terhadap transaksi berelasi agar terhindar dari tunneling.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aharony, J., Wang, J., & Yuan, H. (2010). Tunneling as an incentive for earnings management during the IPO process in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29(1), 1-26.
- Atanasov, V., Black, B., & Ciccotello, C. S. (2014). Unbundling and measuring tunneling. *U. Ill. L. Rev.*, 1697.
- Bai, C.-E., Liu, Q., Lu, J., Song, F. M., & Zhang, J. (2004). Corporate governance and market valuation in China. *Journal of Comparative Economics*, 32(4), 599-616.
- Bertrand, M., Mehta, P., & Mullainathan, S. (2002). Ferreting out tunneling: An application to Indian business groups. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 121-148.
- Chang, S. J., & Hong, J. (2000). Economic performance of group-affiliated companies in Korea: Intragroup resource sharing and internal business transactions. *Academy of Management Journal*, 43(3), 429-448.
- Chen, C.-W., & Wu, C. (2010). *Related party transactions and ownership concentration: theory and evidence*. Paper presented at the E-Leader Conference Singapore.
- Cheung, Y.-L., Jing, L., Lu, T., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2009). Tunneling and propping up: An analysis of related party transactions by Chinese listed companies. *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(3), 372-393.

- Cheung, Y.-L., Qi, Y., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2009). Buy high, sell low: How listed firms price asset transfers in related party transactions. *Journal of Banking & Finance*, 33(5), 914-924.
- Cheung, Y.-L., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2006). Tunneling, propping, and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong. *Journal of Financial Economics*, 82(2), 343-386.
- Cho, S., & Lim, K. M. (2018). Tunneling by Related-party Transactions: Evidence from Korean Conglomerates. *Asian Economic Journal*, 32(2), 147-164.
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P., & Lang, L. H. (2002). Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. *The journal of finance*, 57(6), 2741-2771.
- Fooladi, M., & Farhadi, M. (2019). Corporate governance and detrimental related party transactions: Evidence from Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 196-227.
- Friedman, E., Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Propping and tunneling. *Journal of Comparative Economics*, 31(4), 732-750.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Jiang, G., Lee, C. M., & Yue, H. (2010). Tunneling through intercorporate loans: The China experience. *Journal of Financial Economics*, 98(1), 1-20.
- Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. *American economic review*, 90(2), 22-27.
- Juliarto, A., Tower, G., Van der Zahn, M., & Rusmin, R. (2013). Managerial ownership influencing tunnelling behaviour. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 7(2), 25-46.
- Lin, Y.-H., Chiou, J.-R., & Chen, Y.-R. (2010). Ownership structure and dividend preference: Evidence from China's privatized state-owned enterprises. *Emerging Markets Finance and Trade*, 46(1), 56-74.
- Liu, Q., & Lu, Z. J. (2007). Corporate governance and earnings management in the Chinese listed companies: A tunneling perspective. *Journal of Corporate Finance*, 13(5), 881-906.
- Lo, A. W., Wong, R. M., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1-26.
- Ma, L., Ma, S., & Tian, G. (2013). Political connections, founder-managers, and their impact on tunneling in China's listed firms. *Pacific-Basin Finance Journal*, 24, 312-339.
- Milhaupt, C. J., & Pargendler, M. (2017). Governance Challenges of Listed State-Owned Enterprises Around the World: National Experiences and a Framework for Reform. *Cornell Int'l LJ*, 50, 473.
- Peng, W. Q., Wei, K. J., & Yang, Z. (2011). Tunneling or propping: Evidence from connected transactions in China. *Journal of Corporate Finance*, 17(2), 306-325.
- Ryngaert, M., & Thomas, S. (2012). Not all related party transactions (RPTs) are the same: Ex ante versus ex post RPTs. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 845-882.
- Ryngaert, M. D., & Thomas, S. (2007). Related party transactions: Their origins and wealth effects. Available at SSRN 970689.
- Siegel, J., & Choudhury, P. (2012). A reexamination of tunneling and business groups: New data and new methods. *The Review of Financial Studies*, 25(6), 1763-1798.
- Wang, H.-D., Cho, C.-C., & Lin, C.-J. (2019). Related party transactions, business relatedness, and firm performance. *Journal of Business Research*, 101, 411-425.
- Wang, K., & Xiao, X. (2011). Controlling shareholders' tunneling and executive compensation: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 89-100.

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan <KP2KP> Bumiayu Brebes)

<sup>1</sup>Isqi Mubarokah, <sup>2</sup>Yeni Priatnasari, <sup>3</sup>Krisdiyawati  
<sup>3</sup> isqiem1908@gmail.com

Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

### Abstrak

Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang berperilaku tidak patuh. Sikap ketidakpatuhan yang dipengaruhi oleh banyak faktor dapat merugikan beberapa pihak seperti petugas pajak dan wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang dioperasikan melalui SPSS 22 pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,161 dengan  $t_{tabel}$  1,985, dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Norma subjektif secara parsial mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,616 dengan  $t_{tabel}$  1,985, dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Kewajiban moral tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,892 dengan  $t_{tabel}$  1,985, dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$ . Sanksi perpajakan secara parsial mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,213 dengan  $t_{tabel}$  1,985, dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Hasil uji F menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai  $f_{hitung}$  sebesar 46,235 dengan  $f_{tabel}$  2,47, dengan demikian  $f_{hitung} > f_{tabel}$ . Jadi dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

**Kata kunci** : *pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, sanksi perpajakan, ketidakpatuhan wajib pajak.*

### Abstract

*Tax compliance is the attitude of taxpayers in accordance with tax regulations, but in reality there are still many taxpayers who behave in non-compliance. The attitude of non-compliance which is influenced by many factors can be detrimental to some parties such as tax officers and the taxpayer itself. This study aimed to determine what factors influence non-compliance of taxpayers. Data collection was done using a questionnaire and literature study. Data were analyzed using multiple linear regression analysis which was operated through SPSS 22 at the 5 percent significance level. The results showed that knowledge of taxation significantly affected the non-compliance of taxpayers with a value of  $t_{count}$  of 6.161 with  $t_{table}$  1.985, thus  $t_{count} > t_{table}$ . Subjective norms significantly affected non-compliance of taxpayers with a value of  $t_{count}$  of 2.616 with  $t_{table}$  1.985, thus  $t_{count} > t_{table}$ . Moral obligations do not significantly influenced the non-compliance of taxpayers with a  $t_{count}$  of 0.892 with  $t_{table}$  1.985, thus  $t_{count} < t_{table}$ . Tax penalties significantly affected non-compliance with taxpayers with a  $t_{count}$  of 3.213 with  $t_{table}$  1.985, thus  $t_{count} > t_{table}$ . The results of the F test showed that knowledge of taxation, subjective norms, moral obligations, and taxation sanctions simultaneously affected the non-compliance of taxpayers, this can be seen from the calculated value of 46,235 with  $f_{table}$  2.47, thus  $f_{count} > f_{table}$ . So you can know the factors that can affected non-compliance of taxpayers.*

**Keywords** : *taxation knowledge, subjective norms, moral obligations, tax sanctions, non-compliance with taxpayer*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak dianggap sebagai kontribusi terbesar bagi penerimaan pendapatan Indonesia. Menurut Prof. Dr. Rachmad Soemitro dalam (Pudyatmoko, 2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis penerimaan pajak yaitu Pajak Penghasilan. Penghasilan dalam PPh Pasal 21 yaitu semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Pada dasarnya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal, harus ada kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang.

Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya masyarakat sadar akan pentingnya manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara terbesar dari pajak. Wajib pajak yang sudah terdaftar harus memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam perhitungan pajak, wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, sistem yang seperti ini disebut dengan *self assesment system*. Dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yang demikian, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban yaitu membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan hal itu.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan sebagainya. Menurut (Syahputri, 2015), menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak ada empat yaitu sikap, norma subjektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hingga saat ini masih banyak sekali terjadi kebingungan terhadap penerapan pajak penghasilan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi (Harjanti & Hetika, 2020)

Sedangkan menurut (Jayanto, 2011), faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak ada tiga yaitu karakteristik individu, kondisi keuangan, dan iklim organisasi. Selain itu (Effendy & Toly, 2013) juga mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PPN ada lima yaitu kepercayaan atas kepastian hukum, persepsi wajib pajak atas sanksi pajak pertambahan nilai, kondisi ekonomi perusahaan, media massa dan politik, dan kesadaran pajak pertambahan nilai. Menurut (Hani, 2016), ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan usaha, profitabilitas, penegakan hukum, dan sanksi. Sedangkan menurut (Kaunang & Pinatik, 2016), menyimpulkan bahwa perilaku ketidakpatuhan dipengaruhi oleh faktor tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Menurut (Noerman Syah, 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPPD/SAMSAT Brebes.

Sama halnya dengan hasil penelitian terdahulu, dalam kenyataannya pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes masih banyak terdapat wajib pajak yang juga berperilaku tidak patuh. Mereka tidak membayar pajak dan melaporkan pajak yang terutang tepat waktu. Salah satu penyebabnya yaitu karena mereka tidak mengetahui dan tidak memperhatikan kewajiban yang harus dipatuhi mereka sebagai wajib pajak yang sudah terdaftar. Hal ini terbukti banyak wajib pajak yang datang selama beberapa tahun setelah mereka terdaftar dan belum memenuhi kewajibannya dari awal. Atas dasar inilah peneliti ingin lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes.

## 2. TINJAUAN PERPUSTAKAAN

### 2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rachmad Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. PJA Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah (Pudyatmoko, 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pangestu, 2017)<sup>[7]</sup>.

Dari berbagai uraian tentang definisi pajak, dapat disimpulkan bahwa suatu pungutan dapat disebut pajak jika:

- a. Dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Pembayaran pajak tidak mendapat prestasi kembali secara langsung.
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

#### 2.1.1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang utama ada dua yakni sebagai berikut Waluyo dalam (Prasasti, 2017):

- a. Fungsi Penerimaan, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Artinya penerimaan pajak merupakan salah satu modal dalam membiayai pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ketika suatu negara mengalami inflasi pemerintah dapat menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar berkurang.

#### 2.1.2. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menurut tiga jenis yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2016)<sup>[19]</sup>:

##### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

##### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo dalam (Prasasti, 2017)<sup>[8]</sup> menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sejak tahun 1983 Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* di mana wajib pajak diberi wewenang sendiri untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar. Anastasia dan Lilis dalam (Prasasti, 2017)<sup>[8]</sup> menyatakan bahwa konsekuensi dari sistem tersebut adalah setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan.

### 2.1.4 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak yang dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjeknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh (Suandy, 2011)<sup>[20]</sup>.

### 2.1.5 Subjek Pajak Penghasilan 21

Yang menjadi Subjek Pajak adalah (Mardiasmo, 2016)<sup>[19]</sup>:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

#### 4. Bentuk Usaha Tetap

### 2.2 Tinjauan Atas Faktor Pengaruh Ketidapatuhan Wajib Pajak

#### 2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pangestu, 2017)<sup>[7]</sup>.

#### 2.2.2 Pengertian Ketidapatuhan

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan ketidapatuhan merupakan padanan kata dari kepatuhan, maka dapat diartikan ketidapatuhan adalah perilaku tidak taat atau tidak patuh pada ajaran atau aturan yang berlaku. Sehingga ketidapatuhan wajib pajak adalah perilaku penolakan/penyimpangan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan (Hani, 2016)<sup>[5]</sup>.

#### 2.2.3 Indikator Ketidapatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP yang sering dilanggar oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut Suandy dalam (Kaunang & Pinatik, 2016)<sup>[6]</sup>:

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
- d. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan.
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Harahap dalam (Kaunang & Pinatik, 2016)<sup>[6]</sup> bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

#### 2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak

Penyebab Wajib Pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar, Saragih dalam (Kaunang & Pinatik, 2016)<sup>[6]</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti menyebutkan ada 4 faktor yang menyebabkan ketidapatuhan Wajib Pajak, yaitu :

- a. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku (Effendy & Toly, 2013)<sup>[4]</sup>. Menurut Nugroho dalam (Syahputri, 2015)<sup>[2]</sup>, semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan.

#### b. Norma Subjektif

Norma subjektif (*subjective norm*) didefinisikan sebagai pengaruh dari orang-orang di sekitar yang direferensikan (Ajzen 1991) dalam (Syahputri, 2015)<sup>[2]</sup>. Norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu tertentu atau grup tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu. Hasil temuan dari banyak penelitian menunjukkan bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku wajib pajak.

#### c. Kewajiban Moral

Aspek moral dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian yang dilakukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak mengaitkan moral sebagai salah satu faktor yang mempengaruhinya. Penelitian terhadap moral wajib pajak mengacu pada dasar teori *theory of moral reasoning* yang dikemukakan oleh Kohlberg. *Theory of moral reasoning* dalam konteks kepatuhan pajak menyatakan bahwa keputusan moral terutama dipengaruhi oleh perlakuan terhadap saksi pada tingkat *moral reasoning* yang rendah, *peer expectation* (pengharapan akan adanya keadilan) pada tingkat moderat, dan isu keadilan (*fairness*) pada tingkat yang tertinggi. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak. (Jayanto, 2011)<sup>[3]</sup>.

#### d. Sanksi Perpajakan

Menurut Resmi dalam (Aprilliyana, 2017)<sup>[9]</sup>, sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi perpajakan adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko) dalam (Aprilliyana, 2017)<sup>[9]</sup>. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Menurut Ilyas & Burton dalam (Aprilliyana, 2017)<sup>[9]</sup>, penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak.

### 2.3 Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu mengemukakan kemampuannya agar dapat merumuskan hipotesis dengan jelas. Jadi, hipotesis harus memiliki persyaratan dan penyusunannya (Sangadji & Sopiah, 2010)<sup>[10]</sup>.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.  
 H2 : Norma Subjektif berpengaruh secara parsial terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.  
 H3 : Kewajiban Moral berpengaruh secara parsial terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.  
 H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.  
 H5 : Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini ada 19.905 yaitu wajib pajak yang terdaftar sampai tahun 2017 pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan didasarkan pada kriteria tertentu. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* maka didapat jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan kriteria wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan minimal 1 tahun terakhir.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring) (Sugiyono, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Sangadji & Sopiah, 2010).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan kepustakaan, dan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan berbagai uji seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

### 4.1 Analisis Deskriptif Responden

Deskripsi data responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1  
Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase (%)
< 20 Tahun	11	11,0
21 - 30 Tahun	68	68,0
31 - 40 Tahun	16	16,0
41 - 50 Tahun	3	3,0
> 50 Tahun	2	2,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan jumlah usia < 20 Tahun sebanyak 11 orang, jumlah usia 21-30 Tahun sebanyak 68 orang, jumlah usia 31-40 Tahun sebanyak 16 orang, jumlah usia 41-50 Tahun sebanyak 3 orang, dan jumlah usia > 50 Tahun sebanyak 2 orang, jadi total responden sebanyak 100 orang. Persentase menunjukkan pada usia < 20 Tahun sebesar 11,0%, usia 21-30 Tahun sebesar 68,0%, usia 31-40 Tahun sebesar 16,0%, usia 41-50 Tahun sebesar 3,0% dan usia > 50 Tahun sebesar 2,0%, jadi total persentase sebesar 100,0%.

Deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.2  
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-laki	49	49,0
Perempuan	51	51,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 49 orang dan perempuan sebanyak 51 orang, jadi total responden sebanyak 100 orang. Persentase dari jenis kelamin laki-laki 49,0% dan perempuan 51,0%, jadi total persentase ada 100,0%.

Deskripsi data responden berdasarkan status pernikahan dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3  
Data Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status Pernikahan	Frekuensi	Presentase (%)
Menikah	27	27,0
Belum Menikah	73	73,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan jumlah status menikah sebanyak 27 orang (27%) dan belum menikah sebanyak 73 orang (73%), jadi total responden sebanyak 100 orang (100%).

Deskripsi data responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4  
Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
SD	2	2,0
SMA/SMK/Sederajat	87	87,0
Diploma	4	4,0
Sarjana	7	7,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan jumlah pendidikan SD sebanyak 2 orang (2%), SMA/SMK/Sederajat sebanyak 87 orang (87%), Diploma sebanyak 4 orang (4%), dan Sarjana sebanyak 7 orang (7%), jadi total responden sebanyak 100 orang (100%).

Deskripsi data responden berdasarkan jenis wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5

Data Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak		
Jenis Wajib Pajak	Frekuensi	Presentase (%)
Orang Pribadi Karyawan	84	84,0
Orang Pribadi Usahawan	12	12,0
Wajib Pajak Badan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber : Data diolah dari SPSS, 2019

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan jumlah orang pribadi karyawan sebanyak 87 orang, orang pribadi usahawan sebanyak 12 orang dan badan sebanyak 4 orang, jadi total responden sebanyak 100 orang. Persentase dari orang pribadi karyawan 84,0%, orang pribadi usahawan sebanyak 12,0% dan badan sebanyak 4,0%, jadi total persentase ada 100,0%.

#### 4.2 Hasil Pengujian Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Person Corelatio	Sig. (2-tailed)	Keterangan
<b>Pengetahuan</b>			
<b>Perpajakan (X) :</b>			
- Pengetahuan 1	0,768	0,000	VALID
- Pengetahuan 2	0,747	0,000	VALID
- Pengetahuan 3	0,847	0,000	VALID
- Pengetahuan 4	0,835	0,000	VALID
- Pengetahuan 5	0,736	0,000	VALID
<b>Norma Subjektif (X) :</b>			
- Norma 1	0,841	0,000	VALID
- Norma 2	0,842	0,000	VALID
- Norma 3	0,768	0,000	VALID
- Norma 4	0,659	0,000	VALID
- Norma 5	0,862	0,000	VALID
- Norma 6	0,869	0,000	VALID
- Norma 7	0,696	0,000	VALID
<b>Kewajiban Moral (X) :</b>			
- Moral 1	-0,156	0,122	TIDAK VALID
- Moral 2	0,740	0,000	VALID
- Moral 3	0,669	0,000	VALID
- Moral 4	0,704	0,000	VALID
<b>Sanksi Perpajakan (X) :</b>			
- Sanksi 1	0,521	0,000	VALID
- Sanksi 2	0,821	0,000	VALID
- Sanksi 3	0,822	0,000	VALID
- Sanksi 4	0,883	0,000	VALID
- Sanksi 5	0,889	0,000	VALID
<b>Ketidakpatuhan</b>			
<b>Wajib Pajak (Y) :</b>			
- Ketidakpatuhan 1	0,726	0,000	VALID
- Ketidakpatuhan 2	0,757	0,000	VALID
- Ketidakpatuhan 3	0,176	0,080	TIDAK VALID
- Ketidakpatuhan 4	0,780	0,000	VALID

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Uji Validitas menggunakan *Pearson Correlation* dapat diketahui dengan mengukur tingkat signifikansi dari hasil korelasi setiap indikator dengan total indikator, apabila nilai sig. < 0,05 maka variabel tersebut dikatakan valid. Dilihat dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dari semua variabel dinyatakan valid karena mempunyai nilai sig. < 0,05.

### 4.3 Hasil Pengujian Uji Reliabilitas

Tabel 2  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )	0,846	Reliable
Norma Subjektif ( $X_2$ )	0,902	Reliable
Kewajiban Moral ( $X_3$ )	0,664	Reliable
Sanksi Perpajakan ( $X_4$ )	0,654	Reliable
Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y)	0,836	Reliable

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar  $0,846 > 0,60$ , nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel norma subjektif sebesar  $0,902 > 0,60$ , nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel kewajiban moral sebesar  $0,664 > 0,60$ , nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel sanksi perpajakan sebesar  $0,654 > 0,60$ , dan nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel ketidapatuhan wajib pajak sebesar  $0,836 > 0,60$ . Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

### 4.4 Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Pengujian pada uji normalitas ini menggunakan metode uji kolmogrov smirnov dengan ketentuan data berdistribusi normal apabila nilai sig.  $> 0,05$ .

Tabel 3  
Hasil Uji Normalitas

UJI NORMALITAS	
Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
,200 <sup>e,d</sup>	Terdistribusi normal

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar  $0,200 > 0,05$  yang berarti data berdistribusi normal.

#### b. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4  
Hasil Uji Heterokedastisitas

UJI HETEROKEDASTISITAS	
Variabel	Signifikansi
Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )	0,668
Norma Subjektif ( $X_2$ )	0,209
Kewajiban Moral ( $X_3$ )	0,669
Sanksi Perpajakan ( $X_4$ )	0,057

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar  $0,668 > 0,05$ , signifikansi variabel norma subjektif sebesar  $0,209 > 0,05$ , signifikansi variabel kewajiban moral sebesar  $0,669 > 0,05$ , dan signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar  $0,057 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terkena gejala heterokedastisitas.

#### c. Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini proses pengujian multikolinearitas dilakukan dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF melebihi angka 10 maka asumsi multikolinearitas terpenuhi dan sebaliknya jika nilai VIF lebih kecil atau sama dengan 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 5  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )	0,484	2,066
Norma Subjektif ( $X_2$ )	0,481	2079
Kewajiban Moral ( $X_3$ )	0,658	1,521
Sanksi Perpajakan ( $X_4$ )	0,83	1,205

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF pada semua variabel menunjukkan angka di bawah atau kurang dari 10, hal ini berarti bahwa model regresi tidak terkena gejala multikolinearitas.

#### 4.5 Hasil Pengujian Uji Regresi Berganda

Tabel 6  
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,813a	0,661	0,646

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sebesar 0,646 atau 64,6%, sedangkan sisanya sebesar 35,4% dijelaskan oleh variabel lain.

#### 4.6 Hasil Pengujian Uji Hipotesis

##### a. Uji F

Dasar pengambilan keputusan pada Uji F yaitu apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat dikatakan terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 7  
Hasil Uji F

F	Signifikansi
46,235	0,000

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

##### b. Uji t

Dasar pengambilan keputusan pada Uji t yaitu apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y.

Tabel 8  
Hasil Uji t

Hasil Uji t		
Variabel Independen	T	Signifikansi
Pengetahuan Perpajakan (X1)	6,161	0,000
Norma Subjektif (X2)	2,616	0,010
Kewajiban Moral (X3)	0,892	0,375
Sanksi Perpajakan (X4)	3,213	0,002

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel norma subjektif sebesar  $0,010 < 0,05$ , hal ini berarti terdapat pengaruh norma subjektif secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel kewajiban moral sebesar  $0,375 > 0,05$ , hal ini berarti kewajiban moral tidak dapat mempengaruhi secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar  $0,002 < 0,05$ , hal ini berarti terdapat pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

## 5. PEMBAHASAN

Hasil pembahasan masing-masing variabel mengenai uji hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bumiayu Brebes

Berdasarkan dari hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $6,161 > t_{tabel}$  1,985 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha$  0,05 maka Hipotesis satu ( $H_1$ ) diterima yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes.

Pengetahuan perpajakan wajib pajak tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, syarat memiliki NPWP, tata cara dan batas penyampaian SPT, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian di KP2KP Bumiayu Brebes, wajib pajak yang melapor SPT di sana memiliki pengetahuan perpajakan yang bervariasi, ada yang tinggi dalam pengetahuan perpajakan dan ada pula yang sangat rendah pengetahuan perpajakannya. Wajib pajak yang datang ke KP2KP sebagian datang karena mendapat peringatan untuk melaporkan SPT, mereka juga belum bisa mengisi formulir SPT secara mandiri. Hal ini yang menjadikan bahwa wajib pajak tertentu memiliki pengetahuan yang kurang dalam perpajakan, terutama tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan sebaliknya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahputri (2015), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaunang dan Pinatik (2016), yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulina (2018), yang hasilnya menyatakan bahwa

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, hal tersebut disebabkan karena setiap bertambahnya jumlah wajib pajak yang paham tentang pengetahuan pajak maka ketidakpatuhan pajak akan berkurang.

### **Pengaruh Norma Subjektif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bumiayu Brebes**

Berdasarkan dari hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $2,616 > t_{tabel}$  1,985 dan nilai signifikansi sebesar  $0,010 < \alpha$  0,05 maka Hipotesis dua ( $H_2$ ) diterima yang menyatakan norma subjektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes.

Norma subjektif dideskripsikan sebagai pengaruh orang-orang sekitar untuk mengambil keputusan tertentu. Dalam penelitian ini orang-orang yang mungkin mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan perpajakan adalah teman, keluarga, pasangan, petugas pajak, konsultan pajak, pimpinan, dan rekan kerja. Berdasarkan hasil penelitian pada KP2KP Bumiayu Brebes menunjukkan bahwa petugas pajak membawa pengaruh besar kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tidak hanya petugas pajak, orang-orang sekitar wajib pajak seperti teman, rekan kerja, dan keluarga mempunyai pengaruh bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jayanto (2011), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulina (2018), yang menyebutkan bahwa variabel subjektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak.

### **Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bumiayu Brebes**

Berdasarkan dari hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $0,892 < t_{tabel}$  1,985 dan nilai signifikansi sebesar  $0,375 > \alpha$  0,05 maka Hipotesis tiga ( $H_3$ ) ditolak yang menyatakan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes. Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan usulan awal penelitian yaitu kewajiban moral berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Moral merupakan norma yang dimiliki oleh masing-masing individu dan tidak dimiliki oleh individu lain. Poin yang ditanyakan pada variabel kewajiban moral ini terkait etika, prinsip hidup, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian di KP2KP Bumiayu Brebes, moral yang dimiliki wajib pajak yang tidak patuh berada pada taraf menengah ke bawah, ini artinya mereka kurang paham akan pentingnya moral yang seharusnya diterapkan atau menjadi pedoman sebagai prinsip hidup mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayanto (2011), dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Aulina (2018), di mana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa kewajiban moral berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bumiayu Brebes**

Berdasarkan dari hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $3,213 > t_{tabel}$  1,985 dan nilai signifikansi sebesar  $0,002 < \alpha$  0,05 maka Hipotesis empat ( $H_4$ ) diterima yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes.

Sanksi merupakan suatu hukuman atau *punishment* yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu aturan, dalam hal ini adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang berlaku belum sepenuhnya diterapkan pada wajib pajak yang tidak patuh, hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada wajib pajak yang tidak patuh. Bahwa jika selama satu tahun wajib pajak tidak melapor maka tidak langsung diberikan sanksi, tetapi peneliti juga menemui wajib pajak yang tidak patuh mendapatkan sanksi berupa denda karena keterlambatan membayar dan melapor pajaknya. Namun sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh selama tiga tahun berturut-turut. Berdasarkan penelitian di KP2KP Bumiayu Brebes, sanksi perpajakan telah tertulis secara jelas bahwa wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Namun dalam realita yang peneliti temukan, sanksi tersebut tidak secara langsung ditetapkan pada wajib pajak yang tidak patuh dalam satu tahun pajak, melainkan melalui proses peringatan terlebih dahulu. Hal ini menjadikan wajib pajak merasa tidak bersalah atas pelanggaran yang mereka lakukan dan tidak ada efek jera yang didapat oleh wajib pajak.

Hasil ini penelitian didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kaunang dan Pinatik (2016), dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil uji linear berganda melalui uji F diperoleh  $f_{hitung}$  sebesar  $46,235 > f_{tabel}$  2,47 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha$  0,05 maka Hipotesis lima ( $H_5$ ) diterima bahwa ada korelasi antara pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, sanksi perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di KP2KP Bumiayu Brebes.

Hal ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pajak di antaranya pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

## **6. KESIMPULAN**

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes, terdapat 4 (empat) variabel independen yang diujikan yaitu pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), norma subjektif ( $X_2$ ), kewajiban moral ( $X_3$ ), sanksi perpajakan ( $X_4$ ), dan 1 (satu) variabel dependen yaitu ketidakpatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 3 (tiga) variabel independen yang berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), norma subjektif ( $X_2$ ), dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ). Sedangkan variabel kewajiban moral ( $X_3$ ) tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Tingkat moral masing-masing individu hanya diketahui oleh individu itu sendiri, jika wajib pajak beranggapan bahwa mereka memiliki moral yang cukup baik namun pada kenyataannya perilaku wajib pajak tidak sesuai dengan tingkat moral yang mereka miliki. Hal ini mengakibatkan hasil kusioner mengenai kewajiban moral tidak sejalan dengan ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan hasil olah data tidak sesuai dengan hipotesis yang diusulkan.

Kemudian berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), norma subjektif ( $X_2$ ), kewajiban moral ( $X_3$ ), dan sanksi perpajakan ( $X_4$ ) terhadap ketidakpatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- ALN Syah (2017). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd/Samsat Brebes), *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*
- Aulina, D. R. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jember: Universitas Jember.
- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 160.
- Hani, M. (2016). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, Penegakan Hukum, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Dumai. *Jurnal Ekonomi*, 925.
- RS Harjanti & Hetika (2020). *Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Pada PT. Jawen Sejahtera Tegal*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 49.
- Kaunang, P. G., & Pinatik, S. (2016). Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputri, Y. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1-4.

## RELEVANSI NILAI *SUSTAINABILITY REPORTING* DENGAN *NVIVO MEASUREMENT METHOD*: BENCHMARKING PENERAPAN PELAPORAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE

<sup>1</sup>Kenny Fernando, <sup>2</sup>Budi Kurniawan, <sup>3</sup>Refianto

<sup>1</sup>kennyfernando14@gmail.com, <sup>2</sup>budikh@hotmail, <sup>3</sup>refianto@bundamulia.ac.id

Universitas Bunda Mulia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan model pelaporan *Sustainability Reporting* (SR) dan dampaknya terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini menekankan pada pengukuran informasi dalam SR dengan menggunakan perangkat lunak NVIVO yang mengukur tingkat pelaporan *Sustainability Reporting* (Metode Pengukuran NVIVO). Model pelaporan perusahaan telah menginjakkan kaki pada model pelaporan terintegrasi (*Integrated Reporting*). Nam'un, untuk menerapkan *Integrated Reporting* (IR), perusahaan harus menerapkan konsep pelaporan keberlanjutan (SR). Banyak negara maju dan berkembang telah mulai mengadopsi model pelaporan terbaru SR. Di Indonesia sendiri, sudah ada banyak perusahaan milik negara yang menerapkan SR dan IR, namun, belum ada yang mengungkapkan manfaat pelaporan pada saat suatu negara. Penelitian ini menguji model pelaporan perusahaan sebelumnya, yaitu SR untuk mengungkap bukti model pelaporan SR dengan mengambil contoh dari Afrika Selatan yang secara resmi mengadopsi kedua model pelaporan di bursa saham pada negara tersebut. Studi ini akan melihat hubungan dengan relevansi nilai informasi akuntansi dari 2005 hingga 2010.

Kata kunci: Pelaporan Keberlanjutan, Relevansi Nilai, Informasi Akuntansi, NIVO

### Abstract

*This study aims to examine the effect of applying the Sustainability Reporting (SR) model and its impact on the value relevance of accounting information. In accordance with the title, this research emphasizes the measurement of information in SR by using NVIVO software that measures the level of Sustainability Reporting (NVIVO Measurement Method). The company's reporting model has set foot on the integrated reporting model (Integrated Reporting). However, to implement integrated reporting the company must have implemented the concept of Sustainability Reporting. Many developed and developing countries have begun to adopt the latest SR reporting model. In Indonesia, there are already many state-owned companies implementing SR and IR, however, no one has yet revealed the benefits of the reporting at a time. This examines the company's previous reporting model, namely Sustainability Reporting to reveal evidence of the Sustainability Reporting model by taking an example from South Africa, which has officially adopted both reporting models on the stock exchanges in the country. This study will look at the relationship with the value relevance of accounting information from 2005 to 2010.*

*Keywords: Sustainability Reporting, Value Relevance, Accounting Information, NIVO*

## 1. PENDAHULUAN

Johannesburg Stock Exchange (JSE) mengejutkan dunia pelaporan perusahaan dan bursa efek dunia dengan mengambil langkah tegas dan ekstrim pada tahun 2020 yaitu memasukan kerangka IR pada panduan tata kelola disebut King Code III yang mewajibkan seluruh perusahaan terdaftar untuk menerbitkan laporan terpadu (*Integrated Report*) pada tanggal pelaporan 31 Desember 2011. Langkah berani tersebut menanggapi perkembangan model pelaporan telah menarik banyak perhatian yang berasal dari praktisi, pembuat kebijakan, hingga investor. Perkembangan pelaporan perusahaan telah mencapai babak baru setelah munculnya isu keberlanjutan (*sustainability*) yaitu isu penciptaan nilai (*value creation*) Ernst & Young (2013). Pelaporan perusahaan bertujuan untuk mengkomunikasikan bagaimana perusahaan menciptakan nilai, memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia yang lebih stabil dari sisi finansial, serta melestarikan lingkungan secara global. Dunia bisnis khususnya perusahaan tidak mungkin dapat menikmati nilai tambah untuk jangka panjang jika hanya fokus pada usaha penciptaan ekonomis bagi perusahaan sendiri. Untuk mencapai kesuksesan

jangka panjang, dunia usaha pula harus mengejar penciptaan nilai bagi masyarakat (komunitas) dan lingkungan. Hal yang telah disebutkan di atas juga disebut dengan istilah *The Triple Bottom Lines* yang dinyatakan oleh John Elkington (1994). Perusahaan harus berusaha mencapai kondisi yang seimbang agar perusahaan dapat berkontribusi dalam jangka panjang dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan komunitas/ masyarakat di lingkungan sosial (*people*) dan pelestarian pada lingkungan tempat perusahaan beroperasi (*planet*), diimbangi dengan tujuan perusahaan dalam mencapai laba (*profit*).

Berpindah pada praktik di Asia, Bursa Efek Hong Kong dalam panduan pelaporannya yang disebut *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mengeluarkan rekomendasi panduan pada bulan Agustus 2012 untuk pelaporan mulai tanggal 1 Januari 2013 (the IIRC, 2013). Hal ini tentunya menandakan bahwa manfaat dari IR terkait dengan penciptaan nilai perusahaan mulai disadari oleh perusahaan dan investor. Hal ini pula ditandai dengan maraknya Perusahaan ASIA yang menjadi anggota dari The IIRC untuk mendapatkan advokasi penerapan IR pada perusahaan masing-masing. Tercatat sebanyak 106 perusahaan dari Kawasan ASIA telah menjadi anggota resmi The IIRC mulai tahun 2014 antara lain dari Negara Singapura, Hong Kong, Srilanka, India, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Qatar).

Beberapa penelitian berpendapat bahwa pengadopsian *Integrated Reporting* diprediksi akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada penyedia modal serta memperkenalkan pada pendekatan yang selaras dan efisien dalam pelaporan perusahaan melalui hubungan antara bagian dari laporan keuangan dan keberlanjutan yang dahulu tidak tersambung (Baboukardos, 2016). Penelitian berkembang pada trend perusahaan yang mulai menerapkan *Integrated Reporting* dikaitkan dengan relevansi informasi yang disampaikan melalui *Integrated Reporting*. Pelaporan ini menjadi sebuah kewajiban karena IR akan meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan (Cho et. Al., 2013 dan Eccles & Serafeim, 2012). Penelitian lain pula menghubungkan pelaporan perusahaan, apakah dengan menggunakan *Internet Financial Reporting* (IFR) dapat menjangkau dan lebih baik kepada investor. Beberapa penelitian terkait dengan IFR dilakukan secara deskriptif, walaupun yang lain menginvestigasi determinan dan karakteristik dari *Corporate Internet Reporting* (CIR) (Martson & Polei 2004). Penelitian lain melihat peran dari IFR pada kinerja perusahaan.

Terdapat beberapa perusahaan yang menyatakan telah menerapkan *Integrated Reporting* di Tanah Air antara lain: (1) PT Aneka Tambang, Tbk., (2) PT Semen Indonesia, Tbk., (3) PT United Tractors, Tbk., dan (4) PT Pertamina, Tbk.. Selain untuk mengikuti tuntutan global, IR sendiri dirasakan memiliki dampak seperti yang dijelaskan dalam IR Framework. Pada praktik di Indonesia, banyak perusahaan yang masih mengacu pada standar pelaporan yang dikeluarkan oleh *The Global Reporting Initiative* (GRI) yang meluncurkan pedoman dalam penyusunan laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*). Tetapi dengan fenomena perusahaan di ASIA yang menjadi anggota resmi The IIRC dan menerapkan IR secara sukarela maka perlu dilakukan pendalaman terkait dengan relevansi penerapan antar kedua model pelaporan perusahaan tersebut. Namun demikian, pertanyaan terkait peningkatan relevansi nilai informasi keuangan dibawah *Integrated Reporting* masih menjadi pertanyaan empiris karena penerapan standard akuntansi yang tidak jauh berbeda baik pra maupun pasca *Integrated Reporting* (Cheng et. al., 2014; Solomon dan Maroun, 2012; de Villiers et. al., 2014).

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti empiris apakah perlu untuk menerapkan IR di Kawasan ASIA khususnya di Indonesia pasca beberapa perusahaan di Kawasan ASIA telah menerapkan IR sejak tahun 2011 hingga saat ini. Terlepas dari standard akuntansi yang tidak jauh berbeda, peneliti tertarik apakah penerapan *Sustainability Reporting* yang diwujudkan dalam *Sustainability Report* memiliki nilai relevansi yang lebih tinggi dari pada sebelum penerapan model laporan tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Signaling Theory

Aplikasi dari *signaling theory* telah digunakan dalam banyak penelitian terutama yang berkaitan dengan keuangan korporasi (Dionne & Oudemi, 2011; Ching & Gerab, 2014), pemasaran (Wells *et al.*, 2011; Mavlanova *et al.*, 2012), dan perilaku manusia. *Signaling theory* terdiri dari 2 aktor yang terlibat yaitu *signaler* yaitu orang/ perusahaan yang mengirimkan informasi yang berguna bagi penerima dan *receiver* yaitu orang yang mengobservasi dan menginterpretasikan sinyal (Connelly *et al.*, 2011a). Hal utama dari *signaling theory* adalah analisis dari berbagai tipe sinyal yang berbeda yang dikirim oleh *signaler* dan situasi di mana sinyal-sinyal ini kemudian diinterpretasikan dan digunakan oleh *receiver* (Ching & Gerab, 2014). Sinyal ini berisi informasi tentang karakteristik dari *signaler* dan *receiver* melakukan pengujian untuk mengevaluasi kredibilitas dari *signaler* (Spence, 2002). Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa *signaler* dan *receiver* adalah komponen utama yang terdapat dalam *signaling theory*.

### 2.2. Stakeholder Theory

Definisi *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Sementara Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan tentang pihak mana saja yang bertanggungjawab pada perusahaan (Freeman 1984). Perusahaan diharuskan untuk menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya yaitu dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang memiliki *power/* kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas operasional antara lain pasar atas produk perusahaan, tenaga kerja, dan lain-lain (Ghozali, 2013).

Perusahaan saat ini tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*), namun mulai bergeser lebih luas yaitu sampai pada bidang sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Fenomena tersebut terjadi, karena munculnya tuntutan dari masyarakat akibat timbulnya *negative externalities* serta ketimpangan sosial yang terjadi akibat dari operasi perusahaan (Harahap, 2002). Untuk itu, paradigam terkait dengan tanggung jawab perusahaan yang awalnya hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus mulai memperhitungkan faktor-faktor baik internal maupun eksternal terkait dengan sosial (*social dimensions*) terhadap *stakeholder*.

*Sustainability Reporting* berkaitan erat dengan para pemangku kepentingan terutama dengan konsep penciptaan nilai perusahaan yang berperan penting dalam keberlangsungan perusahaan (Shaoul, 1998). Penciptaan nilai merupakan elemen inti dari konsep IIRC (IIRC, 2013). Konsep yang terdapat dalam kerangka <IR> lebih luas daripada nilai pemegang saham dan melibatkan lebih banyak modal. Sehingga konsep IR dengan mengungkapkan penciptaan nilai dan distribusinya menjadi hal yang penting seperti mendokumentasikan apakah manajemen perusahaan telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan kesuksesan suatu perusahaan dalam memuaskan berbagai pemangku kepentingan sehingga meningkatkan kesejahteraan baik untuk pemangku kepentingan secara umum dan ekonomi secara. Konsep <IR> yang memberikan persyaratan untuk mengintegrasikan seluruh informasi yang berkaitan dengan sosial, isu ekonomi dan lingkungan, serta sosial politik dan subsistem ekonomi global. Hal ini akan membuat investor lebih memperoleh informasi dan mampu melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi perusahaan (King III, 2009).

### 2.3. Konsep Sustainability Reporting

*The Global Reporting Initiative* (the GRI) diciptakan pada tahun 1997 oleh organisasi nirlaba Ceres and Tellus Institute yang berbasis di Boston. Selama bertahun-tahun, database GRI telah mengalami peningkatan konstan dalam jumlah negara dan pelaporan perusahaan dalam inisiatif keberlanjutan (KPMG, 2008). The GRI kini telah menjadi salah satu *standar setter* SR yang paling penting. Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI direview secara berkala untuk memberikan panduan terkini tentang SR. Update keempat, yang disebut G4, adalah versi terbaru dari Pedoman Pelaporan Keberlanjutan. Pedoman ini mengarahkan perusahaan untuk melaporkan tidak hanya pada kinerja keuangan tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan mereka.

### 2.4. Pengembangan Hipotesis

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IASB) (2000) menyebutkan bahwa bahwa karakteristik yang paling penting dari laporan keuangan yang baik adalah kehandalan dan relevansi. Teori relevansi nilai menyebutkan bahwa peran dari informasi akuntansi terletak pada aspek penilaian ekuitas terutama seberapa jauh nilai perusahaan dapat dijelaskan atau diatributkan pada informasi akuntansi (Al-Hogail, 2004). Barth *et al.* (2001) juga menyetujui bahwa informasi keuangan dikatakan memiliki nilai yang relevan jika dikaitkan dengan nilai pasar. Relevansi nilai digunakan untuk menyediakan laporan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investor (Alfraih, 2017). Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Holthausen dan Watts (2001) yang menunjukkan bahwa informasi dinyatakan relevan jika informasi tersebut menyebabkan perubahan yang material terhadap *return* atau *volume* perdagangan saham. Beberapa hal di atas menyimpulkan bahwa informasi akuntansi/keuangan dikatakan relevan jika informasi akuntansi/keuangan tersebut dapat mencerminkan nilai perusahaan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

*Sustainability report* merupakan laporan yang memuat informasi kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial perusahaan. Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab atas kegiatan usahanya kepada stakeholder-nya, pengungkapan *sustainability report* ini dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban perusahaan serta pengelolaan hubungan kepada para stakeholder. Selain itu, *sustainability report disclosure* ini dapat dijadikan bukti bahwa perusahaan berada dalam batasan peraturan yang ada. Pengungkapan informasi dalam *sustainability report*, diharapkan dapat memberikan bukti nyata bahwa proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berorientasi profit saja, tetapi juga memperhatikan isu sosial dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, *sustainability report disclosure* dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan investasi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Jadi, semakin meningkatnya *sustainability report* diharapkan dapat meningkatkan probabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Arjowo (2013) menyimpulkan bahwa *sustainability report disclosure* memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian terkait relevansi nilai informasi akuntansi dari SR didukung bukti oleh Baboukardos dan Rimmel (2016) di *Johannesburg Stock Exchange* (JSE) di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk mengadopsi SR dan kemudian <IR>. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan signifikan terhadap nilai perusahaan setelah adopsi SR dan <IR> yang tercermin pada koefisien laba yaitu *Earning per share* (EPS). Namun pada sisi lain, relevansi nilai turun dengan ditandai adanya koefisien yang negatif signifikan dari aset bersih (*net assets*). Peneliti menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya pengungkapan resiko atau kewajiban atau diukur dengan cara yang lebih dapat diandalkan setelah penerapan SR dan <IR>. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *integrated reporting* berpengaruh terhadap relevansi nilai informasi akuntansi pada perusahaan.

Penelitian terkait dengan konten isi dari *Sustainability Report* Kata kunci (*keyword*) yang digunakan untuk mengukur informasi dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Pencle &

Malaescu (2016) yang terdapat pada <http://www.catscanner.net/dictionaries.php>. Pencle & Malaescu (2016) membentuk kata kunci pengungkapan SR berdasarkan GRI G4, UN Global Compact, ESG, KLD, dan dimensi IIRC yang juga telah divalidasi oleh ahli. Total pengungkapan informasi SR merupakan penjumlahan dari *percentage of keyword coverage* dari keempat dimensi tersebut. *Percentage of keyword coverage* merupakan persentase jumlah kata kunci yang diungkapkan terhadap seluruh jumlah kata yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Pengungkapan tersebut memiliki pengaruh kepada pembaca laporan yang akan berspesifikasi lebih baik atas informasi akuntansi yang dilaporkan oleh perusahaan.

Berdasarkan literatur tersebut maka peneliti mengembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : *Sustainability Reporting* memiliki pengaruh positif terhadap nilai pasar

H2 : Penerapan *Sustainability Reporting* memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan relevansi nilai informasi akuntansi

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana peneliti menggunakan variabel keuangan yang diperoleh dari *Datastream Thomson Reuters*. Sementara data non-keuangan diperoleh dengan melakukan analisis konten dari laporan keuangan perusahaan dengan membaca secara mendalam.

#### 3.1 Unit Analisa dan Sampel

Peneliti menggunakan Laporan *Sustainability Report* (SR) sebagai unit analisa penelitian dan mengukur unit analisa ini selama rentang periode 6 tahun, yakni mulai tahun 2005 hingga tahun 2010. Kami mengambil periode ini, dengan pertimbangan bahwa pada periode awal perusahaan menerapkan SR dan tahun akhir peralihan dari SR menuju IR, akan terlihat perbedaan yang cukup signifikan dalam penyampaian informasi akuntansi, sehingga diharapkan akan menciptakan peningkatan relevansi nilai atas informasi akuntansi tersebut.

Sampel yang kami gunakan berasal dari perusahaan yang terdaftar pada organisasi *Johannesburg Stock Exchane* (JSE) dan telah menerapkan King Code II dan King Code III. Peneliti memilih sampel ini sebagai objek penelitian karena perusahaan yang terdaftar pada organisasi JSE sudah menerapkan pelaporan informasi akuntansi dalam format SR secara resmi pada peraturan pencatatan pada bursa negara tersebut, sehingga memudahkan bagi peneliti dalam melakukan analisis laporan. Total perusahaan yang terdaftar pada *Johannesburg Stock Exchane* (JSE) berjumlah 488 perusahaan yang tersebar di seluruh Afrika Selatan dengan jumlah observasi data sebanyak 1.439 *unbalanced panel data* selama 6 tahun yaitu 2005 hingga 2010. Peneliti mengambil data set 1.439 *unbalanced panel* dengan pertimbangan kecukupan data untuk diolah dalam software statistik.

#### 3.2 Model

Untuk mengukur efektifitas penerapan SR yang didasarkan melalui perubahan nilai harga pasar ekuitas, peneliti menggunakan *Model Linear Price Level* yang diadopsi dari penelitian Baboukardos dan Rimmel (2016). Model ini juga telah digunakan oleh peneliti lain seperti Lourenco et al., (2014); Sinkin et al., (2008)., Berthelot et al., (2012); Hassel et al., (2005); Johnston, (2005))

#### Model untuk menguji Hipotesis 1 dan 2

$$PR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BVS_{it} + \alpha_2 EPS_{it} + \alpha_3 PSR_{it} + \alpha_4 (PSR * BVS)_{it} \\ + \alpha_5 (PSR * EPS)_{it} + \alpha_6 LOSS_{it} + \alpha_7 (LOSS * EPS)_{it} \\ + \alpha_8 LEV_{it} + \alpha_9 ROE_{it} + \alpha_{10} SIZE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$PR_{it}$	: Nilai pasar dari ekuitas perlembar saham pada enam (6) bulan setelah akhir tahun fiscal
$BVS_{it}$	: Nilai buku ekuitas perlembar saham i pada tahun t
$EPS_{it}$	: Laba sebelum bunga dan pajak per lembar saham perusahaan i pada tahun t
$PSR_{it}$	: Presentase konten SR perusahaan i pada tahun t
$LOSS_{it}$	: Kerugian perusahaan i pada tahun t (1 jika rugi dan 0 jika sebaliknya)
$LEV_{it}$	: Rasio utang perusahaan i pada tahun t
$ROE_{it}$	: Rasio profitabilitas perusahaan i pada tahun t
$SIZE_{it}$	: Logaritma natura dari total aset perusahaan i pada tahun t

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah nilai pasar ekuitas (PR) yang diukur dengan membagi nilai pasar ekuitas pada bulan ketiga setelah tahun buku (t+3) dengan jumlah lembar saham. Periode ketiga (t+3) setelah tahun buku digunakan karena untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat reaksi daripada investor, sehingga tidak dimungkinkan jika nilai pasar ekuitas dilihat pada akhir tahun, dimana tidak semua investor sudah mengetahui informasi perusahaan. Pengukuran ini turut digunakan oleh penelitian sebelumnya, yakni penelitian Baboukardos dan Rimmel (2016).

Variabel independen pada model 1 dan 2 adalah Variabel independen utama dalam penelitian ini mencakup tiga variabel yakni Nilai Buku perlembar Saham (BVS), Laba sebelum bunga dan pajak (EPS). Nilai buku per lembar saham (BVS) diproxikan melalui pembagian dari nilai buku ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham, sementara Laba sebelum bunga dan pajak (EPS) diukur melalui pembagian laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan jumlah lembar saham. Selanjutnya untuk tingkat pengungkapan informasi SR pada laporan perusahaan. Pengungkapan informasi SR diukur menggunakan *percentage of keyword coverage* dengan bantuan software Nvivo. Pengukuran *coverage ratio* sendiri mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini juga menambahkan kata kunci dari penelitian Verbeteen (2016) yang mengukur pengaruh pengungkapan *Sustainability Reporting* dengan satu set kata tertentu. Kata kunci (*keyword*) yang digunakan untuk mengukur informasi *Sustainability Reporting* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Pencle & Malaescu (2016) yang terdapat pada <http://www.catscanner.net/dictionaries.php>. Pencle & Malaescu (2016) membentuk kata kunci pengungkapan SR berdasarkan GRI G4, UN Global Compact, ESG, KLD, dan dimensi IIRC yang juga telah divalidasi oleh ahli. Total pengungkapan informasi SR merupakan penjumlahan dari *percentage of keyword coverage* dari keempat dimensi tersebut. *Percentage of keyword coverage* merupakan persentase jumlah kata kunci yang diungkapkan terhadap seluruh jumlah kata yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Adapun perhitungan sebagai berikut:

$$\text{keyword coverage} = \frac{\text{jumlah kata kunci}}{\text{jumlah keseluruhan kata}}$$

Hasil *keyword coverage* adalah persentase (%) yang berarti berapa besar kata kunci yang dicari berada pada suatu teks atau file atau laporan. Sebagai ilustrasi jika *keyword coverage* dari *Sustainability Reporting* berjumlah 0.05 atau 5% berarti informasi *Sustainability Reporting* yang terdapat pada laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan A hanya memasukkan sebanyak 5% dari total informasi yang diungkapkan oleh perusahaan kepada publik. Analisis selanjutnya adalah dapat dibandingkan dengan rata-rata pengungkapan

informasi dari seluruh perusahaan untuk melihat apakah pengungkapan informasi sebesar 5% relatif sedikit atau sudah baik.

Penelitian ini juga menyertakan empat variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian. Keempat variabel ini dipilih karena sering digunakan dalam penelitian terkait nilai pasar perusahaan (Baboukardos dan Rimmel, 2016). Kerugian perusahaan (LOSS) diukur dengan menggunakan variabel binari, yang mana bernilai satu (1) jika laba sebelum bunga dan pajak (EPS) negatif dan bernilai nol (0) jika nilai laba sebelum bunga dan pajak (EPS) positif. Sementara rasio utang perusahaan diukur dengan pembagian antara total hutang dengan total aset. Sedangkan rasio profitabilitas perusahaan diukur dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan nilai buku ekuitas dan ukuran perusahaan diukur dengan logaritma total aset.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan yang tercatat di *Johannesburg Stock Exchange* (JSE) dengan tahun observasi mulai 2005 hingga 2010 (6 tahun). Tabel 4.1 menunjukkan prosedur pemilihan analisis pada model yang digunakan dengan total sampel akhir sebanyak 338 perusahaan dengan total observasi sebanyak 1.439 observasi selama rentang waktu 2005 hingga 2010 atau selama 6 tahun untuk mendapatkan gambaran holistic mengenai bukti empiris penerapan *Sustainability Reporting* dan dampaknya pada informasi akuntansi. *Unbalanced panel data* dipilih untuk mendapatkan banyak observasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih reliabel pada dampak penerapan *sustainability reporting* pada informasi akuntansi.

Tabel 4.1  
Prosedur Pemilihan Sampel untuk *Unbalanced Panel Data*

	Prsh	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Perusahaan Terdaftar di JSE	488	448	448	448	448	448	448
Industri Keuangan	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)
Data keuangan tidak tersedia	(40)	(140)	(132)	(95)	(76)	(75)	(71)
Total perusahaan	338						
<b>Total Observasi</b>	<b>1.439</b>	<b>198</b>	<b>206</b>	<b>243</b>	<b>262</b>	<b>263</b>	<b>267</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data

### 4.1 Statistik Deskriptif

#### 4.2.1 Model *unbalanced panel data*

Hasil statistik deskriptif pada Model *unbalanced panel data* menunjukkan bahwa rata-rata dari nilai *market value per share* perusahaan di Afrika Selatan sebesar ZAR 0.044 atau setara dengan Rp47. Terdapat penurunan rata-rata nilai pasar perusahaan per lembar saham dari periode 2005-2010 sebesar ZAR 0.010. Standar Deviasi tidak jauh berbeda yaitu sebesar ZAR 0.067, menandakan bahwa variasi dari data tidak jauh sehingga dapat dikatakan data terdistribusi dengan normal.

Untuk hasil dari BVS dan EPS terlihat tidak jauh berbeda dari normalitas yaitu rata-rata sebesar 21.5 dan 4.8 perlembar saham untuk masing-masing BVS dan EPS. PSR pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai mean sebesar 0.01805 artinya adalah informasi mengenai *Integrated Reporting* yang digagas oleh the IIRC merujuk pada IR Framework dibahas/ diungkapkan dalam laporan tahunan di periode 2011-2016 baru sebesar 1.8% saja. Kumba Iron Ore dan Redefine Properties Ltd adalah dua dengan nilai tertinggi dalam hal pengungkapan. Hal ini akan berimplikasi pula pada penilaian nilai pasar yang memang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sample lainnya. Kedua perusahaan dengan *coverage ratio* tertinggi ini

pula adalah perusahaan yang mendapatkan *award* dari *Ernst & Young 100 Excellent Integrated Reporting Awards 2016* pada kategori Top 10.

Tabel 4.2  
Statistik Deskriptif Model *unbalanced panel data*

Variable	Mean	Standard Deviation	Min	Max
PR	0.0447228	0.0676224	7.75e-06	0.29147
PSR	0.01805	0.005204	0.00065	0.03491
BVS	21.5316	32.40312	0.001113	149.02
EPS	4.766096	8.64534	-23.233	39.0621
SIZE	51,8476	177,156.6	5.743	1,543,037
LEV	0.4922934	0.2377234	0.00145	0.98005
ROE	0.2093831	0.3496205	-1.54918	3.111

Keterangan:

PR= *Market Value of Equity per Share*, TYPIR= *Type of IR*, BVS= *Book Value per Share*, EPS= *earning per share*, SIZE= *Total Assets in thousand*, LEV= *Leverage*, ROE= *Return on Equity*. Number of observation 1.439 observation

Sumber: output STATA versi 14

Rata-rata *Return on Equity* (ROE) perusahaan di Afrika Selatan pada periode 2005-2010 adalah sebesar 20,9% tidak berbeda dengan Perusahaan di Indonesia yang memiliki ROE dikisaran 5-10%. ROE dengan nilai 20,9% diartikan dengan ZAR 100 *total equity* mampu menghasilkan profit sebesar ZAR 20,1. ROE terendah sebesar -1.5 yaitu perusahaan yang mengalami kerugian. Rata-rata *leverage* sebesar 49,2% mengindikasikan *total debt* perusahaan sampel dibandingkan total asetnya.

### 4.3 Pengujian Model Terbaik

Beberapa pengujian telah dilakukan antara lain *Chow Test*, *LM Test*, *Hausman Test*, digunakan untuk menguji model terbaik di antara PLS dan FE. Tabel 4.3 menunjukkan rangkuman hasil pengujian model dengan *output* Stata yang telah dilakukan untuk menentukan model yang diinterpretasikan. Pada keseluruhan model tidak terdapat variabel yang memiliki nilai *skewness* lebih dari 3 atau kurang dari 3 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam seluruh model sudah memiliki distribusi normal. Jumlah observasi penelitian ini adalah sebanyak 1.439 (*unbalanced panel data* yang telah melebihi standar *central limit theorem* ( $n > 30$ )). Dapat dikatakan data sudah memenuhi asumsi normalitas. Variabel ukuran perusahaan memiliki *multikolinearitas* sehingga dilakukan *treatment centering*. menunjukkan nilai VIF masing-masing variabel pada model *unbalanced panel data*. Tidak ada  $VIF > 10$  sehingga tidak terdapat masalah *multikolinearitas* pada model.

Tabel 4.3  
Kesimpulan model terbaik setelah uji asumsi klasik

Model	Keputusan terbaik	model	Hasil uji klasik	uji asumsi	Model terbaik setelah uji asumsi klasik
Model	RE		n.a		RE

Sumber: hasil pengolahan STATA 14

## 4.4 Analisis Korelasi Antar Variabel

### 4.4.1 Model *unbalanced panel data*

Tabel 4.4 menunjukkan koefisien korelasi hubungan antar variabel penelitian pada model 2. Variabel independen yang terdiri dari BVS, EPS, PSR, LEV, ROE, dan SIZE berkorelasi positif dengan perubahan nilai pasar per lembar saham. Gambaran awal ini menunjukkan

hubungan yang sesuai dengan hipotesis atas seluruh sign dan signifikansi variabel. *DLOSS* pada model ini tidak memiliki signifikansi. Untuk keseluruhan korelasi tidak melebihi 0.8500 yang artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variable yang dapat mengurangi estimator untuk diinterpretasikan.

Tabel 4.4  
Koefisien Korelasi Model *unbalanced panel data*

	PR	BVS	EPS	TYPIR	DLOSS	LEV	ROE	SIZE
PR	1							
BVS	0.7252 0.0000***	1						
EPS	0.7091 0.0000***	0.7796 0.000***	1					
PSR	0.1817 0.0000***	-0.2811 0.000***	-0.2730 0.0000*	1				
DLOSS	-0.1811 0.1127	-0.1478 0.002**	-0.2548 0.0000*	0.1177 0.0015**	1			
LEV	0.1093 0.0029**	0.0826 0.0186**	0.2482 0.0001*	-0.1665 0.0038**	-0.0994 0.0061*	1		
ROE	0.1905 0.0000**	0.0331 0.2021	0.2655 0.0000*	-0.0880 0.1902	-0.5447 0.0000*	0.1852 0.0000*	1	
SIZE	0.5250 0.0000***	0.6247 0.0000**	0.5419 0.0000*	-0.4057 0.0000-	-0.2466 0.000**	0.3895 0.000**	0.1841 0.0031**	1

Keterangan:

*PR*= Market Value of Equity per Share, *TYPSR*= Type of SR, *BVS*= Book Value per Share, *EPS*= earning per share, *SIZE*= Natural Logarithm Total Assets, *LEV*= Leverage, *ROE*= Return on Equity. Number of observation 1.439 observation

\*\*\* Correlation is significant at 1% level (1-tailed)

\*\* Correlation is significant at 5% level (1-tailed)

\* Correlation is significant at 10% level (1-tailed)

## 4.5 Analisis Pengujian Hipotesis (Uji Signifikansi Parsial (t-test))

### 4.5.1 Relevansi Nilai Informasi *Sustainability Reporting*

Pengujian model ini bertujuan untuk menguji relevansi nilai informasi sustainability pada perusahaan di Afrika Selatan untuk periode 2005-2010. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.5, BVS dan EPS tetap memiliki relevansi nilai sebagaimana telah diuji pada banyak penelitian. Relevansi nilai EPS meningkat sesuai dengan tanda koefien yang memiliki signifikansi 1%. Sedangkan nilai BVS mengalami penurunan karena tanda koefisien negatif dan memiliki signifikansi 1%. Alasan yang mungkin adalah studi yang dilakukan oleh Barth dan McNichols (1994) serta Hughes (2000) memberikan bukti secara empiris bahwa investor mempertimbangkan kewajiban lingkungan yang tidak diungkapkan saat pasar menilai perusahaan. SR di JSE membuat pengukuran dan pengidentifikasian hal tersebut semakin jelas dikaitkan dengan perusahaan (tidak terpisah) sehingga penurunan aset bersih (BVS) dapat menjadi alasan. Selain itu, penelitian empiris telah menunjukkan bahwa setelah adopsi King Code III, perusahaan yang terdaftar di Afrika Selatan tidak hanya memberikan diskusi ekstensif mengenai risiko, tantangan dan ketidakpastian yang perusahaan hadapi atau yang akan dihadapi di masa depan (Marx dan Mohammadali-Haji, 2014) tetapi juga terus meningkatkannya (Ernst and Young, 2013, 2014). Beberapa penelitian terkait dengan periode sebelum <IR> menyarankan bahwa pendekatan pelaporan SR memungkinkan pelaku pasar untuk mengidentifikasi atau mengukur lebih andal risiko perusahaan di masa depan yang lebih andal terkait dengan masalah keberlanjutan atau keuangan sehingga penurunan relevansi nilai dapat diakibatkan oleh pengungkapan risiko tersebut sehingga nilai aset lebih konservatif dari pada variable laba yang merupakan penilaian kinerja jangka pendek. Berikutnya, dengan

format SR yang menekankan pada “modal/ *capitals*” maka perusahaan harus membagi prioritas secara merata seperti sumber daya manusia, social, dan modal alam.

Tabel 4.5  
Hasil Regresi Model *Panel Data*

Variabel	Ekspektasi tanda	Koefisien	Z stat	Prob z
BVS	+	0.0008847	15.28	0.000***
EPS	+	0.0008050	7.44	0.000***
PSR	+	<b>0.0041506</b>	<b>3.64</b>	<b>0.003***</b>
PSR*BVS	-	<b>-0.0002405</b>	<b>-4.45</b>	<b>0.000***</b>
PSR*EPS	+	<b>0.0011799</b>	<b>7.31</b>	<b>0.000***</b>
DLOSS	-	0.0027794	1.71	0.044**
LEV	-	0.0029748	1.12	0.131
ROE	+	0.0000848	0.18	0.430***
SIZE	+	0.0010093	1.63	0.052**

Model 1:  

$$PR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BVS_{it} + \alpha_2 EPS_{it} + \alpha_3 PSR_{it} + \alpha_4 (PSR * BVS)_{it} + \alpha_5 (PSR * EPS)_{it} + \alpha_6 LOSS_{it} + \alpha_7 (LOSS * EPS)_{it} + \alpha_8 LEV_{it} + \alpha_9 ROE_{it} + \alpha_{10} SIZE_{it} + \varepsilon_{it}$$

\*\*\* signifikan pada  $\alpha=1\%$  (one tailed)  
 \*\* signifikan pada  $\alpha=5\%$  (one tailed)  
 \* signifikan pada  $\alpha=10\%$  (one tailed)

Keterangan:  
 PR= Market Value of Equity per Share, PSR= Type of SR, BVS= Book Value per Share, EPS= earning per share, SIZE= Natural Logarithm Total Assets, LEV= Leverage, ROE= Return on Equity. Number of observation 1.439 observation (2005-2010)

Hasil ini mendukung *signaling theory* bahwa perusahaan akan mencoba menyampaikan apa yang publik inginkan sehingga publik dapat menilai lebih dari valuasi perusahaan. Tetapi publik menilai lebih pada model pelaporan setelahnya yaitu *Integrated Reporting*. Menurut penelitian terkait dengan pola pelaporan *Sustainability Reporting* di JSE menunjukkan bahwa praktik *Sustainability Reporting* masih sekedar pemenuhan kriteria dan kurang pemahaman sehingga itu yang dinilai oleh publik (Pat Maubane, 2016).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan memberikan bukti empiris terkait dengan relevansi nilai informasi *Sustainability Reporting* dengan contoh dari Afrika Selatan sebagai Negara yang berani untuk mewajibkan kedua model pelaporan perusahaan tersebut mulai periode tahun 2005 hingga tahun 2010. Penelitian ini juga memberikan *insight* secara empiris atas dampak yang akan terjadi pada informasi akuntansi yang terkena imbas dari penerapan pelaporan sebagai bagian dari konsekuensi ekonomi dalam pelaporan perusahaan walaupun standar akuntansi dalam pelaporan keuangan tidak berubah baik pada penerapan *Sustainability Reporting*.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan dengan Stata versi 14 dan telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Informasi *Sustainability Reporting* tidak memiliki relevansi nilai bagi pasar di Afrika Selatan. Dengan demikian, usaha perusahaan untuk mengungkapkan informasi *Sustainability Reporting*/ pembuatan format SR tidak memiliki dampak kepada pasar atas relevansi nilai yang dihubungkan dengan *Market Value per Share*.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian yang dihadapi dalam proses penyelesaian sehingga dapat diminimalisir oleh penelitian-penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian ini tidak menekankan pada bentuk model pelaporan perusahaan *Sustainability Report*. Peneliti menekankan pada informasi yang disampaikan sesuai dengan acuan sebagai kata kunci untuk *Sustainability Reporting*. Sehingga penelitian ini tidak dapat melihat apakah dengan semakin tinggi pengungkapan informasi baik SR dapat mencerminkan kesesuaian format pelaporan dari masing masing model pelaporan tersebut dengan standar isi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu proksi untuk melihat dampak relevansi nilai variabel independen dan variabel dependen yaitu *coverage ratio* dan *Market Value per Share*. Sehingga sangat bergantung pada kondisi pasar. Oleh sebab itu penelitian ini tidak dapat menangkap kemungkinan lain seperti adanya faktor politik dan kondisi internal perusahaan.

## 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Melihat konten isi dari *Sustainability Reporting* untuk mengukur kualitas pengungkapan sesuai dengan butir pelaporan dari masing-masing model pelaporan perusahaan. Hal ini mengikuti dikotomi untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat menerapkan format dan informasi yang disyaratkan oleh kedua model pelaporan perusahaan.
2. Menambahkan variabel terkait dengan aspek politik mengingat pelaporan perusahaan cukup erat dengan kepentingan dan faktor politik perusahaan. Isu di Afrika Selatan sendiri tidak terlepas dari pengawasan pemerintah pada “kenangan masa lalu” *apartheid* sehingga kebijakan pelaporan perusahaan dan pemerintahan sangat erat diatur di tingkat negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfraih, M.M. , (2017), "The value relevance of intellectual capital disclosure: empirical evidence from Kuwait ", *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 25 Iss 1 pp. 22 – 38.
- Al-Hogail, A.A. (2004), “The valuation effect of investor behavior on the relevance of financial information”, PhD, Case Western Reserve University, Ohio.
- Arjowo, I.S. 2013. Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia). Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Baboukardos, Diogenis and Gunnar Rimmel. 2016. Value relevance under Integrated Reporting approach: A research note. *Journl of Accounting and Public Policy*. 437-451.
- Barth, Me., Beaver, W.H., Landsman, W.R., 2001. The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: another view. *J. Account. Econ.* 31 (1), 77–104.
- Barth, Me & McNichols, Mf, 1994. "Estimation And Market Valuation Of Environmental Liabilities Relating To Superfund Sites," *Journal of Accounting Research*, Wiley Blackwell, vol. 32, pages 177-209.
- Berthelot, Sylvie & Francoeur, Claude & Labelle, Réal. (2012). Corporate governance mechanisms, accounting results and stock valuation in Canada. *International Journal of Managerial Finance*.
- Cheng, M., Green, W., Conradie, P., Konishi, N., Romi, A., (2014). The international Integrated Reporting framework: key issues and future research opportunities. *J. Int. Financ. Manage. Account.* 25 (1), 90–119.

- Ching, H.Y., Gerab, F. and Toste, T. (2014), "Scoring sustainability reports using GRI indicators: a study based on ISE and FTSE4 good price indexes", *Journal of Management Research*, Vol. 6 No. 3, pp. 27-48.
- Cho, S.Y., Lee, C., Pfeiffer, R.J., 2013. Corporate social responsibility performance and information asymmetry. *J. Account. Public Policy* 32 (1), 71–83.
- Connelly, B.L., Certo, S.T., Ireland, R.D. and Reutzel, C.R. (2011), "Signaling theory: a review and assessment", *Journal of Management*, Vol. 37 No. 1, pp. 39-67.
- De Villiers, C., Rinaldi, L. and Unerman, J. (2014), "Integrated Reporting: insights, gaps and an agenda for future research", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 27 No. 7, pp. 1042-1067.
- Dionne, G. and Ouederni, K. (2011), "Corporate risk management and dividend", *Finance Research Letters*, Vol. 8 No. 4, pp. 188-195.
- Eccles, R., Ioannou, I. and Serafeim, G. (2012), "The impact of corporate sustainability on organisational processes and performance", *Nber Working Paper Series*, available at: [www.nber.org/papers/w17950.pdf](http://www.nber.org/papers/w17950.pdf).
- Elkington, J. (1994) *Towards the Sustainable Corporation Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development*. California Management Review
- Ernst and Young (2013). *Excellent in Integrated Reporting Awards 2013*. Ernst and Young. South Africa.
- Ettredge, M., Richardson, V., & Scholz, S. (2002). Dissemination of information for investors at corporate Web Sites. *Journal of Accounting & Public Policy*, 21, 357–369.
- FASB, (2000), *Electronic distribution of business reporting information*. Financial Accounting Standards Board (FASB), New York.
- Freeman, R.E. (1984) *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman, Boston
- Freeman, E. & McVea, J. (2001). A stakeholder approach to strategic management. in M. Hitt, E. Freeman, and J. Harrison (Eds.). *Handbook of Strategic Management*. Oxford: Blackwell Publishing
- Ghozali, Imam. (2013). *Multivariate Analysis Applications With IBM SPSS 21 Program Update PLS Regression*. Agency Publisher Diponegoro University. Semarang.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. "Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan", Jakarta : PT. Raja Grfindo Persada
- Hassel, Lars & Nilsson, Henrik & Nyquist, Siv. (2005). The Value Relevance of Environmental Performance. *European Accounting Review*. 14. 41-61
- Holthausen, RW, & Watts, RL (2001). The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting. *Journal of Accounting and Economics* 31, 3-75.
- IIRC and GRI (2013). *Memorandum of Understanding*. [pdf] 01 February 2013. Available at: [http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/02/MoU-IIRC-GRI-20130201-1.pdf?dm\\_i=4J5,1BERL,2NHPC,4GJ8M,1](http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/02/MoU-IIRC-GRI-20130201-1.pdf?dm_i=4J5,1BERL,2NHPC,4GJ8M,1) [Accessed 16 April 2014]
- Institute Of Directors. 2009. *King III report and code of governance for South Africa – 2009*. Available at: <http://african.ipapercms.dk/IOD/KINGIII/kingiiiireport/> [accessed 2012-10-16].
- Johnston, Peter. (2005). *Literacy Assessment and the Future*. Reading Teacher
- Koon, C.L. & Akbar, F. & Hughes, R. & Tyagi, Y.R. & Diaz, M. & Martin, S.C. & Hall, Peter & Snape, Colin. (2013). *Hughes et al 2000*. 10.13140/2.1.4755.8080.
- KPMG (2008) *KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008*
- Lourenco, IC, Callen, JL, Branco, MC, Curto, JD, 2014. The value relevance of reputation for sustainability leadership. *J. Bus. Ethics* 119 (1), 17-28.
- Martson, C., & Polei, A. (2004). Corporate reporting on the Internet by German companies. *International Journal of Accounting Information Systems*, 5, 285–311.
- Mavlanova, T., Benbunan-Fich, R. and Koufaris, M. (2012), "Signaling theory and Information asymmetry in online commerce", *Information & Management*, Vol. 43, pp. 240-247.

- Maubane, Pat & Prinsloo, Andre & Rooyen, Nadia. (2014). Sustainability reporting patterns of companies listed on the Johannesburg securities exchange. *Public Relations Review*.
- Pencle, N., Malaescu, I. (2016). What's in the Words? Development and Validation of a Multidimensional Dictionary for CSR and Application Using Prospectuses. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 13(2), 109-127
- Shaoul, J 1998, 'Critical financial analysis and accounting for stakeholders', *Critical Perspectives on Accounting*, vol. 9, no. 2
- Sinkin, Charlene & Wright, Charlotte & Burnett, Royce. (2008). Eco-efficiency and firm value. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Solomon, J., Maroun, W., 2012. *Integrated Reporting: The Influence of King III on Social, Ethical and Environmental Reporting* . The Association of Chartered Certified Accountants, London.
- Spence. M. (2002), "Signaling in retrospect and the informational structure of markets", *American Economic Review*, Vol. 92 No. 3, pp. 434-459.
- The International Integrated Reporting Council (2013). *The International Integrated Reporting Framework* . The IIRC. United of Kingdom .
- The International Integrated Reporting Council (2013). *Business and Investors Explore The Perspective of Integrated Sustainability Reporting*. The IIRC. United of Kingdom.
- Wells, J.D., Valacich, J.S. and Hess, T.J. (2011), "What signals are you sending? How website quality influences perceptions of product quality and purchase intentions", *MIS Quarterly*, Vol. 35 No. 2, pp. 373-383.

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WHISTLEBLOWING INTENTION MENGGUNAKAN GRAHAM'S MODEL

<sup>1</sup>Setyorini, <sup>2</sup>Donifaizal

<sup>1</sup>dhyah\_setyorini@uny.ac.id, <sup>2</sup>donifaizal05@gmail.com

Universitas Negeri Yogyakarta

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi niat whistleblowing. Penelitian ini menggunakan model graham yang terdiri dari masalah keseriusan, tanggung jawab pribadi, dan biaya pribadi untuk mengusulkan model teoritis untuk menjelaskan niat karyawan akuntansi untuk melakukan whistleblowing. Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner dengan populasi penelitian adalah pegawai akuntansi di beberapa bank BPR di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling dengan 61 responden. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk memverifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat melakukan whistleblowing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Persepsi masalah keseriusan tidak mempengaruhi niat whistleblowing; itu dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,505. (2) Persepsi tanggung jawab pribadi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat whistleblowing, dan itu dikonfirmasi oleh koefisien 0,054 dan nilai signifikansi 0,003. (3) Persepsi biaya pribadi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap niat whistleblowing; itu dibuktikan dengan nilai koefisien -0,377 dan nilai signifikansi 0,004.

Kata kunci: Minat, Modle Graham, Whistleblowing

### Abstract

*This research was aims to examine the effect of factors that influence the whistleblowing intentions. This research used a graham model which consists of problem seriousness, personal responsibility, and personal costs to propose a theoretical model to explain the intention of accounting employees to do whistleblowing. This research was a quantitative approach. The data used are primary data in the form of questionnaires with the research population was the employees of accounting at several BPR banks in Sleman district. This research uses a convenience sampling technique with 61 respondents. The analytical method used was Structural Equation Modeling (SEM) using Partial Least Square (PLS) to verify the factors that influence the intention to do whistleblowing. Results of this research show that: (1) Perception of the problem seriousness did not affect the whistleblowing intention; it is proved by the significance value 0.505. (2) Perception of personal responsibility has a significant positive effect on whistleblowing intentions, and it is confirmed by the coefficient 0.054 and the significance value 0.003. (3) Perception of personal cost has a significant negative effect on whistleblowing intentions; it is proved by the coefficient value of -0.387 and the significance value of 0.004.*

*Keywords: Intention, Graham model, Whistleblowing*

### 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Berbagai macam kasus kecurangan akuntansi yang terjadi saat ini seperti skandal Garuda Indonesia, Jiwasraya, SNP Finance, British Telecomm menjadi peringatan profesi akuntan mengalami krisis. Berbagai macam skandal tersebut terkait erat dengan etika akuntan profesional. Masalah etika dalam akuntansi menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan. Kepercayaan publik akan hilang dengan adanya praktik pelanggaran moral yang dilakukan oleh akuntan baik akuntan publik, akuntan manajemen maupun akuntan pemerintahan. Akuntansi dan praktik pengauditan berkontribusi besar dalam pelanggaran yang terjadi di perusahaan (Liyanarachchi dan Adler, 2011) sehingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan perilaku etis profesi akuntan semakin menurun.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, khususnya terkait pencegahan kecurangan akuntansi, adalah dengan melakukan *whistleblowing* (Merdikawati, 2012). *Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun nonaktif mengenai

pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Khan, 2009). *Whistleblowing* sering kali dikaitkan dengan profesi akuntan, mengingat sebagai seorang akuntan seharusnya memiliki keberanian untuk mengungkapkan kecurangan yang ada walaupun harus menghadapi berbagai risiko. *Whistleblowing* harus menjadi bagian dari budaya organisasi yang sehat. Oleh karena itu pendidikan tentang etika profesi akuntan seharusnya dimulai sejak perguruan tinggi sebagai pencetak akuntan profesional. Namun sayangnya riset tentang *whistleblowing* dengan sampel mahasiswa menunjukkan hasil bahwa profesi norma subyektif, sikap pada perilaku dan persepsi kontrol perilaku tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan (*whistleblowing*) (Ristiyana, 2014). Seorang akuntan yang memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan etika profesi akan menghindari tindakan pelanggaran atau perbuatan ilegal. Akuntan profesional yang mengetahui bahwa suatu tindakan yang terjadi di dalam organisasi tidak sesuai etika pasti akan mendukung pelaporan perbuatan ilegal atau pelanggaran etika (*whistleblowing*) di lingkungan organisasi tersebut. Secara umum, seseorang yang melakukan tindakan *whistleblowing* disebut dengan *whistleblower*. Tindakan yang dilakukan oleh *whistleblower* tersebut sebenarnya dapat menguntungkan organisasi, yaitu dengan menyelamatkan reputasi atau nama baik organisasi tersebut dan juga menghindari terjadinya peristiwa lain yang berdampak lebih buruk bagi organisasi.

Menjadi seorang *whistleblower* bukanlah hal yang mudah. Seorang *whistleblower* membutuhkan keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan seorang *whistleblower* tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan terror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaannya (Sulistomo, 2011). Cythia Cooper, Sherron Watkins dan Coleen Rowley adalah beberapa nama *whistleblower* terkenal yang mendapatkan penghargaan atas usaha keras mereka dalam mengungkapkan kecurangan dalam organisasi mereka (Near & Miceli, 1985). Mereka adalah orang-orang yang berani mengambil resiko pribadi yang tinggi demi mengungkapkan kecurangan perusahaan tempat mereka bekerja sebelum adanya peraturan “*Sarbanes Oxley Act*”, yaitu peraturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk memberikan perlindungannya kepada *whistleblower*.

Selain di dunia internasional, kasus yang melibatkan *whistleblower* juga terjadi di Indonesia. Kasus besar yang membawa nama mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (BARESKRIM) yaitu Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Susno Duaji. Susno menjadi seorang *whistleblower* dalam pengungkapan terjadinya skandal rekayasa perkara pembebasan Gayus Tambunan yang terjerat kasus korupsi dan pencucian uang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Upaya pelaporan internal yang dilakukan Susno ke atasan dan koleganya tidak membuahkan hasil yang memuaskan sehingga mendorong Susno untuk melakukan *whistleblowing* ke luar organisasi yakni ke media massa dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Kasus yang mengangkat *whistleblower* juga terjadi di kalangan pemerintahan Negara Indonesia. Seperti kasus yang melibatkan mantan Koordinator Anggaran Komisi X DPR RI yaitu Muhammad Nazaruddin pada tahun 2011. Nazar terlibat dalam kasus korupsi Proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat dan kemudian kemudian ditangkap oleh KPK karena terbukti menerima dan membagi-bagikan uang untuk melancarkan proyek Hambalang (Fachrul Khairuddin, 2011). Nazar mengungkapkan berbagai aktifitas korupsi yang melibatkan kalangan politik seperti Menpora, Ketua Umum Partai Demokrat, serta para Anggota DPR RI pada saat itu. Tanpa informasi yang memadai laporan pelanggaran akan sulit untuk ditindaklanjuti (KNKG, 2008).

Meskipun kasus *whistleblowing* mulai terbuka di Indonesia, namun masih ditemukan beberapa hal yang menjadi hambatan berkembangnya budaya *whistleblowing*. Hambatan atau masalah tersebut terkait dengan perlindungan saksi dan korban sebagai pengungkap fakta (*whistleblower*) di Indonesia. Pertama, belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin

perlindungan terhadap whistleblower, undang-undang yang ada masih bersifat umum terhadap saksi, pelapor dan korban. Kalau pun ada hanya berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (“SEMA”) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (WhistleBlower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI, KPK RI, Kejaksaan RI, Polri, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Kedua, belum adanya pemahaman dan perspektif bersama aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap whistleblower, kesepakatan bersamahnya di tingkat atasan, dan belum tersosialisasi di tingkat bawah maupun daerah. Ketiga, belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap whistleblower. Hal ini karena Hakim masih mengabaikan rekomendasi aparat penegak hukum terhadap status seseorang sebagai whistleblower. Ini juga disebabkan SEMA sifatnya tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Sejumlah penelitian mengenai intensi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* telah dilakukan baik di luar maupun dalam negeri. Shawver (2011) melakukan penelitian mengenai intensi melakukan *whistleblowing* pada orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan, manajemen, analis, konsultan dan internal auditor melalui faktor-faktor penentu pengambilan keputusan moral. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah identifikasi masalah etika, alasan untuk membuat pertimbangan moral dan motivasi seseorang untuk memilih melakukan tindakan *whistleblowing*. Schultz et al. (1993) dan Kaplan dan Whitecotton (2001) telah menguji pengaruh tiga komponen dari Graham (1986) terhadap niat *whistleblowing*. Schultz et al. (1993) menyelidiki tanggapan manajer dan staf profesional di Perancis, Norwegia, dan Amerika terhadap enam situasi *whistleblowing* tentang penilaian tindakan tidak etis atasan dengan pendekatan model Graham (1986). Subjek dari tiga negara berbeda pada indeks jarak kekuasaan *Hofstede* dan penghindaran ketidakpastian. Subjek Prancis mendapat skor lebih tinggi pada jarak daya dan penghindaran ketidakpastian dibandingkan Norwegia dan Amerika. Hasil menunjukkan bahwa model Graham berguna dalam memahami kecenderungan pelaporan. Subjek Norwegia mengandalkan persepsi keseriusan masalah, atribusi tanggung jawab pribadi, dan biaya pribadi yang dirasakan ketika memutuskan apakah akan melaporkan tindakan yang tidak etis. Subjek Amerika mengandalkan tanggung jawab pribadi dan biaya ketika melaporkan (Schultz, 1993). Model Graham (1986) memberikan penjelasan tentang perilaku pelaporan individu dan telah terbukti bermanfaat dalam memahami kecenderungan pengaduan individu (misalnya Schultz, Johnson, Morris, & Dyrnes, 1993; Kaplan & Whitecotton, 2001). Model Graham (1986) menunjukkan jalur keputusan individu untuk melaporkan tindakan yang tidak etis. Tindakan yang tidak etis didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar standar keadilan, kejujuran atau ekonomi (Schultz, et al., 1993). Model Graham memprediksi bahwa kemungkinan melaporkan perilaku tidak etis dalam suatu organisasi meningkat dengan persepsi pengamat tentang keseriusan ketidakteraturan dan atribusi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan, dan berkurang dengan biaya pribadi yang dirasakan (Graham, 1986). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi niat seseorang melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini juga menggunakan model Graham (1986).

## 2. LITERATUR REVIU DAN HIPOTESIS PENELITIAN

### 2.1 Whistleblowing

*Whistleblowing* merupakan suatu pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi atas suatu praktik ilegal, tidak bermoral, atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan (Near dan Miceli, 1985). Park dan Blenkinsopp (2009) menyatakan bahwa terdapat berbagai cara bagi individu untuk melakukan *whistleblowing*. Lebih lanjut penelitian

tersebut mengungkapkan tentang tipologi *whistleblowing* yang didasarkan pada tiga dimensi, yaitu formal atau informal, teridentifikasi atau anonym, dan internal atau eksternal. Gobert dan Punch (2000) mengartikan pelapor kecurangan (*whistleblower*) sebagai individu dalam sebuah organisasi yang mengungkap informasi negatif tentang organisasi, praktik-praktik organisasi atau personel-personel organisasi. Seorang *whistleblower* memiliki empat karakteristik, yang pertama, *whistleblower* adalah karyawan atau mantan karyawan organisasi, dimana tempat karyawan tersebut bekerja melakukan pelanggaran. Kedua, *whistleblower* tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau menghentikan pelanggaran yang berada dibawah kendalinya. Ketiga, *whistleblower* diperbolehkan membuat atau tidak diperbolehkan membuat laporan. Keempat, *whistleblower* tidak memegang posisi yang mensyaratkan untuk melakukan pelaporan pelanggaran (Near dan Miceli, 1985).

Di Indonesia, istilah *whistleblower* seringkali disamakan dengan istilah saksi, tetapi saksi dan *whistleblower* berbeda. Untuk dijadikan sebagai *whistleblower* saksi tersebut setidaknya memiliki dua kriteria mendasar (Semendawai & Abdul Haris, 2011). Pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau publik yang diharapkan agar tindakan tidak etis tersebut dapat dibongkar. Kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja. Dengan demikian, seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu tindakan tidak etis dalam sebuah kelompok baik di pemerintahan, perusahaan, maupun institusi publik lainnya.

Peraturan tentang *whistleblowing* dirumuskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) yang menjamin tentang keamanan dan perlindungan hukum, perlindungan saksi dan pelapor dari ancaman fisik, ancaman terhadap keluarga dan harta benda. Pada perumusan undang-undang tersebut, *whistleblower* hanya dianggap sebagai saksi. Hal ini membuktikan bahwa memang belum ada peraturan yang secara hukum merumuskan tentang *whistleblowing*. Mahkamah Agung membuat suatu keputusan yang membahas *whistleblowing* secara khusus. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* merupakan saksi pelapor yang mana individu tersebut adalah pihak yang mengetahui secara langsung tindakan pidana tertentu dan melaporkan tindakan tersebut. Menteri Hukum dan HAM, jaksa Agung, kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuat peraturan bersama mengenai *whistleblower*. Peraturan bersama tersebut mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku bekerjasama.

## 2.2 Niat (Intention)

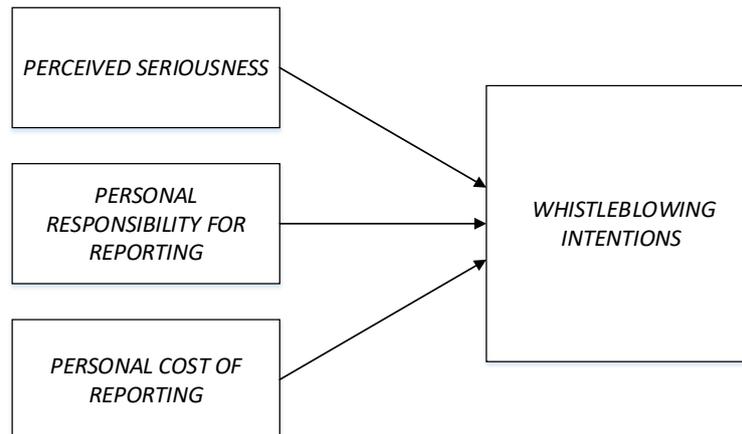
Niat (intention) adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam diri setiap individu. Ada beberapa definisi niat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah pernyataan Ajzen (1991) sebagai berikut:

*“We have defined intention as a person location on a subjective probability dimension involving a relation between himself and some action. Behavioral intention, therefore, refers to a person’s subjective probability that he will perform some behavior.”*

Ajzen (1991) mengartikan intensi sebagai disposisi tingkah laku yang hingga terdapat waktu dan kesempatan yang tepat, akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Sejalan dengan definisi tersebut, Feldman (1995) menyatakan intensi adalah rencana atau resolusi individu untuk melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan sikap mereka. Intensi akan terwujud dalam perilaku yang sebenarnya, jika individu mempunyai kesempatan yang baik dan waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Selain itu, intensi tersebut akan dapat memprediksi tingkah laku jika diukur dengan tepat. Niat erat hubungannya dengan motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jika tindakan tersebut dilakukan terus menerus oleh seseorang maka akan dapat menciptakan suatu pribadi dengan perilaku yang dilakukannya secara terus menerus tersebut.

### 2.3 Graham's Model of Principled Organizational Dissent

Model Graham (1986) memberikan penjelasan tentang perilaku pelaporan individu dan telah terbukti bermanfaat dalam memahami kecenderungan pengaduan individu (misalnya Schultz et al, 1993; Kaplan & Whitecotton, 2001). Model Graham (1986) menunjukkan jalur keputusan individu untuk melaporkan tindakan yang tidak etis. Tindakan yang tidak etis didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar standar keadilan, kejujuran atau ekonomi (Schultz, et al., 1993). Model Graham memprediksi bahwa kemungkinan melaporkan perilaku tidak etis dalam suatu organisasi meningkat dengan persepsi pengamat tentang keseriusan masalah dan atribusi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan, serta berkurang dengan biaya pribadi yang dirasakan (Graham, 1986).



Gambar 1. Graham's Model of Principled Organizational Dissent  
Sumber : Graham (1986)

#### a) Perceived Seriousness

Komponen pertama dari model Graham (1986) adalah persepsi keseriusan masalah. Keseriusan masalah dapat diukur dengan beberapa cara; misalnya dampak moneter, ancaman untuk menyebabkan kerugian, hasil negatif dan, frekuensi terjadinya kesalahan (Graham, 1986). Jumlah orang lain yang dianggap mengetahui tentang masalah ini cenderung mengurangi keseriusan masalah yang dirasakan (Graham, 1986). Selain itu, beberapa orang secara sistematis melebih-lebihkan bukti objektif dibandingkan dengan pengamat lain, dan efeknya cenderung meningkatkan keseriusan masalah yang dirasakan (Graham, 1986, hal. 39). Hooks, Kaplan, Schultz, dan Ponemon (1994), Dirsmith dan Covalleski (1985), dan McNair (1991) menemukan faktor yang memengaruhi persepsi keseriusan masalah. Hooks et al. (1994) merangkum temuan penelitian *whistleblowing* dan menyarankan bahwa pengaruh sosial seperti norma kelompok dan toleransi organisasi untuk melakukan kesalahan dapat memainkan peran dalam persepsi individu tentang keseriusan tindakan tidak etis. Demikian pula, budaya organisasi dalam kantor akuntan publik dapat mempengaruhi persepsi keseriusan (Dirsmith & Covalleski, 1985; McNair, 1991). Blaise & Walfried (2013) menunjukkan bahwa tanggungjawab untuk melaporkan secara positif dipengaruhi oleh tingkat idealisme pribadi seseorang. Tanggung jawab untuk melaporkan secara signifikan mempengaruhi niat *whistleblowing* dan persepsi keseriusan masalah memengaruhi *whistleblowing* secara tidak langsung melalui perasaan tanggung jawab untuk melaporkan.

Model Graham (1986) mengusulkan bahwa persepsi keseriusan masalah mempengaruhi pelaporan kesalahan. Graham (1986) menyatakan bahwa persepsi keseriusan masalah berkaitan dengan penilaian individu terhadap tingkat keparahan tindakan meragukan yang diamati. Persepsi keseriusan masalah dievaluasi berdasarkan karakteristik masalah, potensi bahaya dan hasil negatif (Curtis, 2006). Persepsi keseriusan masalah mirip dengan teori

intensitas moral (Jones, 1991) yang mengusulkan bahwa besarnya konsekuensi mempengaruhi pengambilan keputusan etis individu. Persepsi keseriusan masalah juga dapat disamakan dengan konsep materialitas, yang mempengaruhi penilaian karyawan akuntansi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian pertama adalah:

**H1: Persepsi keseriusan masalah berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing***

*b) Personal Responsibility for Reporting*

Persepsi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan adalah komponen kedua dari model Graham (1986). Rasa tanggung jawab sosial pribadi adalah hasil dari perkembangan moral kognitif dan pembelajaran sosial (Graham, 1986). Ini dapat dipertahankan dengan internalisasi etika profesional tanggung jawab sosial (Graham, 1986). Jumlah pengamat lain dan sejauh mana paparan terhadap masalah prinsip keduanya cenderung mengurangi tanggung jawab pribadi (Graham, 1986). Juga, *whistleblowing* kadang-kadang ditentukan sebagai bagian dari tanggung jawab peran individu (Miceli dan Near, 1984). Brabeck (1984) telah mendukung bahwa *whistleblower* internal (*whistleblower* yang menggunakan saluran organisasi internal) memang memiliki tingkat penalaran moral yang lebih tinggi daripada pengamat yang tidak aktif. Riset Alleyne, Wayne, Broome & Amanda (2017) menunjukkan bahwa tanggung jawab pribadi dan biaya pribadi ketika melaporkan secara signifikan memengaruhi niat *whistleblowing* internal, sedangkan biaya pribadi memengaruhi niat *whistleblowing* eksternal.

Model Graham (1986) mengusulkan konsep tanggung jawab pribadi memiliki pengaruh pada pelaporan kesalahan. Tanggung jawab pribadi untuk melaporkan berasal dari tanggung jawab yang ditentukan individu untuk melaporkan tindakan meragukan yang diamati (Kaplan dan Whitecotton, 2001). Hal ini diyakini bahwa individu yang mengamati kesalahan dapat didorong untuk melaporkan kejadian berdasarkan pada beberapa rasa kewajiban moral atau bagian dari deskripsi pekerjaan seseorang atau tanggung jawab peran (Curtis, 2006).

Kaplan dan Whitecotton (2001) menemukan hubungan yang kuat dan positif antara tanggung jawab pribadi untuk melaporkan dan mengaudit niat senior untuk melaporkan tindakan yang dapat dipertanyakan. Dalam sebuah penelitian terhadap mahasiswa akuntansi tingkat senior, Curtis (2006) melaporkan hubungan yang kuat dan positif antara tanggung jawab pribadi yang dirasakan dan melaporkan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang kedua adalah:

**H2: Persepsi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing***

*c) Personal Cost of Reporting*

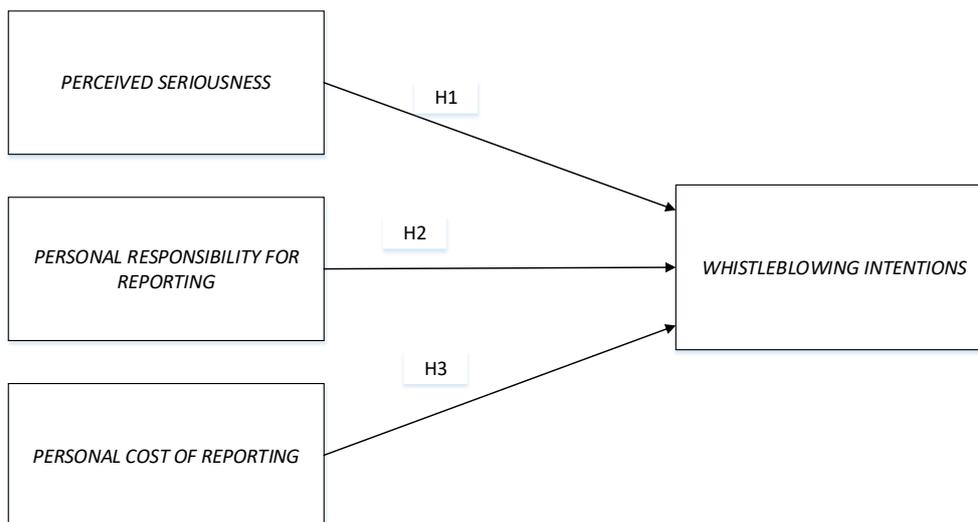
Komponen ketiga dan terakhir dari model Graham (1986) adalah biaya pribadi ketika melaporkan. Biaya pribadi utama adalah risiko pembalasan dari orang-orang di organisasi yang menentang tindakan pelaporan (Graham, 1986, hal. 41). Budaya organisasi yang mendorong inovasi peran, pemikiran dan tindakan independen, partisipasi luas, dan termasuk asumsi epistemologis yang mendukung eksperimen dan pembelajaran berkelanjutan akan mengurangi risiko pembalasan yang dirasakan (Graham, 1986). Lebih konkret, biaya pribadi berkurang di mana bantuan dalam persiapan dan presentasi argumen kritis disediakan dalam mekanisme perbedaan pendapat formal dan di mana jaminan terhadap pembalasan juga ada (Graham, 1986). Mendukung pendapat Graham, Ponemon (1994) mengemukakan bahwa, sifat dan tingkat pembalasan atau sanksi yang dijatuhkan oleh manajemen atau rekan kerja terhadap pelapor mungkin merupakan penentu paling signifikan terhadap keputusan calon pelapor dalam menyampaikan kesalahan organisasi (Ponemon, 1994).

Graham (1986) mengusulkan bahwa biaya pribadi ketika melaporkan mempengaruhi niat *whistleblowing*. Biaya pribadi mengacu pada konsekuensi negatif (misalnya risiko pembalasan dari rekan kerja dan manajemen) yang mungkin dihadapi seseorang ketika

melaporkan tindakan meragukan yang diamati (Graham, 1986; Ponemon, 1994). Luas dan sifat biaya pribadi seperti sanksi dan pembalasan dari manajemen dan rekan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari para pelapor potensial (Ponemon, 1994; Alleyne et al., 2013). Penelitian sebelumnya telah menemukan dukungan untuk pengaruh biaya pribadi pada niat *whistleblowing*, di mana niat pelaporan individu diturunkan ketika biaya pribadi yang dirasakan tinggi (Schultz et al., 1993; Kaplan dan Whitecotton, 2001; Curtis, 2006). Persepsi biaya pribadi dari *whistleblowing* juga tergantung pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kemungkinan reaksi manajerial (Miceli et al., 2008). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

**H3: Persepsi biaya pribadi ketika melaporkan berpengaruh negatif terhadap niat *whistleblowing***

### 3. MODEL PENELITIAN



Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini adalah Karyawan Akuntansi Bank Pengkreditan Rakyat di Kabupaten Sleman. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *convenience sampling*. Jumlah minimum sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 5 sampai dengan 10 kali dari jumlah variabel penelitian (Hair et al, 2010). Jadi perhitungan jumlah minimum sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini minimum sampel yaitu 40 sampel (4x10).

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Teknik kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data primer dari para responden karyawan akuntansi Bank Pengkreditan Rakyat di kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pembuatan kuesioner yang didistribusikan ke berbagai BPR di wilayah Kabupaten Sleman. Kuisisioner terdiri dari beberapa bagian. Responden diminta untuk merefleksikan kegiatan dalam organisasi mereka di mana mereka saat ini dipekerjakan ketika menjawab pertanyaan. Bagian pertama adalah mengenai data pribadi responden yang dikumpulkan seperti gender, usia, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Bagian kedua adalah beberapa indikator untuk menguji variabel penelitian dengan *skala Likert* yang dimodifikasi tanpa pilihan netral untuk menghindari jawaban atau sikap yang ragu-ragu. Jawaban yang diberikan pada setiap indikator dari 1 dengan tanggapan Sangat Tidak Setuju (STS) sampai 4 dengan tanggapan Sangat Setuju (SS).

Data penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Metode deskriptif ialah metode analisis untuk menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas (Sugiyono, 2014). Metode ini dilakukan untuk memastikan dan menggambarkan karakteristik variabel dalam sebuah situasi (Sekaran, 2003) dan karakteristik responden dalam penelitian. Sementara untuk pengujian hipotesis menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan alat ukur *Partial Least Square* (PLS). Menurut Wold dalam buku Ghozali (2014), Analisis PLS-SEM melalui dua tahap, yaitu pertama, model pengukuran (*Outer Model*) yaitu mengukur apakah *observed variable* merepresentasi variabel laten untuk diukur. Kedua, model struktural (*Inner Model*) yaitu mengukur kekuatan estimasi antar variabel laten.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden dari penelitian ini adalah karyawan akuntansi yang bekerja di BPR se-kabupaten Sleman sebanyak 61 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini menjelaskan profil responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, dan jabatan, sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Profil Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	21	34%
Perempuan	40	66%
Jumlah	61	100%
Usia	Jumlah	Persentase
< 30 tahun	33	54%
30-40 tahun	24	39%
> 40 tahun	4	7%
Jumlah	61	100%
Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	0	0%
S1	61	100%
S2	0	0%
S3	0	0%
Lainya	0	0%
Jumlah	61	100%
Pengalaman Kerja	Jumlah	Persentase
< 5 tahun	41	67%
5-10 tahun	18	30%
> 10 tahun	2	3%
Jumlah	61	100%

Sumber: data primer, diolah 2019

##### 4.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil analisis deskriptif variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2  
Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Niat Whistleblowing	61	2.28	4	3.22	0.61
Personal Cost	61	1	4	2.52	0.94
Seriousness	61	1	4	2.67	0.63

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
<i>Responsibility</i>	61	2	4	2,78	0.33

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel penelitian yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan variabel niat *whistleblowing* rata-rata memiliki penilaian tinggi dengan nilai sebesar 3.22 dan standar deviasi 0.61. Berdasarkan nilai rata-rata maka dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata responden menilai sangat setuju terhadap variabel niat *whistleblowing*. Sementara, nilai standar deviasi dapat diinterpretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel niat *whistleblowing* sebesar 0.61 dari 62 responden. Untuk variabel *personal cost* rata-rata memiliki penilaian yang tinggi dengan nilai sebesar 2.52 dan standar deviasi 0.94. Berdasarkan nilai rata-rata maka dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata responden menilai setuju terhadap variabel *personal cost*. Sementara, nilai standar deviasi dapat diinterpretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel *personal cost* sebesar 0.94 dari 62 responden. Adapun variabel *seriousness* rata-rata memiliki penilaian yang tinggi dengan nilai sebesar 2.67 dan standar deviasi 0.63. Berdasarkan nilai rata-rata maka dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata responden menilai setuju terhadap variabel *seriousness*. Sementara, nilai standar deviasi dapat diinterpretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel *seriousness* sebesar 0.63 dari 62 responden. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel *responsibility* rata-rata memiliki penilaian yang tinggi dengan nilai sebesar 2,78 dan standar deviasi 0.33. Berdasarkan nilai rata-rata maka dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata responden menilai setuju terhadap variabel *responsibility*. Sementara, nilai standar deviasi dapat diinterpretasikan bahwa ukuran penyebaran data variabel *responsibility* sebesar 0.33 dari 61 responden.

#### 4.2 Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis menggunakan PLS dilakukan melalui dua tahap yaitu uji model pengukuran dan uji model struktural. Pada uji model pengukuran terdiri dari dua tahapan, yaitu menguji validitas dan menguji reliabilitas. Uji validitas konstruk dengan PLS dilakukan dengan analisis validitas konvergen dan validitas diskriminan (Ghozali, 2014). Validitas konvergen dari model pengukuran dengan indikator refleksi dapat dilihat dari nilai AVE. Semua variable penelitian ini menunjukkan validitas konvergen yang baik karena semua nilai AVE lebih dari 0.5.

Tabel 4.3  
Nilai AVE

Variabel	AVE	Keterangan
Niat <i>Whistleblowing</i> (N)	0.539	valid
<i>Personal Cost</i> (P)	0.527	valid
<i>Seriousness</i> (S)	0.724	valid
<i>Responsibility</i> (R)	0.638	valid

Sumber: data primer, diolah 2019

Validitas diskriminan indikator refleksi dapat dilihat dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dikatakan memiliki validitas diskriminan baik jika nilai akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya (Ghozali, 2014). Hasil uji validitas diskriminasi disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.4  
 Nilai *Corelations of Latent Variable (Fornell-Larcker Criterion)*

	ATB	BI	FR	PBC	Keterangan
N	0.734				Valid
P	-0.492	0.726			Valid
R	0.496	-0.415	0.851		Valid
S	-0.191	0.505	-0.223	0.799	Valid

Sumber: data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 3 dan 4 di atas dapat disimpulkan bahwa akar AVE pada seluruh konstruk lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk. Sebagai contoh, pada konstruk niat *whistleblowing* memiliki nilai AVE 0.539 dan akar AVE 0.734. Nilai akar AVE ini lebih tinggi dibandingkan koefisien korelasi pada variabel niat *whistleblowing* yang memiliki rentang nilai antara -0.492 sampai -0.191. Dapat disimpulkan, variabel niat *whistleblowing* memiliki tingkat validitas diskriminasi yang baik dan dinyatakan valid. Demikian juga untuk variabel yang lainnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki validitas cukup tinggi.

#### 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Berikut nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* disajikan pada tabel 5 berikut ini

Tabel 5. Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Niat <i>Whistleblowing</i> (N)	0.853	0.889	Reliabel
<i>Personal Cost</i> (P)	0.842	0.884	Reliabel
<i>Seriousness</i> (S)	0.804	0.886	Reliabel
<i>Responsibility</i> (R)	0.889	0.894	Reliabel

Sumber: data primer, diolah 2019

Hasil dari *composite reliability* dan *cronbach alpha* pada tabel 5 yang dihasilkan semua konstruk sangat baik, yaitu di atas 0.70. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.

#### 4.4 Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

##### 4.4.1 *Goodness-fit model*

Pengujian *goodness-fit model* diuji dengan melihat hasil nilai *R-square*. Hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat satu nilai *R-square* yang ada dalam penelitian ini yaitu nilai *R-square* dari variabel Niat *Whistleblowing* (N), dimana nilai *R-square* yang didapat yaitu sebesar 0.350 atau tergolong lemah. Artinya bahwa varians dari variabel Niat *Whistleblowing* (N) mampu dijelaskan oleh variabel dalam model sebesar 35% dan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

##### 4.4.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian selanjutnya ialah dengan melihat signifikansi pengaruh antar variabel pada *path coefficeints*. Hasil dari pengolahan data disajikan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Hasil *Path Coeffisiens*

Hipotesis	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
1	0,083	0.668	0,505	Tidak diterima
2	0,354	3.031	0,003	Diterima
3	-0.387	2.899	0,004	Diterima

Sumber: data primer, diolah 2019

Hasil uji pada tabel 6 pengujian *inner model* menunjukkan bahwa terdapat dua hipotesis diterima dengan nilai *p-values*  $< 0.05$ . Dapat dilihat dari perhitungan *p-values* tersebut bahwa hipotesis *personal cost* dan *responsibility* terhadap niat *whistleblowing* memiliki nilai yaitu 0.004 dan 0.003 yang berarti memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, terdapat satu hipotesis yang tidak diterima karena nilai *p-values*  $> 0.05$ , variabel tersebut ialah *seriousness*. Pada hasil *path coefficients* menunjukkan pengaruh persepsi keseriusan masalah terhadap niat *whistleblowing* memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0.083, nilai ini berarti variabel terdapat pengaruh yang positif dan nilai *p-values* sebesar 0.505  $> 0.05$  menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, variabel persepsi keseriusan masalah tidak memiliki pengaruh terhadap niat *whistleblowing*.

Dalam penelitian ini hipotesis pertama ditolak. Persepsi keseriusan masalah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Hal ini berdasarkan nilai koefisien parameter sebesar 0.083 dan nilai *p-values* sebesar 0.505  $> 0.05$ . Artinya persepsi responden mengenai keseriusan masalah yang terjadi tidak mempengaruhi niat responden tersebut untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alleyne et al (2017) yang menyatakan bahwa bahwa persepsi keseriusan masalah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Seperti yang disarankan oleh Kaplan dan Whitecotton (2001), karakterisasi keseriusan cenderung ambigu. Oleh karena itu, keseriusan yang dirasakan dapat berbeda tergantung pada responden dan dengan ekstensi, dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya. Keseriusan itu sendiri mungkin tidak cukup mempengaruhi niat *whistleblowing* seseorang, karena pengaruh faktor-faktor seperti norma kelompok dan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang keseriusan masalah (Hooks et al., 1994; Kaplan dan Whitecotton, 2001; Curtis, 2006).

Sementara pada hasil *path coefficients* menunjukkan pengaruh persepsi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan terhadap niat *whistleblowing* memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0.354, nilai ini berarti variabel terdapat pengaruh yang positif dan nilai *p-values* sebesar 0.003  $< 0.05$  menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, variabel persepsi tanggung jawab pribadi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Hasil pengujian hipotesis diterima. Artinya, persepsi tanggung jawab pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Hipotesis ini didukung dengan nilai koefisien parameter sebesar 0.354 dan nilai *p-values* sebesar 0.003  $< 0.05$ . Hipotesis kedua menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi tanggung jawab pribadi seseorang maka semakin tinggi pula niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alleyne et al (2017) yang menyatakan bahwa bahwa persepsi tanggung jawab pribadi untuk melaporkan berpengaruh positif signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Hasil ini juga konsisten dengan temuan Schultz et al. (1993), Kaplan dan Whitecotton (2001) dan Curtis (2006). Dapat dikatakan bahwa, responden menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka untuk melaporkan pelanggaran didalam perusahaan dan berusaha untuk tidak menghindari atau mengabaikan bukti pelanggaran tersebut.

Demikian juga dengan hasil *path coefficients* menunjukkan pengaruh persepsi biaya pribadi ketika melaporkan terhadap niat *whistleblowing* memiliki nilai koefisien parameter sebesar -0.387, nilai ini berarti variabel terdapat pengaruh yang negatif dan nilai *p-values* sebesar 0.004  $< 0.05$  menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, variabel persepsi biaya pribadi ketika melaporkan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa persepsi biaya pribadi ketika melaporkan berpengaruh negatif terhadap niat *whistleblowing* (nilai koefisien parameter sebesar -0.387 dan nilai *p-values* sebesar 0.004  $< 0.05$ ). Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi persepsi biaya pribadi ketika melaporkan maka akan mengurangi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alleyne et al (2017) yang menyatakan bahwa biaya pribadi secara signifikan

mempengaruhi niat *whistleblowing*. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti bahwa biaya pribadi yang tinggi dapat menghasilkan niat *whistleblowing* yang lebih rendah (Graham, 1986; Schultz et al., 1993; Kaplan dan Whitecotton, 2001; Curtis, 2006). Dalam contoh ini, karyawan akuntansi takut menjadi korban, diejek, dilecehkan atau diintimidasi oleh orang yang melakukan kesalahan dalam manajemen.

## 5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis kedua dan ketiga didukung. Adapun hipotesis pertama ditolak. Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan seperti penggunaan teknik *convenience sampling* diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik sampling yang lebih baik dengan jangkauan yang lebih luas. Penggunaan kuesioner hanya menggambarkan pendapat karyawan akuntansi terhadap niat mereka untuk melakukan *whistleblowing*. Peneliti tidak dapat melihat niat yang sebenarnya dari responden. Triangulasi pengambilan data dapat digunakan untuk memberikan gambaran penelitian lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). "The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*" (50:2), pp. 179-211
- Alasmari, T. M. (2018). "Mobile Learning Technology Acceptance Among Saudi Higher Education Students."
- Alleyne, P., Soverall, W. C, Broome, T., & Pierce, A. (2017). "Perceptions, predictors and consequences of whistleblowing among accounting employees in Barbados". *Meditary Accountancy Research*, 25(2), 241- 267.
- Blaise & Walfried. (2013). "An Empirical Evaluation of Graham's Model of Principled Organizational Dissent in the Whistleblower Context Post-SOX". *Journal of Forensic & Investigative Accounting*. Vol. 5, No. 2
- Bungin, B. (2008). "Analisis data penelitian kualitatif". Jakarta: Rajawali Pers.
- Chambali. 2010. "Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk Melalui Agen Bank Syariah, IAIN Walisongo, Semarang". Tersedia di <http://library.walisongo.ac.id>
- Creswell, J. (2015). "Riset Pendidikan". Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Curtis, Mary B., (2006). "Are Audit-Related Ethical Decisions Dependent Upon Mood?" *Journal of Business Ethics*, 68 (2), 191-209
- Dirsmith, M. W., and M. A. Covalleski. (1985). "Informal Communications, Nonformal Communications and Mentoring in Public Accounting Firms", *Accounting, Organizations and Society*, May, pp. 149-169.
- Erkmen, Caliskan., Arzu Özsözgün Çalışkan, dan Esen Emel. 2014. "An Emperical Research about Whistleblowing Behavior in Accounting Context". *Journal of Accounting and Organizational Change*. Vol.10, No.2 : 229 - 243.
- Feldman, L. B., Frost, R. and Pnini, T. (1995). "Decomposing words into their constituent morphemes: Evidence from English and Hebrew." *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 21, 947-960.
- Ghozali, I. (2014). "Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0".
- Gobert, J. and Punch, M. (2000). Whistleblowers, The Public Interest and The Public Interest Disclosure Act 1998, *The Modern Law Review*.
- Hair, J. F., Black. W. C., Babin. B. J.; and Anderson. R. E. (2010). "Multivariate Data Analysis, 7th ed." Pearson Prentice Hall, New Jersey.

- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). "PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet". *The Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152.
- Hooks, K. L., Kaplan, S. E., Schultz, J. J., & Ponemon, L. A. (1994). "Enchancing Communication to Assist in Fraud Prevention and Detection". *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. 13 (2), 86-117.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1992). "Norma Pemeriksaan Akuntan". Jakarta : Rineka Cipta
- Jones, T. M.(1991). "Ethical Decision Making by Individuals in Organization: An Issue-Contingent Model" *Academy of Management Review*. 16, 366-395.
- Jubb, P. B. (2000). "Auditors as Whistleblowers". *International Journal of Auditing*. 4(2). 153-167.
- Khairuddin, Fachrul (2011). "Kronologi Kasus Korupsi Proyek Hambalang". Kompasiana. Dapat diakses pada <http://kompasiana.com>
- Khan, M.A. (2009). "Auditors and Whistleblowing Law". *Accountant Today*. April 2009, pp. 12- 14.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). "Pedoman Umum GCG Indonesia". Jakarta.
- Liyanarachchi, G. A., & Adler, R. (2011). "Accountants Whistle-Blowing Intentions: The Impact of Retaliation, Age, and Gender". *Australian Accounting Review*. Vol 21. No 57, 167-182.
- Merdikawati, Risti. (2012). "Hubungan Komitmen Profesi dan Sosialisasi Antisipatif Mahasiswa Akuntansi dengan Niat Whistleblowing". Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Mustapha, M and Ling Sing Siaw. (2012). "Whistle Blowing: Perceptions of Future Accountants". *International Conference on Economics Business Inovation*, Vol. 38, pp.135-139
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). "Whistleblowing in organizations". New York: Routledge
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). "Organizational dissidence: The case ofwhistle-blowing". *Journal of Business Ethics*.
- Park, H. and Blenkinsopp, J., (2009). "Whistleblowing As Planned Behavior – A Survey Of South Korean Police Officers". *Journal of Business Ethics*, 85 (4),
- Ponemon, L. A. (1994). "Whistleblowing as an Internal Control Mechanism: Individual and Organizational Consideration". *Auditing:A Journal of Practice & Theory*, 118–130.
- Ristiyan. (2014). "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Niat Untuk Mengungkapkan Kecurangan (Whistleblowing)". Skripsi. FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Ruiz Mafé, C., Sanz Blas, S., & Fernando Tavera-Mesías, J. (2010). "A comparative study of mobile messaging services acceptance to participate in television programmes". *Journal of Service Management*, 21(1), 69–102. <https://doi.org/10.1108/09564231011025128>
- Salisbury, W. D., Pearson, R. A., Pearson, A. W., & Miller, D. W. (2001). "Perceived Security and World Wide Web Purchase Intention". *Industrial Management & Data Systems*, 101(4), 165–177. <https://doi.org/10.1108/02635570110390071>
- Sekaran, U. (2003) "Research Methods for Business: A Skill-Building Approach". 4th Edition, John Wiley & Sons, New York.Sugiyono
- Semendawai, Abdul Haris, (2011). "Memahami Whistle Blower". Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Siti Shopia, Maharani (2013). "Perlindungan saksi dan korban sebagai Whistleblower". LPSK. Dapat diakses pada <http://lpsk.go.id>

- Schultz, Joseph, Johnson, Douglas, Morris, Deigan and Dyrnes, Sverre (1993). "An investigation of the reporting of questionable acts in an international setting". *Journal of Accounting Research*, 31, 75-103.
- Smith, Malcolm, Syahrul Ahmar Ahmad, Zubaidah Ismail, dan Rahimah M. Yunos (2012). "Internal Whistle-Blowing Intentions: A Study of Demographic and Individual Factors". *Journal of Modern Accounting and Auditing*. Vol.8 (11): 1632-1645
- Sugiyono. (2014). "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D."
- Sulistomo, Akmal. (2011). "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Undip dan UGM)". Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kaplan, S.E. and S.M. Whitecotton. (2001). "An Examination of Auditor's Reporting Intentions when Another Auditor is offered Client Employment", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 20, No. 1, pp. 45-63

## ANALISIS PENGARUH *FRAUD PENTAGON* TERHADAP *FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING* MENGGUNAKAN *BENEISH MODEL*

<sup>1</sup>Meiliana Jaunanda, <sup>2</sup>Cindy Tian, <sup>3</sup>Karina Edita, <sup>4</sup>Vivien

<sup>1</sup>meiliana.jaunanda@uph.edu, <sup>2</sup>Cindytiannn@gmail.com

<sup>3</sup>karinazhangg@gmail.com <sup>4</sup>vivienfang14@gmail.com

Universitas Pelita Harapan

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai analisis pengaruh *Fraud Pentagon* terhadap *Fraudulent Financial Reporting* dengan menggunakan *Beneish Model*. *Fraud Pentagon* merupakan variabel independen dalam penelitian ini, dimana *Financial Stability* diproksikan oleh *Asset Growth* (AGROW), *External Pressure* diproksikan oleh *Leverage* (LEV), *Opportunity* diproksikan oleh *Ineffective Monitoring* (BDOUT), *Related Party Transactions* (RPT), *Rationalization* diproksikan oleh *Total Accruals to Total Assets* (TATA), *Competence* diproksikan oleh *Change in Board of Director* (DCHANGE) dan yang terakhir *Arrogance* diproksikan oleh kepemilikan manajerial (OSHIP). Variabel dependen menggunakan *Fraudulent Financial Reporting* yang diukur menggunakan *Beneish Model*. Model ini menggunakan 8 (delapan) rasio perhitungan yaitu, *Days Sales in Receivable Index* (DSRI), *Gross Margin Index* (GMI), *Asset Quality Index* (AQI), *Sales Growth Index* (SGI), *Depreciation Index* (DEPI), *Sales and General Administration Expenses Index* (SGAI), *Leverage Index* (LVGI), dan *Total Accrual* (TATA). Objek penelitian merupakan perusahaan manufaktur periode 2015-2018 yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), sampel yang diambil untuk penelitian sebanyak 105 perusahaan yang didasarkan metode *Purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah (1) *Asset Growth* (AGROW) dan *Total Accruals to Total Assets* (TATA) berpengaruh signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*. (2) *Leverage* (LEV), *Ineffective Monitoring* (BDOUT), *Related Party Transactions* (RPT), *Change in Board of Director* (DCHANGE) dan Kepemilikan Manajerial (OSHIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

Kata kunci : *Beneish Model*, *Fraudulent Financial Reporting*, *Fraud Pentagon*, *Financial Stability*, *Purposive Sampling*.

### Abstract

This study discusses the analysis of the influence of *Fraud Pentagon* on *Fraudulent Financial Reporting* by using the *Beneish Model*. *Fraud Pentagon* as the independent variable in this study, consisting *Financial Stability* which is proxied by *Asset Growth* (AGROW), *External Pressure* is proxied by *Leverage* (LEV), *Opportunities* are proxied by *Ineffective Monitoring* (BDOUT), *Related Party Transactions* (RPT), *Rationalization* is proxied by *Total Accrual to Total Assets* (TATA), *Competence* is proxied by *Changes to the Board of Directors* (DCHANGE) and finally *Arrogance* is proxied by managerial ownership (OSHIP). *Fraudulent Financial Reporting* as the dependent variable calculated using the *Beneish Model*. This model uses 8 (eight) calculation ratios, *Sales Days in the Receivables Index* (DSRI), *Gross Margin Index* (GMI), *Asset Quality Index* (AQI), *Sales Growth Index* (SGI), *Depreciation Index* (DEPI), *Sales and General Expenditure Administration Index* (SGAI), *Leverage Index* (LVGI), and *Total Accruals* (TATA). The object of research is the manufacturing companies for the year of 2015-2018 and included in the Indonesia Stock Exchange (IDX), the samples taken for the study are 105 companies using the *Purposive Sampling* method. The results of this study are (1) *Asset Growth* (AGROW) and *Total Accruals to Total Assets* (TATA) are significant towards *Fraudulent Financial Reporting*. (2) *Leverage* (LEV), *Ineffective Supervision* (BDOUT), *Related Party Transactions* (RPT), *Changes to the Board of Directors* (DCHANGE) and *Managerial Ownership* (OSHIP) have no significant effect on *False Financial Reporting*.

Keywords: *Beneish Model*, *Fraudulent Financial Reporting*, *Fraud Pentagon*, *Financial Stability*, *Purposive Sampling*.

## 1. PENDAHULUAN

Kinerja sebuah perusahaan tercermin dari laporan keuangan perusahaannya, dimana laporan keuangan dijadikan bahan tolak ukur oleh investor, pemegang saham, kreditur maupun bank dalam membuat keputusan. Laporan keuangan dilakukan secara berkala, menurut SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) No.1, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para investor dan

kreditor potensial dalam membuat keputusan yang rasional mengenai investasi, kredit, serta keputusan lain yang sejenis. Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pemegang kepentingan untuk mengambil keputusan dan laporan keuangan yang baik mencerminkan kinerja dari perusahaan yang baik pula sehingga dapat meyakinkan investor untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut.

Oleh karena pentingnya laporan keuangan bagi eksistensi sebuah perusahaan sehingga management berusaha untuk menyajikan laporan keuangan sebaik mungkin agar terlihat menarik bagi pengguna laporan keuangan dan tidak jarang management menyalahgunakan laporan keuangan sehingga menimbulkan fraud. Menurut (Karyono, 2013), fraud merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan melanggar hukum dengan tujuan untuk memberikan kekeliruan pada pihak lain yang dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak dalam perusahaan.

Beberapa faktor terjadinya fraud, menurut (Donald R. Cressey. 1950) 3 faktor utama terjadinya fraud disebut dengan fraud triangle yang terdiri dari pressure (tekanan) dimana keadaan finansial sebagai salah satu faktor untuk mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. opportunity (kesempatan) adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan seperti kurangnya pengendalian internal perusahaan dan Rationalization (rasionalisasi) merupakan aksi yang dilakukan oleh individu pelaku kecurangan untuk membenarkan tindakan yang telah mereka lakukan.

Seiring berjalannya waktu teori fraud mengalami perkembangan, oleh Donald R. Cressey menambahkan satu faktor, yaitu capability (kemampuan). Perbedaan kemampuan seseorang dalam perusahaan dapat memperluas akses yang dimiliki sehingga kapabilitas seseorang dalam kemampuannya melakukan kecurangan dalam perusahaan juga berbeda.

Lalu teori tersebut disempurnakan lagi oleh (Crowe. 2011) dinamakan Crowe's Fraud Pentagon Theory yaitu dengan menambahkan elemen arrogance (arogansi) dan competence (kompetensi) Sehingga, model fraud yang ditemukan oleh Crowe terdiri dari lima elemen indikator yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), rationalization (rasionalisasi), competence (kompetensi), dan arrogance (arogansi).

Kecurangan pada laporan keuangan dapat diukur menggunakan Beneish model. Beneish model merupakan model perhitungan yang membantu mendeteksi pergerakan yang tidak wajar pada laporan keuangan. Model ini menggunakan 8 (delapan) rasio perhitungan keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan perusahaan dalam melakukan manipulasi pendapatan pada laporan keuangan. Rasio tersebut meliputi, Days Sales in Receivable Index (DSRI), Gross Margin Index (GMI), Asset Quality Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), Depreciation Index (DEPI), Sales and General Administration Expenses Index (SGAI), Leverage Index (LVGI), dan Total Accrual (TATA). Jika hasil dari perhitungan Beneish model terindikasi  $< -2.22$ , maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak terindikasi fraud. Sedangkan, jika hasil dari perhitungan Beneish model terindikasi  $> -2.22$ , maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang terindikasi fraud.

Maraknya manipulasi yang melibatkan laporan keuangan perusahaan membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian terhadap perusahaan bidang manufaktur karena merupakan salah satu bisnis yang paling cepat berkembang. Laporan keuangan industri ini pun cukup kompleks, juga persaingan yang cukup ketat maka dapat memberikan tekanan berlebih terhadap manajemen sehingga menimbulkan kemungkinan melakukan manipulasi dan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan agar mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dimata investor.

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

(Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Menurut (Meisser, et al., 2006) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu (a) terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Endrianto, 2010). *Conflict of interest* terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, di mana *principal* menginginkan *agent* melakukan keinginannya. Sedangkan, *agent* ingin melakukan sesuatu untuk memaksimalkan utilitasnya. Teori keagenan mendorong timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Menurut (Ujiyanto & Pramuka, 2012), biaya keagenan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap *agent*, pengeluaran yang mengikat *agent* untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal*, dan adanya *residual lost* yaitu pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat perbedaan pengambilan keputusan oleh *agent* dan *principal*. Sehingga dapat disimpulkan keberadaan konflik keagenan ini dapat diminimalisir dengan menggunakan biaya keagenan (*agency cost*) dengan melakukan pengawasan terhadap manajer untuk mencapai tujuan perusahaan.

#### 2.1.1 Kecurangan (Fraud)

Istilah *fraud* dalam laporan keuangan telah dijelaskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada Pernyataan Standar Audit No. 16 dengan istilah penyimpangan (*irregularities*). Menurut pernyataan tersebut, penyimpangan menunjukkan pendistorsian secara sengaja terhadap laporan keuangan, seperti secara sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak benar (*misrepresentations*) oleh manajemen, seringkali disebut sebagai kecurangan pelaporan keuangan atau kecurangan manajemen. Kecurangan pelaporan keuangan didefinisikan sebagai usaha dengan sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak benar oleh manajemen, yang mengakibatkan adanya penyimpangan dari laporan keuangan.

#### 2.1.2 *Fraud Model*

Menurut (Donald Cressey, 1953) dalam risetnya menyimpulkan bahwa ada tiga kondisi yang menyebabkan kecurangan. Ketiga kondisi itu disebut dengan konsep *fraud triangle*. Ketiga kondisi tersebut terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (rasionalisasi). *Pressure* adalah adanya tekanan pada keadaan atau kondisi yang memaksa untuk melakukan kecurangan. Gaya hidup atau tuntutan ekonomi dan juga hal-hal yang termasuk dalam kondisi keuangan maupun non keuangan. Sedangkan, *opportunity* adalah keadaan dimana timbulnya kesempatan untuk melakukan suatu kecurangan. Yang terakhir, yaitu *rationalization* adalah suatu sikap atau tindakan untuk melakukan pembenaran diri dengan berbagai alasan untuk menutupi tindakan yang salah.

(Wolfe & Hermanson, 2004) menyempurnakan teori Cressey *Fraud Triangle* (1953) menjadi *Fraud Diamond Model* dengan menambahkan faktor *capability* (kapabilitas) yang berperan sebagai unsur keempat dari *fraud triangle*. Teori terbaru yang mencakup faktor-faktor pemicu *fraud* adalah *Crowe's Fraud Pentagon Theory*. Teori ini disajikan oleh (Crowe Howarth, 2011). Teori *fraud pentagon* memperluas teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey sebelumnya. Teori ini menambah dua unsur faktor penyebab *fraud*, yaitu *competence* (kompetensi) dan *arrogance* (kesombongan). *Competence* yang dijelaskan dalam teori *fraud pentagon* ini memiliki arti yang sama dengan *capability*

(kemampuan) yang sebelumnya dijelaskan dalam teori *fraud diamond* oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Kompetensi/kemampuan berarti kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Sementara itu, menurut Crowe arogansi adalah hati nurani yang bersikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kebijakan atau *internal control* perusahaan tidak berlaku untuk dirinya sendiri.

### 2.1.3 *Fraudulent Financial Statement*

Menurut (Priantara, 2013), *fraudulent financial reporting* merupakan penyajian keliru yang disengaja atau penyembunyian dalam suatu angka atau pengungkapan di dalam laporan keuangan

yang mempunyai tujuan untuk memperdayai pengguna laporan keuangan. (Sarpta, 2018). Perbuatan

*fraud* yang dilakukan manajemen berupa:

- a) Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.
- b) Kesengajaan dalam penyajian atau sengaja menghilangkan suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan.
- c) Salah penerapan secara sengaja mengenai prinsip akuntansi (jumlah, klasifikasi, penyajian, pengungkapan).

### 2.2 Pengaruh *Financial Stability* terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Stabilitas keuangan diproksi dengan tingkat pertumbuhan aset perusahaan (AGROW). Aset merupakan cerminan kekayaan perusahaan yang dapat menunjukkan *outlook* dari suatu perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan besar atau kecil dapat dilihat dari total asetnya. Semakin banyak aset yang dimiliki, maka perusahaan itu termasuk perusahaan yang besar dan memiliki citra yang baik. Hal tersebut tentunya menjadi daya tarik bagi para investor, kreditur, maupun pengambil keputusan lainnya. (Rahmanti, 2013). Sebaliknya, apabila tingkat pertumbuhan aset perusahaan semakin kecil atau bahkan negatif, maka hal tersebut menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak stabil dan dianggap tidak mampu beroperasi dengan baik. Manajemen seringkali mendapat tekanan untuk menunjukkan bahwa perusahaan itu telah mampu mengelola aktiva dengan baik sehingga laba yang dihasilkannya pun juga banyak dan nanti pada akhirnya akan meningkatkan bonus yang diterimanya dan akan menghasilkan return yang tinggi pula untuk para investor. Karena alasan itulah, manajemen memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat untuk menutupi kondisi stabilitas keuangan yang buruk dengan melakukan fraud (Rahmanti, 2013). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hal: *Financial Stability* berpengaruh signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

### 2.3 Pengaruh *External Pressure* terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Unsur *pressure* (tekanan) yang kedua adalah *external pressure* (tekanan eksternal), merupakan tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Tekanan eksternal diproksikan dengan menggunakan *leverage debt to equity* (LEV) yaitu perbandingan antara total liabilitas dan total aset. Apabila perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi, berarti perusahaan tersebut dianggap memiliki hutang yang besar dan risiko kredit yang dimilikinya juga tinggi. Semakin tinggi risiko kredit, semakin besar tingkat kekhawatiran

kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian tersendiri bagi perusahaan dan memungkinkan menjadi salah satu penyebab dalam munculnya kecurangan pelaporan keuangan (Tessa, 2016). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha2: *External Pressure* berpengaruh signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

#### **2.4 Pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap *Fraudulent Financial Reporting***

*Ineffective monitoring* merupakan keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif memantau kinerja perusahaan. Menurut SAS No. 99, *ineffective monitoring* dapat terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, tidak bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kinerja perusahaan sehingga mengurangi tindakan fraud. (Norbarani, 2012). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha3: *Ineffective Monitoring* berpengaruh signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

#### **2.5 Pengaruh *Related Party Transaction (RPT)* terhadap *Fraudulent Financial Reporting***

Transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu kesepakatan atau pengaturan bisnis yang dilakukan oleh pihak – pihak yang saling tidak bebas satu dengan lainnya untuk tujuan tertentu. Pihak terkait (*related parties*) tidak independen satu dengan yang lain, oleh karena itu, resiko terjadinya salah saji material dari transaksi hubungan istimewa ini lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi dengan pihak bebas (*unrelated parties*). Manajemen harus mengidentifikasi dan mengungkapkan pihak-pihak terkait dan akuntansi atas transaksi hubungan istimewa. Umumnya pada transaksi pihak istimewa berisiko tinggi karena adanya keterlibatan yang tinggi oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Menurut (Lou & Wang, 2009), semakin kompleks transaksi dengan pihak istimewa maka akan menimbulkan resiko salah saji material karena rentan terhadap manipulasi oleh manajemen, apabila persentase yang lebih tinggi dari transaksi kompleks muncul, maka perusahaan akan menemukan probabilitas yang lebih besar terhadap kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha4 : *Related Party Transaction* berpengaruh signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

#### **2.6 Pengaruh *Total Accrual to Total Asset* terhadap *Fraudulent Financial Reporting***

Menurut (Skousen, 2008), rasionalisasi memiliki penilaian subjektif bagi perusahaan, penilaian serta pengambilan keputusan yang subjektif tersebut akan tercermin pada nilai akrual perusahaan. Pertumbuhan aset yang pesat, peningkatan kebutuhan kas dan pembiayaan eksternal secara positif berkaitan dengan kemungkinan *fraud*. (Beneish, 1997), (Francis & Krishnan, 1999), dan (Vermeer, 2003) berpendapat bahwa akrual merupakan perwakilan dari pengambilan keputusan manajemen dan memberikan wawasan tentang rasionalisasi pelaporan keuangan mereka. Akrual merupakan suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Konsep akrual diskresioner dapat berarti bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan dengan melakukan pencatatan ketika transaksi terjadi, meskipun kas belum melakukan pengeluaran atau penerimaan. Hal tersebut biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan (Oktarigusta, 2017). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha5 : *Total Accrual* berpengaruh signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

## **2.7 Pengaruh *Change in Board of Directors* terhadap *Fraudulent Financial Reporting***

Perubahan direksi merupakan penyerahan wewenang dari direksi lama kepada direksi baru. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja manajemen sebelumnya. Namun, perubahan direksi dapat menimbulkan *stress period* dalam suatu perusahaan karena membutuhkan waktu untuk adaptasi sehingga kinerja awal tidak maksimal. Kondisi ini memberikan peluang kepada individu untuk memperoleh keuntungan dari situasi tersebut (Yusroniyah, 2017). Pergantian direksi perusahaan tidak selamanya berdampak baik bagi perusahaan. Pergantian direksi perusahaan bisa menjadi suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan direksi yang baru yang dianggap lebih berkompeten dari direksi sebelumnya. Sementara disisi lain, pergantian direksi perusahaan bisa jadi merupakan upaya perusahaan untuk menyingkirkan direksi yang dianggap mengetahui *fraud* yang dilakukan perusahaan (Yusroniyah, 2017). Sementara disisi lain, pergantian direksi dianggap dapat mengurangi efektivitas dalam kinerja karena budaya direksi baru. Oleh karena itu dilakukan investigasi lebih lanjut apakah benar pergantian direksi mampu menjadi indikator terjadinya *fraudulent financial reporting* di perusahaan (Yusroniyah, 2017). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha6: *Change in Board of Directors* berpengaruh signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

## **2.8 Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial terhadap *Fraudulent Financial Reporting***

Manajemen mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para *shareholders*, tetapi disisi lain manajemen juga mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). *Earning management* merupakan salah satu masalah keagenan yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara *shareholder* dengan manajemen perusahaan, dimana *shareholder* sebagai *principal* tidak mengetahui informasi kinerja dalam perusahaan dan manajemen lebih mengetahui informasi perusahaan dan ada kemungkinan menutupi informasi tersebut dari pihak *principal*. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam. Kepemilikan saham oleh orang dalam ini dianggap dapat mengatasi permasalahan agensi yang selama ini sering terjadi, sebab dengan adanya kepemilikan saham oleh orang dalam ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Kepentingan dari prinsipal adalah memperoleh dividen setinggi-tingginya yang dapat dilihat dari perolehan laba yang dihasilkan perusahaan, sedangkan kepentingan dari manajemen adalah mendapatkan kompensasi yang besar atas hasil kerjanya (Henny & Nugraha, 2015). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha7: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Populasi**

Populasi data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018, terdiri dari 3 (tiga) sektor utama, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor barang konsumsi dan dengan jumlah total perusahaan sebanyak 548 (lima ratus empat puluh delapan perusahaan).

### **3.2 Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang diterapkan oleh peneliti menggunakan teknik *purposive*

*sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2015) Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dikarenakan adanya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel untuk digunakan dalam pengolahan data. Kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2018.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2015-2018.
3. Perusahaan manufaktur menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2015-2018
4. dan telah diaudit oleh auditor independen.
5. Perusahaan yang terindikasi Fraud selama 2 tahun atau lebih dan tidak secara berturut-turut dalam periode 2015-2018 menggunakan *beneish model*.
6. Perusahaan yang memiliki data-data atau informasi yang lengkap untuk mendukung penelitian ini.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti merupakan data yang bersifat kuantitatif dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu data sekunder. Dimana, menurut (Sugiyono, 2017) data sekunder adalah sebagai berikut: “Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah data dalam bentuk laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah di audit oleh auditor independen. Informasi data laporan keuangan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>).

### 3.4 Model Empiris Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda (*multiple regression analysis*). Rumus regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

$$FFR = \alpha + \beta_1 AGROW + \beta_2 LEV + \beta_3 BDOU + \beta_4 RPT + \beta_5 TATA + \beta_6 DCHANGE + \beta_7 OSHIP + e$$

### 3.5 Operasional Variabel Dependen

Variabel dependen menurut (Sugiyono, 2015) adalah “Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan dalam peneliti adalah *fraudulent financial reporting* dan disimbolkan sebagai FFR. *Fraudulent financial reporting* dalam penelitian ini diukur berdasarkan *Beneish model*, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$M\text{-Score} = -4.84 + 0.920 DSRI + 0.528 GMI + 0.404 AQI + 0.892 SGI + 0.115 DEPI - 0.172 SGAI - 0.327 LEV + 4.697 TATA$$

Tabel 1 Rumus Beneish Ratio

No.	Ratio Keuangan	Keterangan	Rumus
1.	DSRI	Days Sales in Receivable	$DSRI = \frac{\frac{net\ receivables_t}{sales_t}}{\frac{Net\ receivables_{t-1}}{sales_{t-1}}}$
2.	GMI	Gross Margin Index	$GMI = \frac{[(Sales_{t-1} - COGS_{t-1})/sales_{t-1}]}{[sales_t - COGS_t] / sales_t}$
3.	AQI	Asset Quality Index	$AQI = \frac{TA_t - (CA_t + PPE_t) / TA_t}{(TA_{t-1} - (CA_{t-1} + PPE_{t-1}) / TA_{t-1}}$
4.	SGI	Sales Growth Index	$SGI = \frac{Sales_t}{sales_{t-1}}$
5.	DEPI	Depreciation Index	$DEPI = \frac{[(Depreciation_{t-1} / (PPE_{t-1} + Depreciation_{t-1}))]}{[(depreciation_t / (PPE_t + Depreciation_t))]}$
6.	SGAI	Sales General and Administrative Index	$SGAI = \frac{S\&G\ Expenses_t / sales_t}{S\&G\ Expenses_{t-1} / sales_{t-1}}$
7.	LVGI	Leverage Index	$LVGI = \frac{[(Current\ Liabilities_t + Longterm\ debt_t) / total\ asset_t]}{[(Current\ Liabilities_{t-1} + Longterm\ debt_{t-1}) / total\ asset_{t-1}}}$
8.	TATA	Total Accrual to Total Asset	$TATA = \frac{net\ income\ from\ continuing\ -\ cash\ flow\ from\ operation\ t}{Total\ Assets_t}$

Sumber: The Detection of Earnings Manipulation (Messod D. Beneish, 1999)

Jika dari hasil perhitungan *Beneish M-Score* menghasilkan hasil sebagai berikut, maka:

1. Nilai *Beneish M-Score* < -2.22, perusahaan tidak terindikasi melakukan *fraudulent financial reporting* atau tergolong sebagai perusahaan non-manipulator.
2. Nilai *Beneish M-Score* > -2.22, perusahaan terindikasi melakukan *fraudulent financial reporting* atau tergolong sebagai perusahaan manipulator.

### 3.6 Variabel Independen

Variabel independen menurut (Sugiyono, 2015), “Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Adapun variabel independen yang digunakan peneliti dalam mengolah data pada penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1) *Financial Stability* (AGROW)

*Financial Stability* sebuah perusahaan dapat diukur menggunakan proksi *asset growth*, dimana proksi ini dapat menunjukkan pergerakan aset dalam suatu perusahaan. Rumus *financial stability* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$AGROW = \frac{TA_t - TA_{t-1}}{TA_{t-1}}$$

Sumber: Skousen et al. (2009)

2) *External Pressure* (LEV)

*External pressure* dapat diproksikan menggunakan rasio *leverage debt to equity* (LEV). Rumus *external pressure* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LEV} = \frac{\text{TOTAL DEBT}}{\text{EQUITY}}$$

Sumber: Van Horne (2002)

3) *Ineffective Monitoring* (BDOUT)

*Ineffective monitoring* dapat diproksikan dengan rasio BDOUT, dimana jumlah komisaris independen menjadi faktor penentu kemungkinan *fraud* di perusahaan. Rumus BDOUT yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$\text{BDOUT} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

Sumber: Skousen et al. (2009)

4) *Related Party Transactions* (RPT)

*Related Party Transactions* dapat diproksikan dengan rasio RPT, dimana rasio ini melakukan perhitungan dengan membandingkan total piutang pihak istimewa dengan total piutang perusahaan. Jika, hasil perhitungan dari rasio ini menunjukkan persentase yang cukup tinggi, maka ada probabilitas perusahaan melakukan kecurangan. Rumus RPT yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$\text{RPT} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang Perusahaan}}$$

Sumber: Skousen et al. (2009)

5) *Rationalization* (TATA)

*Rationalization* dapat diproksikan dengan rasio *total accruals to total assets* (TATA), dimana proksi ini dapat memperkirakan aktivitas pemasukan dan pengeluaran dari sebuah perusahaan. Rumus *total accruals to total assets* yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TATA} = \frac{\text{net income from continuing operations}_t - \text{cash flow from operations}_t}{\text{TA}_t}$$

Sumber: The Detection of Earnings Manipulation: Messod D. Beneish (1999)

6) *Competence* (DCHANGE)

*Competence* dapat diproksikan dengan rasio DCHANGE, dimana posisi CEO, direksi, maupun kepala divisi lainnya dapat menjadi faktor penentu kecurangan dengan memanfaatkan

posisinya dalam perusahaan. Rumus perhitungan rasio DCHANGE menggunakan metode *dummy*, sebagai berikut:

Kode 1 = Terdapat pergantian *Board of Director*  
 Kode 0 = Tidak terdapat pergantian *Board of Director*

Sumber: Skousen et al. (2009)

#### 7) *Arrogance* (OSHIP)

*Arrogance* diproksikan dengan rasio kepemilikan manajerial, rasio ini dapat ditunjukkan dengan melihat perbandingan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan total jumlah saham perusahaan. Rumus perhitungan rasio OSHIP adalah sebagai berikut:

$$\text{OSHIP} = \frac{\text{total saham dimiliki oleh manajemen}}{\text{Total share outstanding}}$$

Sumber: Skousen et al. (2009)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015-2018. Rincian pengambilan sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Sampling Penelitian

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018	548
Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2015-2018	508
Perusahaan manufaktur menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2015-2018 dan telah diaudit oleh auditor independen.	400
Perusahaan yang terindikasi Fraud selama 2 tahun atau lebih dan tidak secara berturut-turut dalam periode 2015-2018 menggunakan Beneish Model	116
Data ekstrim yang dikeluarkan dari sampel ( <i>outlier</i> )	11
<b>Perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.</b>	<b>105</b>

## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian meliputi jumlah observasi (N), nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*) serta nilai standar deviasi yang menggambarkan penyebaran data.

Tabel 3

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FFR	105	-3.5365	.7080	-2.0784	.6179
AGROW	105	-.4104	.8027	.1221	.1769
LEV	105	-2.2145	4.5469	.8248	1.0727
BDOUT	105	.0000	1.0000	.3705	.1843
RPT	105	.0000	.6487	.0892	.1592
TATA	105	-.1323	.3452	.0384	.0770
DCHANGE	105	0	1	.37	.486
OSHIP	105	.0000	.8733	.0561	.1537
Valid N (listwise)	105				

Hasil *output* SPSS menyajikan ringkasan statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Proksi rasio perubahan total aset (AGROW) menunjukkan rata-rata sebesar 0,1221 artinya, secara umum perusahaan sampel mengalami kenaikan total aset selama tahun 2015-2018 hingga 12,21%. Sedangkan nilai standar deviasi dari AGROW sebesar 0,1769 yang berarti terdapat penyimpangan

sebesar 17,69% dari keseluruhan rata-rata AGROW. Perubahan aset terbesar adalah sebesar 0,8027. Sedangkan perubahan aset terkecil adalah sebesar -0,4104 atau terjadi penurunan aset.

Proksi *leverage* (LEV) menunjukkan rata-rata sebesar 0,8248 yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari modal (ekuitas) yang dimilikinya sehingga dianggap memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Sedangkan nilai standar deviasi dari LEV yaitu sebesar 1,072 yang berarti terdapat penyimpangan sebesar 107,2% dari keseluruhan rata-rata LEV. Nilai LEV maksimal dari perusahaan yang menjadi sampel sebesar 4,546 yang berarti proporsi hutang perusahaan tersebut sebesar 4,546 kali dari jumlah ekuitasnya, sedangkan nilai LEV minimum sebesar -2,214, LEV yang negatif bisa berarti perusahaan sampel memiliki ekuitas yang negatif

Proksi BDOUT memiliki nilai rata-rata sebesar 0,37, dimana jumlah komisaris independen pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris yang tidak independen, dikarenakan rata-rata BDOUT kurang dari 50% yaitu hanya 37%. Standar deviasi dari BDOUT adalah 0,1843 yang berarti terdapat penyimpangan sebesar 18,43% dari rata-rata variabel ini. Nilai maksimal dari BDOUT adalah 1 yang artinya jumlah dewan komisaris independen lebih banyak dari pada dewan komisaris yang tidak

penyimpangan sebesar 7,7% dari rata-rata. Kemudian nilai maksimum TATA sebesar 0,3452, berarti sebesar 34,52% dari hasil total akrual yang mempengaruhi pengambilan independen. Nilai minimum rasio BDOUT sebesar 0, berarti perusahaan sampel tidak memiliki dewan komisaris independen.

Proksi RPT memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0892, berarti perusahaan sampel melakukan transaksi hubungan istimewa sebanyak 8,92%. Standar deviasi dari RPT sebesar 0,1592, dimana terdapat penyimpangan sebesar 15,92% dari rata-rata. Nilai maksimal RPT adalah 0,6487, yang berarti perusahaan memiliki transaksi istimewa sebesar 64,87% sehingga memiliki probabilitas lebih besar terhadap kecurangan. Sedangkan nilai minimal RPT

sebesar 0.

Variabel *rationalization* dengan proksi total aset akrual (TATA), memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0384, artinya 3,84% dari total akrual mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen dalam merasionalisasikan laporan keuangan. Standar deviasi dari TATA adalah 0,077 yang berarti terdapat keputusan manajemen. Sedangkan nilai minimum TATA sebesar -0,132.

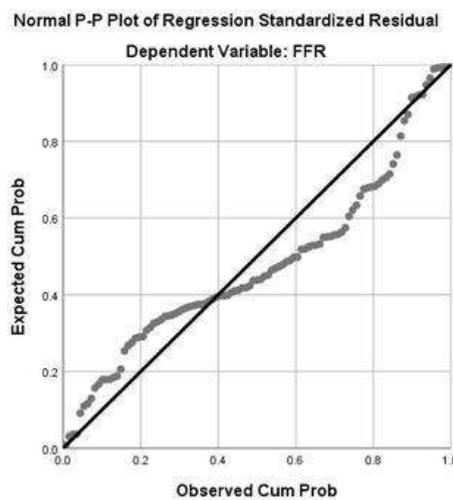
Nilai rata-rata yang dimiliki variabel *capability* dengan proksi perubahan dewan direksi (DCHANGE) adalah 0,37 dimana nilai tersebut lebih rendah dari 0,50 sehingga dapat diartikan bahwa sebesar 37% perusahaan sampel yang melakukan perubahan dewan direksi dengan kode 1, lebih sedikit daripada perusahaan sampel yang melakukan perubahan dewan direksi. Standar deviasi dari DCHANGE adalah 0,486 yang berarti terdapat penyimpangan sebesar 48,6% dari rata-rata.

Proksi rasio kepemilikan saham oleh manajemen (OSHIP) menunjukkan rata-rata sebesar 0,0561. Hal ini berarti bahwa perusahaan sampel rata-rata 0,0561 atau 5,61% dari sahamnya dimiliki

oleh orang dalam/manajemen. Standar deviasi dari OSHIP sebesar 0,1537 yang berarti terdapat penyimpangan sebesar 15,37% dari rata-rata. Jumlah kepemilikan saham oleh manajemen yang paling rendah (minimum) sebesar 0 dan maksimum sebesar 0,8733 atau 87,33%. Kepemilikan saham oleh orang manajemen menunjukkan kepentingan ganda dari orang dalam yaitu sebagai agent sekaligus sebagai *principal*. Dalam hal ini diharapkan manajer yang memiliki saham dapat mewakili kepentingan pemegang saham lainnya.

#### 4.3 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data menggunakan uji *P-Plot*, sebagai berikut:



Gambar 1

Berdasarkan tampilan hasil pengujian P-P Plot diatas, dapat disimpulkan bahwa data variabel terdistribusi secara normal, dikarenakan titik-titik pada grafik menyebar mengikuti garis diagonal, walaupun terdapat beberapa titik yang menyimpang. Untuk mendukung hasil uji normalitas pada data penelitian ini dapat menggunakan uji-uji asumsi lainnya.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas

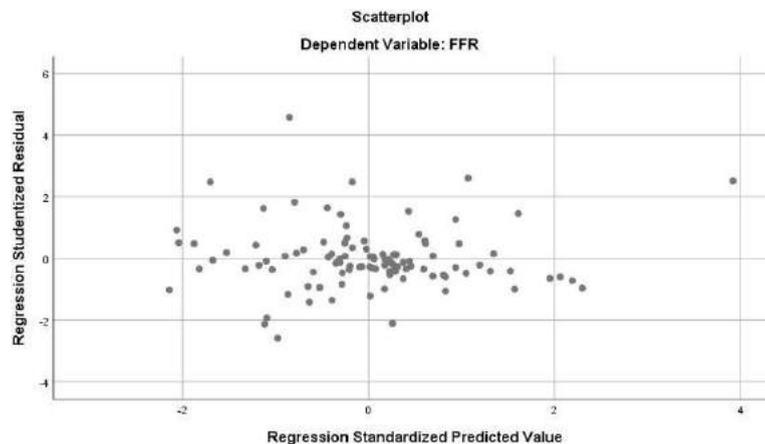
Tabel 4

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
AGROW	.903	1.107
LEV	.908	1.101
BDOUT	.900	1.111
RPT	.861	1.161
TATA	.926	1.080
DCHANGE	.947	1.056
OSHIP	.844	1.184

Berdasarkan hasil perhitungan multikolinieritas yang ditunjukkan oleh tabel diatas, terlihat bahwa tidak ada yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang dapat diartikan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang digunakan. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang serupa yaitu tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen dalam model tersebut.

#### 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2



Berdasarkan hasil grafik scatterplots pada gambar 4.2 terlihat titik-titik yang menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah sumbu Y pada angka 0, hal ini dapat diartikan tidak terdapatnya Heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### 4.6 Uji Autokorelasi

Tabel 5

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.0641
Cases < Test Value	52
Cases $\geq$ Test Value	53
Total Cases	105
Number of Runs	53
Z	-.097
Asymp. Sig. (2-tailed)	.923

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan pada tabel diatas, menunjukkan nilai Run Test adalah sebesar -0,06410, dengan probabilitas 0,000 signifikan pada 0,05, hasil  $>$  0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model ini memiliki data acak atau tidak

terdapatnya autokorelasi pada model regresi.

#### 4.7 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.764 <sup>a</sup>	.583	.553	.4130079

a. Predictors: (Constant), OSHIP, AGROW, TATA, DCHANGE, LEV, BDOUT, RPT  
b. Dependent Variable: FFR

Tabel 6

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ( R ) lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari 1 yaitu sebesar 0,583 atau 58,3%, berarti ada hubungan kuat positif antar variabel independen dengan dependen. Sedangkan, nilai Adjusted bahwa sebesar 55,3% model dijelaskan oleh variabel dalam model ini (*OSHIP, AGROW, TATA, DCHANGE, LEV, BDOUT, RPT*) sedangkan sebesar 44,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

##### 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 7

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23.164	7	3.309	19.400	.000 <sup>b</sup>
	Residual	16.546	97	.171		
	Total	39.710	104			

a. Predictors: (Constant), OSHIP, AGROW, TATA, DCHANGE, LEV, BDOUT, RPT  
b. Dependent Variable: FFR

Berdasarkan F test yang dilakukan, didapat nilai F hitung sebesar 19,4 dengan tingkat signifikansi <0,05 yaitu sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi yang kecil dari 0,05 dapat diartikan bahwa variabel *OSHIP, AGROW, TATA, DCHANGE, LEV, BDOUT, RPT* secara simultan mempengaruhi variabel dependen, *fraudulent financial statement*, sehingga model dapat digunakan. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 8

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	-2.407	.121		-19.906	.000
	AGROW	.636	.241	.182	.2642	.010
	LEV	.019	.040	.032	.470	.640
	BDOUT	.039	.232	.012	.170	.866
	RPT	.433	.274	.112	1.581	.117
	TATA	5.672	.547	.707	10.375	.000
	DCHANGE	-.046	.086	-.036	-.535	.594
	OSHIP	-.332	.287	-.083	-1.158	.250

a. Dependent Variable: FFR

#### 4.8 Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis pertama untuk variabel *financial stability* dengan proksi AGROW menunjukkan tingkat signifikan senilai 0,010. Ini artinya setiap ada peningkatan 1% pada faktor AGROW akan meningkatkan resiko terjadinya *fraudulent financial reporting* sebesar 0.010 dengan tingkat signifikan <0,05 dan hasil beta sebesar 0,636 yang artinya bahwa variabel AGROW berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*. Dari tabel diatas, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *financial stability* berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* diterima atau hipotesa didukung dengan data. Setiap terjadinya perubahan kenaikan aset, akan menaikkan resiko terjadinya kecurangan, perubahan rasio kenaikan aset akan menjadi tekanan bagi manajemen perusahaan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sesuai dengan teori pada bab 2, ketika *financial stability* (stabilitas keuangan) terancam oleh keadaan ekonomi, industri, dan situasi entitas yang beroperasi, manajer menghadapi tekanan untuk melakukan *fraudulent financial reporting*. Ketika stabilitas keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang terancam, maka manajemen akan melakukan berbagai cara agar stabilitas keuangan perusahaan terlihat baik. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2017) dan penelitian Tessa (2016) yang menyatakan bahwa *financial stability* berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan (Nugraha & Henny, 2015).

Hasil uji signifikansi yang telah dilakukan untuk variabel *external pressure* dengan proksi *leverage*, menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.640 dan hasil beta sebesar 0,019, sehingga variabel ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *fraudulent financial statement*. Dari hasil tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *external pressure* berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* ditolak atau hipotesis tidak didukung oleh data. Pada teori bab 2, apabila perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi, berarti perusahaan tersebut dianggap memiliki hutang yang besar dan risiko kredit yang dimilikinya juga tinggi. Semakin tinggi risiko kredit, semakin besar tingkat kekhawatiran kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Tekanan ini diakibatkan dari pihak eksternal terutama kreditor karena perusahaan tidak mampu untuk membayar hutangnya sehingga perusahaan kesulitan untuk mendapatkan pendanaan berupa pinjaman dari pihak kreditor untuk membiayai riset, ekspansi, dan pengeluaran lainnya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Namun disisi lain perusahaan harus melunasi hutangnya kepada kreditor. Perusahaan dapat dikatakan sehat apabila pelunasan hutang lancar dan tidak mengalami kerugian. Apabila rasio *Leverage* tinggi maka pembiayaan perusahaan sangatlah bergantung pada hutang sehingga risiko kredit tinggi. Hutang yang tinggi ini dapat menjadi tekanan bagi pihak manajemen untuk melunasi hutang, dan resiko untuk memanipulasi laporan keuangan menjadi lebih besar terutama untuk menaikkan laba sehingga dapat menarik investor dimana modal saham tersebut nantinya dapat melunasi hutang. Namun tekanan bagi pihak manajer ini tidak hanya dari kreditor tetapi dari *shareholder* sehingga manajer dituntut untuk membuat perusahaan selalu untung yang dimana *shareholder* mendapat dividen atas laba tersebut.

Berdasarkan hasil uji signifikansi yang telah dilakukan untuk variabel *ineffective monitoring* dengan proksi BDOU, diperoleh tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0,594 dan hasil beta sebesar 0,039. Dapat disimpulkan *ineffective monitoring* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *fraudulent financial statement*. Dari hasil tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* ditolak atau hipotesis tidak didukung oleh data. Pada teori pada bab 2, komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, tidak bekerja rangkap dengan perusahaan

terafiliasi dan memahami peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kinerja perusahaan sehingga mengurangi tindakan fraud. Jumlah dewan komisaris independen yang mengawasi manajemen tidak terlalu mempengaruhi dan bukan hal yang terlalu diperhatikan, melainkan yang terpenting adalah efektivitas kinerja dewan komisaris tersebut. Dewan komisaris independen tidak terafiliasi ataupun tidak memahami peraturan di perusahaan, sehingga perusahaan tetap bisa terindikasi fraud walaupun didalamnya terdapat dewan komisaris independen.

Hasil uji signifikansi yang telah dilakukan untuk proksi *Related Party Transaction*, diperoleh tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0,117 dan hasil beta sebesar 0,433, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* yang terjadi dalam perusahaan manufaktur di Indonesia. Dari hasil tersebut, maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *Related Party Transaction* berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* ditolak atau hipotesis tidak didukung oleh data. Perusahaan memiliki kebijakan tertentu untuk menentukan besarnya saldo berdasarkan estimasi terhadap akun-akun tertentu pada laporan keuangan seperti akun piutang tak tertagih dan akun persediaan. Besaran saldo piutang telah ditentukan berdasarkan metode yang dipakai perusahaan seperti menentukan saldo piutang berdasarkan piutang tak tertagih. Risiko inheren jadi tinggi ketika pihak perusahaan melakukan transaksi dengan *related parties* karena peraturan serta keterlibatan dari manajemen yang tinggi ini dapat membuat keputusan yang subjektif, sehingga salah saji material dapat menjadi tinggi. Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Rachmawati dan Marsono (2014) yang menyatakan bahwa Transaksi Pihak Istimewa tidak mempengaruhi *Fraudulent Financial Reporting*. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Widiyarti, 2016) yang menyatakan bahwa Transaksi Pihak Istimewa mempengaruhi *Fraudulent Financial Reporting*.

Berdasarkan hasil uji signifikansi yang dilakukan untuk proksi TATA, diperoleh tingkat signifikansi  $< 0.05$  yaitu sebesar 0.00 dan hasil beta sebesar 5,672. Dapat diartikan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa *total accrual* berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* diterima atau hipotesa didukung dengan data. Sesuai dengan teori bab 2, bahwa konsep *discretionary accrual* dapat berarti pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan dengan melakukan pencatatan ketika transaksi terjadi, meskipun kas belum melakukan pengeluaran atau penerimaan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan, sehingga jika nilai *discretionary accrual* naik maka kemungkinan *fraudulent financial reporting* naik, jika nilai *discretionary accrual* turun maka kemungkinan *fraudulent financial reporting* turun. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Oktarigusta, 2017) yang menyatakan bahwa TATA memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Skousen, Smith dan Wright (2008), dimana Skousen menggunakan beberapa proksi untuk meneliti variabel *Rationalization* ini dan salah satu proksi tersebut adalah TATA. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa TATA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*.

Dalam uji signifikansi, variabel *Change in Board of Directors* yang diproksikan dengan DCHANGE menunjukkan tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0,594 dan hasil beta sebesar -0,046, yang dapat diartikan bahwa variabel ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* di perusahaan manufaktur di Indonesia. Maka hipotesis keenam yang menyatakan bahwa *Change in Board of Directors* berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* ditolak atau hipotesis tidak didukung oleh data. Setiap kinerja dari direksi akan selalu diawasi, pergantian direksi dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Pergantian direksi

perusahaan bisa menjadi suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan direksi yang baru yang dianggap lebih berkompeten dari direksi sebelumnya, bukan upaya perusahaan untuk menyingkirkan direksi yang dianggap mengetahui *fraud* yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian (Tessa & Ulfah, 2016), (Nuraina & Wijaya, 2017) yang menyatakan bahwa variabel pergantian direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

Dalam uji signifikansi, variabel kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan OSHIP menghasilkan tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.250 dan hasil beta sebesar -0,332. Dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* yang terjadi dalam perusahaan manufaktur di Indonesia. Maka hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* ditolak atau hipotesis tidak didukung oleh data. Hal ini bisa dikarenakan rendahnya rata-rata kepemilikan manajerial dalam perusahaan sampel yaitu hanya sebesar 5,61%. Kepemilikan saham yang rendah mengindikasikan bahwa pada perusahaan sampel terjadi pemisahan yang jelas antara pemegang saham sebagai pemilik yang mengontrol jalannya perusahaan dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Adanya pemisahan ini menyebabkan manajer tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian (Henny & Nugraha, 2015) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Aprilia, 2017) yang menyatakan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

## 5. KESIMPULAN

Hasil dari uji normalitas yang telah diolah menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, dikarenakan titik-titik pada grafik menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan autokorelasi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian telah mengikuti standar uji asumsi klasik. Hasil koefisien korelasi (R) sebesar 58,3% yang berarti variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan kuat positif, dan nilai koefisien

determinasi (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 55,3% yang dapat diartikan bahwa sebesar 55,3% model dapat dijelaskan oleh variabel dalam model ini. Berdasarkan hasil dari pengujian signifikansi parsial dan simultan yang telah dianalisis dalam penelitian ini di bab sebelumnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Financial Stability* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.
2. *External Pressure* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.
3. *Ineffective Monitoring* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.
4. *Related Party Transaction* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.
5. *Total Accrual* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.
6. *Change in Board of Directors* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

7. Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, 2017. "Analisis Pengaruh Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan *Asean Corporate Governance Scorecard*". Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Vol.9, no.1, hal.109-110.
- ACFE Indonesia. 2017. "Survei *Fraud* Indonesia 2016". Jakarta.
- ACFE. 2016. "*The Fraud Tree Occupational Fraud and Abuse Classification System*" Beneish, Messod. 1999. "The Detection Of Earnings Manipulation". hal. 10-12.
- Bawekes, Aaron M.A. Simanjuntak, dan Sylvia C. 2018. "Penguujian Teori *Fraud Pentagon* Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*". Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Cendrawasih, Jayapura. Volume 13, Nomor 1, Mei 2018, hal 116.
- Carl S. Warren dkk. 2015. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Endrianto, Wendy. 2010. "Analisa Pengaruh Penerapan Basel dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Risiko Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hal 8.
- FASB. 1978. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 1 : Objectives of Financial Reporting by Business Enterprise*. Financial Accounting Standards Board.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2013. "Standar Audit 240 : Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan". Jakarta : Salemba Empat.
- Karyono. 2013. "*Forensic Fraud*". Yogyakarta: CV. Andi. Dalam Jurnal Ilmiah, Ristalia. M. 2015. "Pengaruh Penerapan Etika dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan" Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung. Hal 17.
- Muhsin, Kardoyo, dan Ahmad N. 2018. "*What Determinants of Academic Fraud Behavior? From Fraud Triangle to Fraud Pentagon Perspective, Faculty of Economics*". Dalam : *Knowledge E*, Oktober. Semarang. hal. 157.
- Nugraha, Aditya., dan Deliza, H. 2015. "Pendeteksian Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko, Tekanan dan Peluang (Berdasarkan Press Release OJK 2008-2012). E-journal Akuntansi Universitas Trisakti. Volume. 2 Nomor. 1, hal.34.
- Norbarani, Listiana. 2012. "Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle Yang Diadopsi Dalam No. 99". Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. hal. 50-51.
- Oktafiana, Frasiska, Khoirun N., dan Shinta P. S. 2019. "Analisis *Fraud* Laporan Keuangan Dengan Wolfe & Hermanson's *Fraud Diamond* Model Pada Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta. hal 249
- Oktarigusta, Lutfiana. 2017. " Analisis *Fraud Diamond* Untuk Mendeteksi Terjadinya Financial Statement Fraud di Perusahaan". Jurnal Ilmiah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta. hal.4, 11.

- Ramadan, Ferdinan. 2019. "Analisis Fraud Pentagon Dalam mendeteksi *Financial Statement Fraud* Menggunakan *Beneish M-Score Model*". Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Rachmawati, Kusuma. 2014. "Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Perspektif *Fraud Triangle* Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*". Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang. Volume 3, Nomor 2
- Rini & Tarmizi Achmad. 2012. "Analisis Prediksi Potensi Risiko *Fraudulent Financial Statement* Melalui *Fraud Score Model*". Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang Volume 1 Nomor 1, Tahun 2012, Hal 3.
- Rahmanti, Maudy. 2013. "Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan dan Peluang". Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang. hal. 31,33.
- Rahayu, Mustika. 2014. "Pengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran Kas Terhadap Tingkat Likuiditas". Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas, Bandung.
- Sarpta, Bella. 2018. "Analisis *Fraud Pentagon* Dalam Mendeteksi *Fraudulent Financial Reporting* Menggunakan *Beneish M-score Model*". Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung. hal.16-18,25.
- Sari, Novita. 2019. "Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index Yang Terdaftar di BEI" Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Sihombing, S. K. 2014. "Analisis *Fraud Diamond* Dalam Mendeteksi *Financial Statement Fraud* : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012". Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Skousen, C. J., Smith, K.R. and Wright, C.J. (2008). *Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS 99*. Posted in <http://ssrn.com/abstract=1295494> pada 20 September 2015. hal,6,12.
- Tessa, Chyntia. 2016. "*Fraudulent Financial Reporting* : Pengujian Teori *Fraud Pentagon* Pada Sektor Keuangan dan Perbankan Di Indonesia". Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang. hal 8.
- Tiffani, Laila. 2015. Tiga Kondisi Fraud Menurut Cressey. 1953., Dalam Jurnal "Deteksi *Financial Statement Fraud* Dengan Analisis *Fraud Triangle* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Vol 19 No. 2, hal. 2.
- Yusroniyah, Taufiqotul. 2017. "Pendeteksian *Fraudulent Financial Statement* Melalui *Crowe's Fraud Pentagon Theory* Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI". Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. hal.9,22,46,50,64-65
- Yolina, Merlin. 2018. "Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba" Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan, Bandung. 2018. hal. 77-78,82,85,87.
- Widiyarti, Agung. 2016. "Determinan Kemungkinan Terjadinya Fraud Pada Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia". Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

## **JURNAL PENELITIAN AKUNTANSI (JPA)– UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

**Diterbitkan oleh: Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNIVERSITAS PELITA HARAPAN – Karawaci, Tangerang.**

Ruang Lingkup : Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Perpajakan, dan Audit

Alamat Editor : Jurusan Akuntansi, FEB, Universitas Pelita Harapan, Kampus UPH Gedung F Lt 12, Lippo Karawaci, Tangerang 15811. Telp 021-5460901 Fax 54210992

Email : [ipauph@uph.edu](mailto:ipauph@uph.edu) (usulan sementara)

Website : (OJS koordinasi dengan LPPM, link OJS akan dimasukkan website BS)

Publikasi : 2 kali dalam setahun (April dan Oktober)

### **Latar belakang dan Aturannya**

#### **Sekilas Tentang Jurnal Penelitian Akuntansi / Jurnal Penelitian Akuntansi Indonesia**

JPA / JPAI merupakan Jurnal Ilmiah yang dikelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci, Tangerang yang bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan buah pikiran akademisi dan praktisi dibidang ilmu Akuntansi. Topik yang akan diterima dalam publikasi ini yang berhubungan Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Perpajakan, dan Audit. Dan akan diterbitkan 2 kali dalam setahun.

#### **Hak Cipta atas Karya Ilmiah**

Naskah yang dikirim kepada Dewan Redaksi GEMA – AKUNTANSI harus merupakan karya asli yang belum pernah dipublikasikan atau dalam proses evaluasi di publikasi ilmiah lainnya. Pengecualian diberikan bagi karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam *Proceeding*. Setiap artikel yang dikirimkan ke redaksi, sepenuhnya merupakan keputusan editor untuk publikasi.

#### **Proses Telaah Karya Ilmiah**

Setiap artikel yang dikirimkan ke redaksi akan ditelaah dengan sistim double-blind peer review. Telaah akan dilakukan reviewer independen dan redaksi. Dan dilakukan berdasarkan kepakaran atau kesesuaian bidang ilmu. Setiap evaluasi akan diberitahukan hasilnya selambatnya 20 hari kerja terhitung dari tanggal terima.

#### **Pengiriman Naskah**

Naskah dikirimkan melalui kepada Dewan Redaksi Jurnal Akuntansi UPH secara on line melalui website:<https://ojs.uph.edu/index.php/JPA>. Naskah yang dikirimkan harus mengikuti petunjuk yang telah ditentukan oleh dewan redaksi berikut ini.

1. Naskah diketik dengan ukuran A4 dengan margin batas atas, bawah, dan samping masing-masing 2.5 cm. Naskah diketik rata kanan dan kiri (justified) dengan spasi 1.
2. Halaman depan hanya memuat judul artikel, nama penulis, nama institusi/perusahaan tempat penulis berafiliasi, alamat korespondensi, dan abstrak. Naskah tidak lebih dari 20 halaman,

termasuk gambar, table, dan daftar referensi. Nomor halaman ditempatkan pada bagian pojok kiri bawah.

3. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 250 kata dan memuat tidak lebih dari 5 (lima) kata kunci. Penulisan bagian Abstrak berspasi tunggal dan dicetak miring. Abstrak hanya menyatakan tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil, dan kontribusinya.
4. Gambar dan tabel diletakkan dalam badan tulisan. Gambar dan tabel diberikan nomor dengan menggunakan format penomoran Arab, contohnya Gambar 1, Tabel 1, dst. Judul gambar dan table diletakkan pada bagian atas gambar dan tabel.
5. Naskah diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan ketentuan sebagai berikut:

	<b>Ukuran</b>	<b>Bold</b>	<b>Italics</b>	<b>Alignment</b>	<b>Remark</b>
Judul Artikel	12	Ya	Tidak	Centered	
Nama Penulis	10	TidaK	Tidak	Centered	
Nama institusi	8	Tidak	Tidak	Centered	
Email	8	Tidak	Tidak	Centered	
Abstrak dan kata kunci	10	Tidak	Tidak	Justified	Artikel Bahasa Indonesia
Abstract & Keywords	10	Tidak	Ya	Justified	Artikel Bahasa Inggris
Isi Naskah	12	Tidak	Tidak	Justified	
Referensi	12	Tidak	Tidak	Justified	Margin kiri 1 cm
Judul Gambar dan tabel	10	Tidak	Tidak	Centered	
Tulisan dalam gambar dan tabel	>/8	Tidak	Tidak	-	

6. Kutipan ditulis dengan menggunakan format APA Edisi 6 (American Psychological Association). Catatan kaki tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam penulisan naskah.

Berikut adalah contoh penulisan kutipan dengan menggunakan format APA:

- a. Sumber kutipan dengan satu penulis: (Goulding, 2005)
- b. Sumber kutipan dengan dua penulis: (Schiffnan & Kanuk, 2010)
- c. Sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis: (Ghazali *et al.*, 2008)
- d. Dua sumber kutipan dengan penulis berbeda: (Ghazali *et al.*, 2008; Danielsson, 2009)
- e. Dua sumber kutipan dengan penulis sama: (Lawson 2003, 2007). Jika tahun publikasinya sama: (Fam, 2008a, 2008b)
- f. Sumber kutipan dari institusi ditulis dengan menyebutkan akronim institusi yang bersangkutan, misalnya (BI, 2011)
- g. Sumber kutipan dari hasil wawancara: (Aldiano, wawancara pribadi, Oktober 12, 2010)

7. Daftar referensi disusun secara berurutan secara abjad dan menggunakan sistem APA Edisi 6 (American Psychological Association) yang dapat dilihat lengkapnya di <http://www.calstatela.edu/librarv/guides/3apa.ndf>. Berikut adalah contoh penulisan referensi:
- a. Buku  
Goulding, C. (2005). *Grounded theory: A practical guide for management, business, and market researchers*. London: Sage.
  - b. Artikel atau bagian dalam sebuah buku:  
Gerke, S. (2000). *Global lifestyles under local conditions: The new Indonesian middle class*. In B. H. Chua (Ed.), *Consumption in Asia: Lifestyle and identities* (pp. 135-158). New York, NY: Routledge.
  - c. Artikel dari jurnal cetak:  
Ghazali, M., Othman, M. S., Yahya, A. Z., & Ibrahim, M. S. (2008). *Products and country of origin effects: The Malaysian consumers' perception*. *International Review of Business Research Paper*, 4(2), 91-102.
  - d. Artikel dari jurnal online dengan DOI (digital object identifier):  
Armstrong, J. S., & Overton, T. S. (1977). *Estimating non-response bias in mail surveys*. *Journal of Marketing Research*, 14, 396-402. <https://doi.org/10.2307/3150783>
  - e. Artikel dari jurnal online tanpa DOI:  
Danielsson, S. (2009). *The impact of celebrities on adolescents' clothing choices*. *Undergraduate Research Journal for the Human Sciences*, 8. Retrieved from <http://www.kon.org/urc/v8/danielsson.html>
  - f. Artikel koran atau majalah:  
Widyastuti, R. S. (2011, January 14). *Masih sebatas macan kertas*. *Kompas*, 34.
  - g. Laporan organisasi atau perusahaan:  
Bank Indonesia. (2011). *Perekonomian Indonesia tahun 2010*. Jakarta: Bank Indonesia.





**UPH**  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

**Fakultas  
Ekonomi dan  
Bisnis**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Pelita Harapan  
Jl.M.H Thamrin Boulevard, Tangerang, Banten 15811, Indonesia  
Telp (021) 5460901



[ojs.uph.edu](http://ojs.uph.edu)



[@uphbusiness](https://www.instagram.com/uphbusiness)



[jpa@uph.edu](mailto:jpa@uph.edu)